



## LAPORAN KAJIAN

**MENDORONG KETERLIBATAN PEREMPUAN,  
PENYANDANG DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN**  
dalam Pengembangan Ekonomi Lokal  
Melalui Pendekatan Keperantaraan Pasar





## LAPORAN KAJIAN

# **MENDORONG KETERLIBATAN PEREMPUAN, PENYANDANG DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN** dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pendekatan Keperantaraan Pasar

### Penulis

Dian Utami Fadlan  
Hilda Kurniawati  
Novita Anggraeni

### Penyunting

Putri Mumpuni  
Ratna Fitriani

# Laporan Kajian Mendorong Keterlibatan Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pendekatan Keperantaraan Pasar

ISBN: .....

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2022) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

## *Penulis:*

Dian Utami Fadlan

Hilda Kurniawati

Novita Anggraeni

## *Penyunting:*

Putri Mumpuni

Ratna Fitriani

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini.

Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)

Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

**Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

**Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

# Tentang KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK memulai kegiatannya bulan Januari 2015 dengan fase pertama yang berjalan hingga bulan Juni 2018. DFAT menyetujui fase lanjutan KOMPAK untuk periode 2019 hingga 2022. KOMPAK akan beroperasi hingga 30 Juni 2022 dengan total nilai komitmen hingga A\$178 juta.

KOMPAK berkolaborasi dengan tiap tingkat pemerintahan guna menemukan solusi untuk berbagai tantangan utama dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Wilayah kerja KOMPAK mencakup: Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat/NTB, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Dukungan diberikan di tujuh provinsi dan kementerian di tingkat nasional. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan, melakukan uji coba, dan mengetes pendekatan inovatif. Selain itu, KOMPAK memberikan saran ahli, hasil studi, dan dukungan teknis kepada mitra pemerintah dalam membuat arahan, membangun kapasitas, dan mendukung implementasinya untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

KOMPAK bekerja dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan menerima manfaat dari peningkatan penyediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Demi mencapainya, KOMPAK mendukung berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dalam mengelola dan menghadirkan layanan dasar terkait administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, KOMPAK mendorong terselenggaranya perencanaan dan koordinasi pembangunan yang kuat, pemerintahan daerah yang inklusif dan efektif, serta sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kinerja dan efisiensi.



# Kata Pengantar

**Sejak tahun 2017, KOMPAK melaksanakan program uji coba keberantaraan pasar (market linkage) yang merupakan upaya pemberdayaan ekonomi lokal berdasarkan pendekatan sistem pasar (*market system approach*) di tujuh kabupaten. Uji coba keberantaraan pasar (KP) ini diharapkan bisa berkontribusi pada pencapaian dua target pembangunan nasional, yaitu penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta pengentasan kemiskinan. KP merupakan pendekatan pengembangan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan keuntungan mitra usaha terkait melalui perluasan akses ke pasar baru dan penguatan model bisnis yang sudah ada. Pendekatan ini dilakukan secara kolaboratif antara UMKM, pemerintah daerah, mitra lokal, dan mitra swasta. Ada tiga fokus utama dari model KP: daya jangkau, kesinambungan, dan dampaknya pada pengentasan kemiskinan (Modul KP, *Kompak-BAPPENAS 2021*).**

Kelompok miskin dan rentan, yang didalamnya termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, merupakan target penerima manfaat utama dalam pendekatan KP. Hal ini menjadikan pengarusutamaan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) menjadi perhatian khusus, baik pada saat uji coba maupun replikasi. Pengarusutamaan GESI dalam KP berpijak pada kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas dalam pembangunan, antara lain: Instruksi Presiden No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; Undang-undang tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan No.7/tahun 1984 dan Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selama uji coba, KOMPAK berupaya mengintegrasikan prinsip dan sejumlah indikator terkait pengarusutamaan GESI. Beberapa contoh integrasi GESI dalam KP yang terlihat dalam kajian ini diantaranya adalah dalam tahapan penentuan lokasi intervensi, prioritas komoditas dan identifikasi modalitas yang dimiliki masyarakat. Pelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas sendiri sudah dilihat sebagai sebuah peluang akselerasi dan penambahan nilai bagi aktivitas ekonomi berbasis masyarakat dengan memposisikan mereka sebagai pelaku aktif pembangunan yang mampu memberikan kontribusi ekonomi dan sosial bagi komunitas dan daerah.

Menjelang berakhirnya uji coba dan juga selesainya program KOMPAK di bulan Juni 2022, pada tahun 2021 KOMPAK melakukan kajian untuk mengetahui hasil dan perkembangan pengarusutamaan GESI dalam model KP. Secara spesifik hasil kajian mengidentifikasi aspek yang sudah berdampak signifikan dan yang perlu diperkuat pada setiap tahapan integrasi GESI. Studi ini tidak hanya mengukur hasil dan seberapa besar dampak, tetapi juga mengidentifikasi siapa penerima manfaat pada tataran komunitas. Hasil studi menunjukkan bahwa, intervensi KP diberbagai wilayah uji coba, sudah melibatkan

perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberikan manfaat dalam berbagai bentuk, seperti: (a) bertambahnya pendapatan; (b) meningkatnya pengetahuan baik terkait teknis maupun manajemen; (c) terbangunnya jaringan yang mempengaruhi relasi dan posisi sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat yang menjadi lebih baik; dan (d) memberi peluang kepemimpinan perempuan dalam manajemen UMKM dan Koperasi, seperti contoh pada Koperasi Berdikari Makmur di Pematang, Jawa Tengah.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa pengarusutamaan GESI dalam KP perlu dilakukan secara sistematis dan terukur. Perlu ada kolaborasi dan pembagian peran antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan mitra pembangunan dalam pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Bumdesa secara terperinci. Selain itu, adanya data pilah dan analisis kesenjangan sangat membantu berbagai pihak untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan/masalah dan membangun solusi yang tepat sasaran, serta mengukur dampak dari intervensi terhadap kelompok rentan secara lebih akurat.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang memberikan dukungan positif selama uji coba dan saat studi ini dilakukan. Semoga kerja kolaborasi ini berdampak bagi pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya untuk masyarakat dan kelompok rentan. Harapannya, studi ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan rujukan tim penggerak replikasi atau dinas teknis dalam menindaklanjuti keputusan untuk mereplikasi model Keperantaraan Pasar yang responsif gender dan inklusif.

Jakarta, 7 Juni 2022

**Anna Winoto**

*Team Leader KOMPAK*



# Daftar Isi

<b>BAB 1. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN</b>	<b>11</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b>	<b>12</b>
1.1.1. Pendekatan Sistem Pasar	14
1.1.2. Tahapan Keperantaraan Pasar	15
1.1.3. Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam Program Keperantaraan Pasar	15
<b>1.2 Analisis Kesenjangan</b>	<b>17</b>
<b>1.3 Tujuan Kajian</b>	<b>18</b>
<b>1.4 Lingkup Kajian</b>	<b>19</b>
<b>1.5 Pertanyaan Penelitian</b>	<b>19</b>
<b>1.6. Metodologi</b>	<b>20</b>
1.6.1. Tahap Persiapan dan Pengulasan Literatur	20
1.6.2. Tahap Pengumpulan Data	20
1.6.3. Kriteria Pemilihan Responden	21
1.6.4. Tahap Kompilasi Data dan Analisis	22
1.6.5. Kerangka Analisis	23
<b>BAB II. TEMUAN DAN ANALISIS</b>	<b>25</b>
<b>2.1. Tahap Perencanaan</b>	<b>26</b>
Pertanyaan Kajian 1 : Sejauh mana sistem dalam pendekatan keperantaraan pasar ini menjamin keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Faktor-faktor utama apa saja yang mempengaruhinya?	
<b>2.2. Tahap Implementasi</b>	<b>29</b>
Pertanyaan Studi 2: Bagaimana pemetaan peran, kebutuhan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Apakah kondisi tersebut memengaruhi tingkat dan kualitas keterlibatan serta penerimaan manfaat?	
<b>2.3. Pola dan Relasi Kelembagaan</b>	<b>38</b>
Pertanyaan Studi 3 : Bagaimana pola dan relasi berbagai lembaga di desa memengaruhi ketersediaan dukungan dan keberlanjutan program UMKM dalam model keperantaraan pasar yang diimplementasikan oleh KOMPAK (khususnya dalam aspek keterlibatan kelompok rentan dan manfaatnya bagi mereka)?	
<b>2.4. Tahap Evaluasi</b>	<b>35</b>
Pertanyaan Kajian 4: Apa pembelajaran penting yang didapatkan dari implementasi keperantaraan pasar dalam kaitannya dengan upaya mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, baik secara umum untuk semua kelompok rentan (termasuk kelompok yang diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS), dan secara khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin?	

<b>2.5. Indikator</b>	<b>47</b>
Pertanyaan Studi 5: Indikator apa saja (kuantitatif dan kualitatif) yang dapat secara sensitif dan tepat guna mengukur tingkat keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sekaligus manfaatnya bagi kelompok tersebut?	
<b>2.6. Peranan Mitra dalam Implementasi GESI dalam Tahapan KP di Daerah</b>	<b>49</b>
<b>BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>53</b>
<b>3.1. Kesimpulan</b>	54
<b>3.2. Rekomendasi</b>	56
<b>Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian dan Informan</b>	<b>62</b>
<b>Lampiran 2. Profil Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Keperantaraan Pasar di 7 Lokasi Kajian</b>	<b>67</b>
<b>2.1. UKM Kubu Kreatif, Aceh Barat, Aceh dengan Komoditas Eceng Gondok (<i>Eichornia Crassipes</i>)</b>	68
<b>2.2. Koperasi Sipatuo, Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan Komoditas Rumput Laut</b>	76
<b>2.3. Desa Wisata, Lombok Utara, NTB dengan Komoditas Pariwisata</b>	83
<b>2.4. Koperasi Berdikari Makmur, Desa Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah dengan Komoditas Teh</b>	92
<b>2.5. Desa Wisata Nanas Madu Pemalang, Jawa Tengah dengan Komoditas Pariwisata</b>	99
<b>2.6. BUMDesma Banjar dan Panggal, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan Komoditas Sabut Kelapa</b>	105
<b>2.7. Kelompok Pengolah Mocaf Boga Lestari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan Komoditas Tepung Singkong/<i>modified cassava flour (Mocaf)</i></b>	111

# Daftar Singkatan

BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMDesma	: Badan Usaha Milik Desa Bersama
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
GESI	: Gender Equality and Social Inclusion/Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
MAHKOTA	: Menuju Masyarakat Indonesia yang Kuat dan Sejahtera
Musrena Keren	: Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan
Kemensos	: Kementerian Sosial
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KU	: Kelompok Usaha
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPDis	: Organisasi Penyandang Disabilitas
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemdes	: Pemerintah Desa
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
RPK	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sepeda Keren	: Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah







## BAB 1

# Kerangka Konseptual Kajian

## 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 mencantumkan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan dua target utama Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Secara spesifik, dua strategi mikro penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2020–2024 meliputi penurunan beban pengeluaran serta peningkatan pendapatan kelompok miskin. Strategi ini didukung lewat pelaksanaan Reformasi Perlindungan Sosial pada tahun 2021 dan 2022 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Beberapa agenda reformasi perlindungan sosial mencakup transformasi data menuju registrasi sosial-ekonomi, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif, dan digitalisasi penyaluran.

Selain itu, ada 7 agenda pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi dan mewujudkan pembangunan yang menjamin kesejahteraan, adil, dan berkesinambungan. Dua dari tujuh agenda pembangunan mencakup pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Strategi pengembangan sektor atau komoditas unggulan daerah vital untuk merealisasikan agenda pembangunan pemerintah tersebut<sup>1</sup>.

Sejalan dengan tujuan ini, KOMPAK telah melaksanakan program uji coba keperantaraan pasar (*market linkage*) atau KP berdasarkan pendekatan sistem pasar (*market system approach*) sejak tahun 2017. KP merupakan pendekatan pengembangan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMK dan keuntungan para mitra, melalui perluasan akses ke pasar baru dan penguatan model bisnis yang sudah ada antara UMK, pemerintah, mitra lokal, dan mitra swasta. Ada tiga fokus utama dari model KP:

- 1) Daya jangkau;**
- 2) Kesinambungan; dan**
- 3) Dampaknya pada Pengentasan Kemiskinan.**

Penciptaan model bisnis berbasis KP diharapkan memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan produksi serta inovasi UKM dan seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki peran penting tetapi masih terpinggirkan seperti perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

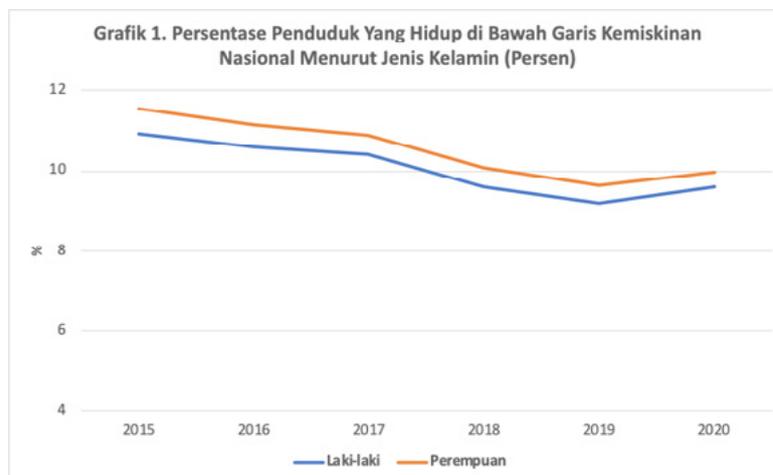
Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan lain adalah golongan masyarakat yang patut mendapat perhatian dalam upaya pengembangan UMK dan pengentasan kemiskinan. Ini dikarenakan 50% dari 99,9% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia dimiliki oleh perempuan<sup>2</sup>. Meskipun data menunjukkan persentase penduduk perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan telah mengalami tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2020, jumlahnya masih lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki (Grafik 1).

---

1 Lihat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024

2 <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2827/sispreneur-strategi-dukung-perempuan-pelaku-umkm-dalam-masa-pandemi>

Data Kementerian Sosial (Kemensos) di tahun 2020 juga menunjukkan 1,3 juta penduduk dengan status ekonomi terendah merupakan penyandang disabilitas, dengan penyandang disabilitas perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan karena kesenjangan akses ke pendidikan dan pelatihan<sup>3</sup>.



Sumber: BPS, 2020.

Berdasarkan sejumlah kajian yang dilakukan sebelumnya, program KP memberikan peluang bagi perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satu studi yang dampak sistem KP terhadap gender oleh Balasubramaniam et al. (2002) menganalisis hubungan timbal balik antara sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja, dan KP di sebuah desa di Tamil Nadu, India, yakni terhadap keterampilan dan upah. Studi ini menemukan bahwa KP meningkatkan permintaan dan kesempatan kerja bagi perempuan dalam alur produksi dari hulu ke hilir sekaligus memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk mendapatkan akses ke kredit dan pelatihan.

Studi kasus lain di Malawi dan Uganda oleh Njuki et al. (2011) menemukan bahwa penentuan komoditas dalam sistem KP berdampak signifikan terhadap penerima manfaat perempuan. Studi ini menemukan bahwa perempuan mampu mengontrol pendapatan hanya saat: 1) komoditas dijual di pasar lokal atau pasar informal dan 2) pendapatan bersumber dari komoditas dengan harga yang relatif rendah. Perempuan biasanya memilih untuk memproduksi komoditas hasil tanaman pangan sehari-hari, seperti kacang polong dan kacang tanah. Ini karena biasanya laki-laki mengambil alih kontrol atas komoditas yang menghasilkan keuntungan dan dapat dijual di pasar formal. Studi ini merekomendasikan agar pertimbangan gender diintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pemilihan komoditas, terkait peran dan preferensi perempuan dalam KP.

Meskipun tidak secara langsung meneliti sistem KP, studi Winters et al. (2005) juga menemukan bahwa sistem kontrak produksi benih jagung hibrida (*hybrid corn seed*) antara perusahaan multinasional bernama Pioneer Hybrid International Inc. dengan petani jagung di Jawa Timur membuka akses para petani kecil ke pasar internasional. Selain kerja sama dengan perusahaan multinasional, program memberikan akses kredit kepada petani kecil, membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan dan petani di luar anggota keluarga (*non-family labour*), serta meningkatkan pengetahuan yang dapat menghasilkan profit dan meningkatkan produktivitas lahan.

3 [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf)

KOMPAK melihat bahwa UMKM adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi lokal Indonesia dengan peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan upaya mengatasi kesenjangan. Menurut kajian yang dilakukan KOMPAK sebelumnya<sup>4</sup>, ini dikarenakan sebagian besar rumah tangga miskin dan hampir miskin di Indonesia bermata pencaharian sebagai pemilik dan tenaga kerja UMKM di sektor pertanian dan nonpertanian<sup>5</sup>.

Di dalam kategori UMKM, subkategori UMK berkaitan sangat erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Umumnya, usaha mikro yang dimiliki oleh rumah tangga miskin atau hampir miskin dijalankan oleh anggota rumah tangga sendiri tanpa upah, menggunakan teknologi dan pengelolaan sederhana, dan memiliki orientasi utama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (*subsistence*) atau bertahan hidup (*survival*). Sedangkan, usaha kecil memberikan lapangan pekerjaan di tingkat lokal bagi tenaga kerja upahan dengan kualifikasi rendah, tetapi telah memiliki orientasi komersial dan semangat kewirausahaan yang lebih kuat.

Meskipun termasuk golongan yang cukup rentan terhadap kemiskinan, kelompok usaha (KU) mikro ini punya potensi besar untuk berkembang dengan cepat menjadi usaha kecil dan menengah. Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di berbagai bidang, seperti bidang sosial (pengetahuan dan keterampilan), ekonomi (pengembangan usaha dan kesempatan kerja), serta kemasyarakatan/politik (kesadaran akan hak dan kewajiban) menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi KU mikro<sup>6</sup>.

### 1.1.1. Pendekatan Sistem Pasar

Pendekatan sistem pasar ini berbeda dengan sistem konvensional setidaknya dalam 3 aspek. Pertama, penentuan komoditas dilakukan secara sistematis menggunakan kriteria serta analisis terkait kondisi pasar dan pemetaan rantai nilai. Kedua, alih-alih dilaksanakan secara *top-down*, intervensi dalam pendekatan pasar direncanakan secara kolektif bersama mitra perantara, perwakilan kelompok sasaran, dan mitra swasta (*off-takers*) dan difasilitasi oleh Operator KP. Model bisnis yang diciptakan juga menargetkan kelompok sasaran dan mencoba mengatasi permasalahan yang ada di seluruh rantai nilai. Ketiga, pemantauan pendekatan pasar fokus kepada nilai input, aktivitas, dan nilai output sekaligus perubahan perilaku dan dampaknya terhadap kelompok sasaran.

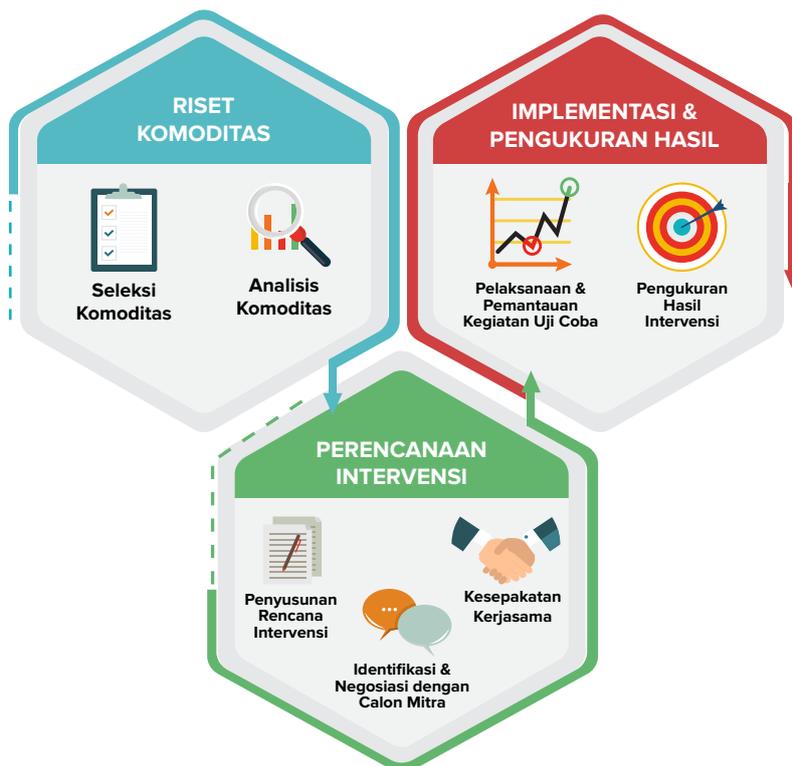
---

4 Lihat Dokumen Panduan Keperantaraan Pasar KOMPAK (2016)

5 Kementerian Koperasi dan UKM (2018). "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016–2017"

6 Ismawan, B. (2019). "Pengalaman Bina Swadaya dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial". SMERU.

Gambar 1. Skema Tahapan dalam Sistem Keperantaraan Pasar



Sumber: Panduan Keperantaraan Pasar KOMPAK

### 1.1.2 Tahapan Keperantaraan Pasar

Aspek-aspek utama dalam pendekatan sistem pasar ini lalu diterapkan dalam tiap tahapan program KP. Berdasarkan Dokumen Panduan KP KOMPAK, ada 3 tahapan utama dalam program KP, yakni: (1) Riset Komoditas (seleksi dan analisis komoditas); (2) Perencanaan Intervensi (penyusunan rencana intervensi, negosiasi, dan kerja sama dengan calon mitra); dan (3) Implementasi dan Pengukuran Hasil, dengan tiap tahapan memiliki beberapa proses pelaksanaan yang melibatkan UMK, mitra lokal, mitra swasta, dan pemerintah daerah (pemda).

### 1.1.3 Aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam Program Keperantaraan Pasar

Program KP ini ditujukan agar menjadi salah satu intervensi dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, fokus utama intervensi ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (masyarakat miskin), dengan memperhatikan dan mendukung partisipasi kelompok masyarakat rentan (perempuan, penyandang disabilitas, pekerja informal, lansia, dan kelompok rentan lainnya), sebagai upaya menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang inklusif.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Sedangkan, Bank Dunia mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses untuk meningkatkan persyaratan bagi individu dan kelompok untuk dapat memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan menikmati akses yang sama dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara sosial maupun fisik.

Bank Dunia juga menyatakan bahwa inklusi sosial merupakan prinsip utama untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dunia pada tahun 2030 serta mempromosikan kemakmuran secara kolektif<sup>4</sup>. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di tahun 2021 guna mempercepat pencapaian Kemiskinan Ekstrem Nol atau “Zero Extreme Poverty”. Hal ini untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin kronis hingga kisaran 0–1% atau maksimum sebanyak 3 juta masyarakat miskin kronis di tahun 2024<sup>7</sup>.

Dalam konteks pembangunan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi pembangunan nasional yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sejumlah aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkungan terkecil (rumah tangga), masyarakat, hingga negara. Strategi ini diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan dari tiap kelompok masyarakat, terlepas dari jenis kelamin, usia, dan kondisi fisik. Penerapan PUG di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, dengan PUG bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan sekaligus meningkatkan penguasaan dan partisipasi dalam proses pembangunan.

---

**Sementara itu, KOMPAK adalah salah satu program yang didukung oleh Pemerintah Australia yang berkomitmen untuk mendukung target tersebut dengan ‘berada di garis depan dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak, serta turut serta dalam upaya mendorong kesetaraan gender di wilayah Indo-Pasifik’.**

---

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu dari enam prioritas investasi hibah pembangunan Australia dan lebih dari 80 persen fokus dari semua program. Pemerintah Australia juga telah berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di negara-negara berkembang. Karenanya, di tiap kegiatannya, KOMPAK selalu berusaha melakukan pengarusutamaan GESI dengan berpegang pada 5 prinsip utama GESI dalam strategi KOMPAK, yakni:

- 1) Menghargai keberagaman;**
- 2) Mempromosikan proses dan aktivitas yang dapat diakses (*accessible*);**
- 3) Keterlibatan dan partisipasi kelompok rentan (*nothing about us without us*);**
- 4) Data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan disabilitas; dan**
- 5) Menghasilkan pembelajaran dari berbagai temuan.**

Dalam Panduan KP KOMPAK (2016), sejumlah prinsip GESI telah diupayakan agar diterapkan dalam desain dan tiap tahapan KP. Sebagai contoh, dalam riset komoditas, dampak pengembangan komoditas terhadap potensi manfaat yang diterima UMK, termasuk buruh tani kecil, dan kelompok miskin, sekaligus perspektif gender dan inklusivitas telah dipertimbangkan. Di tahapan **perencanaan intervensi**, potensi daya jangkau terhadap kelompok miskin (*poverty outreach*) telah dipertimbangkan dan diinformasikan kepada mitra dan implementasi program disepakati agar melibatkan kelompok masyarakat rentan. Yang terakhir, indikator GESI telah disertakan dalam tahap Monitoring dan Evaluasi (M&E), serta kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin telah dilibatkan dalam evaluasi program di tahap **implementasi dan pengukuran hasil**.

---

7 [http://sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable\\_file/bahan-bappenas-rakor-dayasos-5-april-2021pdf\\_606ad420b47ab.pdf](http://sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/bahan-bappenas-rakor-dayasos-5-april-2021pdf_606ad420b47ab.pdf)

## I.2 ANALISIS KESENJANGAN

Program KP KOMPAK sudah diujicobakan di 7 kabupaten/kota di 5 provinsi, yaitu: Kabupaten Aceh Barat, Aceh; Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan; Kabupaten Lombok Utara, NTB; Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah; dan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Program ini juga telah diimplementasikan dan berhasil membantu perluasan pasar untuk sejumlah unit usaha di wilayah kerja KOMPAK. Meskipun usulan untuk melibatkan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya) telah disertakan dalam tahap perencanaan dan implementasi program, dalam praktiknya upaya ini belum optimal dan masih ada beberapa kendala, di antaranya:

1

Pelibatan kelompok rentan belum dilaksanakan secara sistematis selama program. Dengan kata lain, pelibatan kelompok rentan belum sepenuhnya sesuai dengan desain KP;

2

Pelibatan kelompok rentan belum dilaksanakan secara sistematis selama program. Dengan kata lain, pelibatan kelompok rentan belum sepenuhnya sesuai dengan desain KP;

3

Pengukuran tingkat keterlibatan kelompok rentan dan besaran manfaat yang didapatkan dari intervensi juga belum dapat diidentifikasi secara jelas; dan

4

Pemahaman dan kapasitas pelaksana program terkait implementasi GESI dalam KP di lapangan masih terbatas dan belum merata.

Dengan demikian, kajian GESI ini didesain secara kualitatif agar menganalisis besarnya manfaat, peluang, dan tantangan yang dihadapi kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, serta kelompok masyarakat rentan lain) yang ditemukan di tiap tahapan produksi dari hulu ke hilir. Lebih jauh, kajian ini juga bertujuan untuk melihat, di tataran tata kelola pemerintah, apakah ada perubahan perilaku dan tingkat kesadaran (*awareness*) mengenai PUG di tiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM melalui KP dalam pembangunan ekonomi lokal. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mendorong penetapan indikator yang mencerminkan GESI. Ini agar indikator terkait GESI tidak hanya dipandang sebagai statistik partisipasi saja, alih-alih wawasan mendalam terkait sejauh mana tata kelola pemerintah berperan mendorong terwujudnya partisipasi kelompok rentan yang berkualitas dan berdampak positif.

### 1.3 TUJUAN KAJIAN

Secara spesifik, kajian GESI ini memiliki beberapa tujuan utama yang membedakannya dengan kajian lain, di antaranya untuk:

- 1** | **Mengetahui sejauh mana berbagai aspek pengarusutamaan GESI telah diterapkan di tahap perencanaan/desain program, implementasi, dan monitoring (dan/atau evaluasi) program KP, sehingga dapat:**
  - Mengidentifikasi dan mengukur hal-hal apa saja yang sudah diterapkan berdasarkan desain program;
  - Melihat sejauh mana pengarusutamaan GESI memberi pengaruh dan manfaat bagi pelaksanaan program dan bagi kelompok penerima manfaat;
  - Mengidentifikasi gap serta solusi dari perbandingan perencanaan dan implementasi di tiap tahap (hulu ke hilir), baik untuk butir rencana yang terlaksana maupun tidak terlaksana;
  - Menganalisis sejauh mana pandemi COVID-19 memengaruhi keterlibatan kelompok rentan dalam KP, misalnya dampaknya terhadap kegiatan maupun pendapatan kelompok rentan;
  - Menganalisis sejauh mana pengarusutamaan GESI di tingkat kebijakan mampu mendukung intervensi KP, dan sebaliknya, apakah strategi pelibatan kelompok rentan yang dilakukan telah sejalan dengan strategi GESI KOMPAK (*twin-track approach*);
  - Menganalisis sejauh mana implementasi pendekatan KP dapat menavigasi tantangan yang dihadapi kelompok rentan di lapangan. Misalnya, apakah pendekatan tersebut adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan kelompok rentan selama implementasi program, sehingga program berjalan dan meningkat.
  
- 2** | **Menganalisis lebih jauh keterlibatan kelompok rentan dalam program KP di wilayah uji coba, yang secara khusus difokuskan pada manfaat yang diterima kelompok rentan.** Ini dilakukan dengan menggali informasi dari pihak pengelola program (KOMPAK dan KU), pemangku kepentingan (pemerintah di tingkat nasional, daerah, maupun desa), mitra (*off-takers*), dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat (perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, serta kelompok masyarakat rentan lain).
  
- 3** | **Memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor utama dan strategi yang diperlukan agar model KP dapat secara sistematis mendorong keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama, khususnya untuk:**
  - Mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan dan cara program ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut;
  - Mengetahui sejauh mana manfaat telah diterima (baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan);
  - Mengidentifikasi hambatan yang masih menjadi kendala pelibatan mereka;
  - Mengidentifikasi peluang keterlibatan kelompok rentan, baik yang sudah ditetapkan program maupun yang masih dapat dikembangkan di tahap selanjutnya; dan
  - Mendokumentasikan praktik terbaik dan pembelajaran yang didapat dari pelibatan kelompok rentan dalam intervensi ini.

- 4** Mengetahui tingkat kualitas pengarusutamaan GESI dalam program KP, dan ada/tidaknya perubahan pengetahuan, sikap, dan upaya pemerintah di berbagai tingkatan dalam mengarusutamakan GESI selama program KP. Ini berkaitan dengan aspek kesinambungan dari implementasi program KP saat ini dan upaya/rekomendasi replikasi program serupa untuk pengembangan UMKM di daerah di masa mendatang.
- 5** Menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan panduan dan bahan advokasi bagi pelaksana program dan para pemangku kepentingan, serta memperkuat inklusivitas dalam panduan replikasi model KP di tingkat daerah maupun nasional, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dan memastikan manfaat diterima oleh kelompok rentan.

## 1.4 LINGKUP KAJIAN

Kajian ini menganalisis pelaksanaan program di 7 kabupaten, yakni Aceh Barat, Pacitan, Pekalongan, Trenggalek, Lombok Utara, Bantaeng, dan Pemalang. Agar kajian dapat mencakup wilayah dengan beragam karakteristik, penentuan 7 wilayah ini didasari tiga indikator utama yakni:

**1**

Sejauh mana implementasi KP berhasil meluaskan akses ke pasar dan meningkatkan kualitas produk UMK;

**2**

Sejauh mana prinsip GESI diterapkan di tiap alur produksi dari hulu ke hilir; dan

**3**

Pemilihan wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang dapat memengaruhi upaya untuk mempromosikan atau berdampak negatif terhadap GESI. KOMPAK memahami keberadaan norma-norma agama, etnis, budaya, politik, dan sosial yang membentuk dan mempengaruhi akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol bagi perempuan miskin, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan. Pemahaman tentang pengaruh dan faktor sosial budaya ini penting untuk menjamin pendekatan yang dilakukan KOMPAK tidak membahayakan (do no-harm) bagi masyarakat setempat serta kegiatan dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan konteks lokal.

## 1.5 PERTANYAAN PENELITIAN

Studi ini memiliki 5 pertanyaan penelitian utama yang digunakan sebagai acuan, yakni:

**1**

Sejauh mana sistem dalam pendekatan keperantaraan pasar menjamin keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Faktor-faktor utama apa saja yang memengaruhi keterlibatan mereka?

**2**

Bagaimana pemetaan peran, kebutuhan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Apakah kondisi tersebut memengaruhi tingkat dan kualitas keterlibatan serta penerimaan manfaat?

- 3** | Bagaimana pola dan relasi berbagai lembaga di desa memengaruhi ketersediaan dukungan dan keberlanjutan program UMKM dalam pendekatan keperantaraan pasar yang diimplementasikan oleh KOMPAK (khususnya dalam aspek keterlibatan kelompok rentan dan manfaatnya bagi mereka)?
- 4** | Apa pembelajaran penting yang didapatkan dari implementasi pendekatan keperantaraan pasar dalam kaitannya dengan upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, baik secara umum untuk semua kelompok rentan (termasuk kelompok yang diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS), dan secara khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin?
- 5** | Indikator apa saja (kuantitatif dan kualitatif) yang dapat secara sensitif dan tepat guna mengukur tingkat keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sekaligus manfaatnya bagi kelompok tersebut?

Adapun pertanyaan turunan dari kelima pertanyaan utama tersebut tercantum dalam lampiran.

## 1.6. METODOLOGI

Kajian kualitatif ini dilakukan dalam beberapa tahap: persiapan dan pengulasan literatur, pengumpulan data, serta kompilasi data dan analisis.

### 1.6.1. Tahap Persiapan dan Pengulasan Literatur

Pada tahap ini, kegiatan difokuskan untuk mengulas dokumen program dan kajian literatur, meninjau dokumen kebijakan terkait (RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Strategis/Renstra kementerian terkait), tinjauan Sistem Informasi Desa (SID), serta diskusi dengan Tim Program KOMPAK.

### 1.6.2 Tahap Pengumpulan Data

Dikarenakan adanya pembatasan mobilitas dan penjarakan sosial (*social distancing*) akibat pandemi COVID-19, pengumpulan data dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) dan/atau wawancara virtual dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet dan telepon, tim memastikan terlebih dahulu melalui koordinator di tiap wilayah mengenai responden, jadwal, dan lokasi wawancara. Apabila akses internet terbatas, wawancara dilaksanakan di lokasi KU atau lokasi lain dengan akses jaringan telepon dan pendampingan koordinator wilayah atau staf KU yang berperan sebagai fasilitator wawancara. Berikut merupakan responden yang menjadi informan dalam wawancara ini:

**Tabel 1. Responden Kajian**

Kelompok Responden	Informan
Kementerian	Bappenas (1 orang dari divisi terkait)
	Kementerian Koperasi dan UMKM (2 orang dari divisi terkait) – prospektif
Pemda/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pemerintah desa/pemdes (diutamakan kepala desa/ <i>key person</i> unit terkait) (2 orang/kabupaten)
	Supradesa (1 orang/kabupaten)
	Pengelola kecamatan (1 orang/kabupaten)
	OPD terkait (misal: Dinas Koperasi dan UMKM) (2 orang/kabupaten)
Pelaksana program	Internal KOMPAK: - Staf KOMPAK (Tim LED dan GESI)
	Eksternal KOMPAK: a. <i>Off-takers</i> (2 orang/kabupaten) b. KU (pemilik dan pengurus) (2 orang/KU) BUMDes, BUMDesma, Koperasi, UKM, KU Perempuan, Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis di tiap Kabupaten
	c. Akademisi: PIC program kerja sama dengan KU (jika ada) (1 orang/kabupaten)
Kelompok rentan	Perempuan: Penyandang disabilitas Masyarakat miskin (2 orang/KU di tiap kabupaten)
Masyarakat umum di lingkungan usaha	Laki-laki: Masyarakat umum bukan penerima manfaat intervensi (2 orang/KU di tiap kabupaten)

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, kajian ini juga mewawancarai masyarakat penerima manfaat demi mengetahui perspektif mereka soal pelibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dalam implementasi pendekatan KP (2 orang di tiap wilayah KU). Di samping itu, kajian ini menerima informasi terkait manfaat yang diterima kelompok rentan lain (apabila ada).

### 1.6.3 Kriteria Pemilihan Responden

Agar proses pengambilan data lebih terfokus dan tepat sasaran, responden kelompok rentan dipilih berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti usia produktif (18–64 tahun) dan penghasilan (<Rp600.000 per bulan, dan/atau penerima bantuan sosial). Responden utamanya dipilih dari responden yang juga berpartisipasi dalam survei KP, dengan tambahan spesifik kelompok rentan lain (perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok lain) yang teridentifikasi dari data desa. Kriteria-kriteria tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Kriteria Pemilihan Responden**

Kelompok Sasaran	Kategori
Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia produktif (18–64 tahun)</li> <li>- Miskin (penghasilan kepala rumah tangga di bawah Rp600.000/bulan, dan/atau mendapat bantuan sosial)*</li> <li>- Kepala rumah tangga</li> </ul> <p>*Kriteria ini mengacu pada rata-rata penghasilan responden baik sebelum dan setelah pandemi (sekaligus dapat dipakai untuk membandingkan penghasilan responden sebelum dan setelah pandemi)</p>
Penyandang disabilitas	Usia produktif (18–64 tahun)
Masyarakat miskin	<p>Yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin (mengacu pada 14 kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik/BPS), di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesi sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan/atau profesi lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000 per bulan.</li> <li>• Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.</li> <li>• Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit/nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.</li> <li>• Kelompok penerima bantuan sosial</li> <li>• Masyarakat miskin yang belum/tidak memperoleh akses bantuan pemerintah</li> </ul>
Kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan/penyandang disabilitas/masyarakat miskin bukan sebagai penerima manfaat langsung dari program KP ini, misalnya yang bekerja dengan membantu di KU atau lainnya.</li> <li>• Pekerja informal</li> <li>• Anak tidak sekolah</li> </ul>

### 1.6.4 Tahap Kompilasi Data dan Analisis

Setelah pengambilan data primer dan sekunder, 4 tahapan analisis dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan metode *content analysis* serta analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh.

Penggunaan analisis SWOT dalam kajian ini diharapkan dapat menangkap gambaran dari berbagai hal yang diidentifikasi dalam pengambilan data: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam praktik pengarusutamaan GESI selama program KP. Ini selaras dengan komitmen dan agenda pemerintah baik di pusat maupun daerah, yakni terkait pengarusutamaan isu gender dan inklusi sosial khususnya untuk penyandang disabilitas dalam pembangunan di seluruh sektor. Selain itu, analisis SWOT yang dipakai untuk analisis dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat mengidentifikasi tiap kesenjangan yang ada, sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi praktik terbaik dan masukan untuk penyempurnaan panduan ke depannya dalam replikasi program KP di tingkat nasional maupun daerah.

### 1.6.5 Kerangka Analisis

Dalam menganalisis hasil dari pengumpulan data, studi ini mencoba untuk fokus pada aspek GESI di tiga tahap utama yakni tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

**Tabel 3. Kerangka Analisis**

Tahapan	Fokus Analisis	Pertanyaan Penelitian Utama
<b>Tahap Perencanaan</b> (Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi)	1. Identifikasi dan analisis prinsip-prinsip GESI dalam tahapan desain dan perencanaan yang mencakup: keberagaman; aksesibilitas; keterlibatan dan partisipasi kelompok rentan; penggunaan data terpilah dan pembelajaran untuk perbaikan intervensi 2. Identifikasi dan analisis prinsip-prinsip GESI dalam penentuan target yang akan dicapai	1. Sejauh mana sistem pendekatan KP memastikan keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Faktor-faktor utama apa saja yang memengaruhinya?
<b>Tahap Implementasi</b> (Alur produksi di seluruh rantai nilai)	1. Analisis GESI dalam implementasi KP di tiap rantai nilai di tiap wilayah 2. Identifikasi tantangan GESI dalam KP dan tantangan program pada umumnya 3. Identifikasi peluang GESI yang dapat dieksplorasi ke depannya 4. Identifikasi gap antara perencanaan & implementasi	2. Bagaimana pemetaan peran, kebutuhan serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Apakah kondisi tersebut memengaruhi tingkat dan kualitas keterlibatan serta penerimaan manfaat? 3. Bagaimana pola dan relasi berbagai lembaga di desa memengaruhi ketersediaan dukungan dan keberlanjutan program UMKM dalam model keperantaraan pasar yang diimplementasikan oleh KOMPAK?
<b>Tahap Evaluasi</b> (Aspek berkesinambungan)	1. Penyusunan praktik terbaik, pembelajaran, dan arah rekomendasi lewat upaya mendorong GESI 2. Penyusunan program prioritas/rencana aksi (jika memungkinkan)	4. Apa pembelajaran penting yang didapatkan dari implementasi keperantaraan pasar dalam kaitannya dengan upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, baik secara umum untuk semua kelompok rentan (termasuk kelompok yang diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS), dan secara khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? 5. Indikator apa saja (kuantitatif dan kualitatif) yang dapat secara sensitif dan tepat guna mengukur tingkat keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sekaligus manfaatnya bagi kelompok tersebut?





## BAB 2

# Temuan dan Analisis

Di bagian ini temuan dihasilkan dan analisis dilakukan berdasarkan pertanyaan kajian yang dirumuskan sebagai berikut.

## 2.1. TAHAP PERENCANAAN

**Pertanyaan Kajian 1 : Se jauh mana sistem dalam pendekatan keberantaraan pasar ini menjamin keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Faktor-faktor utama apa saja yang mempengaruhinya?**

**Temuan:** Upaya pelibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat sudah dimulai sejak proses pemilihan lokasi intervensi.

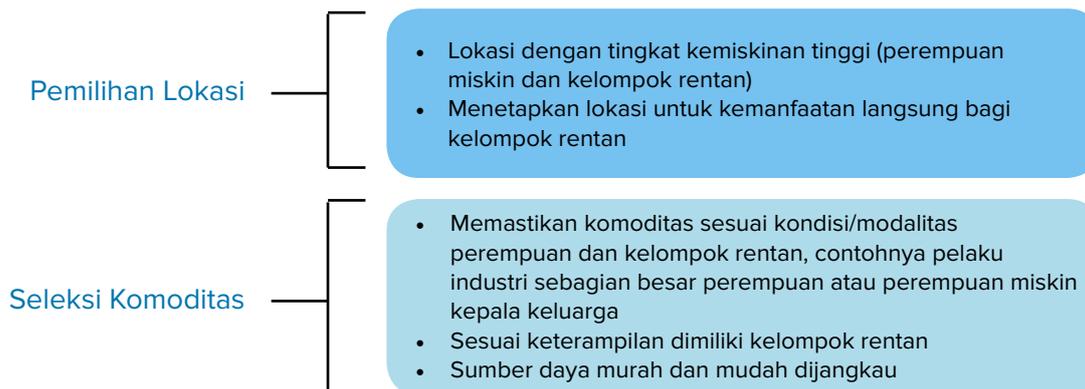
**Kata Kunci:** menjamin keterlibatan, faktor utama yang memengaruhi.

Pemilihan kabupaten uji coba ditentukan salah satunya dengan memperhatikan lokasi dengan tingkat kemiskinan tinggi sehingga intervensi bisa diarahkan agar menjangkau dan memberi manfaat untuk perempuan miskin dan kelompok rentan miskin lainnya di lokasi tersebut. Pada tahap awal persiapan intervensi, upaya mendorong keterlibatan dan memastikan perempuan dan kelompok rentan mendapat manfaat dimulai saat seleksi komoditas atau diskusi untuk menentukan fokus aktivitas ekonomi apa yang bisa menguatkan dan sesuai dengan kondisi atau modalitas perempuan dan kelompok rentan. Seleksi ini mencakup, di antaranya, penentuan industri yang pelakunya sebagian besar perempuan atau kepala keluarga perempuan miskin, atau yang sesuai dengan keterampilan yang sudah dimiliki atau sumber daya yang mudah didapat dan murah untuk mereka (seperti pemilihan komoditas eceng gondok di Aceh Barat, sabut kelapa di Trenggalek, dan rumput laut di Bantaeng), atau aktivitas yang sesuai dengan kondisi mereka seperti penetapan desa wisata dan penguatan peran perempuan atau kelompok rentan lain seperti pemuda putus sekolah dan penyandang disabilitas di lokasi terkait (seperti pemilihan pendampingan desa wisata di Kabupaten Lombok Utara, NTB dan Pemalang, Jawa Tengah). Indikator untuk memastikan manfaat program bagi kelompok rentan ini menjadi salah satu indikator utama dalam pembobotan untuk menentukan komoditas yang akan dipilih menjadi fokus intervensi KP. Indikator tersebut digunakan bersama dengan beberapa indikator penentuan komoditas KP utama seperti ada atau tidaknya potensi komoditas untuk permintaan pasar atau keberadaan *off-takers* potensial.

Salah satu contohnya adalah pembobotan yang digunakan di Kabupaten Bantaeng untuk memutuskan beberapa komoditas unggulan yaitu kopi, jagung marning, dan rumput laut. Pembobotan ini menggunakan 6 indikator yaitu:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b>   Dampak ke masyarakat miskin | <b>4</b>   Keberadaan <i>local champion</i> |
| <b>2</b>   Potensi nilai tambah        | <b>5</b>   Program unggulan daerah          |
| <b>3</b>   Berbasis kawasan            | <b>6</b>   Dampak pada kesehatan            |

Diagram 1. Enam Indikator yang Digunakan dalam Seleksi Komoditas



Selain dalam pemilihan lokasi dan komoditas, **kelompok rentan dipastikan dan dipertimbangan dalam tiap tahapan KP lainnya.**

Sebagai contoh, upaya untuk memastikan integrasi GESI dalam perencanaan intervensi selama penyusunan *grand design* program di Aceh Barat dilakukan dengan:

1

Membuat penjelasan terperinci terkait siapa saja kelompok rentan yang menjadi sasaran: perempuan, masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan/ PKH, masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan, dan penyandang disabilitas.

2

Menetapkan jumlah minimal 30% untuk keterlibatan perempuan di tiap kegiatan.

Namun, di tahap implementasi dan selanjutnya, sebagian kegiatan masih sebatas mempertimbangkan kepentingan dan memastikan manfaat intervensi bagi kelompok rentan. Artinya, belum semua kegiatan melibatkan langsung kelompok tersebut di semua proses intervensi. Studi ini menemukan bahwa tingkat partisipasi di tiap tahapan dan lokasi beragam, dan di sebagian besar lokasi pelibatan dan partisipasi masih terbatas hanya pada kelompok perempuan dan masyarakat miskin dan belum semua kegiatan bisa melibatkan penyandang disabilitas.

Sejauh ini, kegiatan yang sudah melibatkan penyandang disabilitas hingga tahapan implementasi antara lain kegiatan budidaya dan pengolahan rumput laut di Bantaeng dan pengelolaan desa wisata di Lombok Utara, dan pelibatan langsung di tahap perencanaan dilakukan untuk diskusi komoditas dan perencanaan pengembangan teh di Panningaran. Sementara itu, di 4 lokasi lainnya, keterlibatan penyandang disabilitas sebatas memastikan penyandang disabilitas diundang dan mengikuti pelatihan serta menjadi anggota tanpa keterlibatan bermakna lebih lanjut; bahkan, ada yang sama sekali belum melibatkan penyandang disabilitas di semua proses (pelibatannya baru sekadar wacana dan rencana di masa depan). Dengan demikian, bisa dikatakan pelibatan dan partisipasi penyandang disabilitas belum dilakukan di seluruh tahapan implementasi tetapi sudah menjadi komponen penting di tahap perencanaan.

Terlepas dari upaya mengintegrasikan pelibatan dalam tahapan KP, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi kelompok rentan dan penyandang disabilitas di tiap tahapan di wilayah tersebut, di antaranya:

- **Pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan** (termasuk didalamnya pelaksana program/operator KP, pemerintah, *off-takers*, dan pimpinan mitra lokal)  
Meskipun indikator sudah disampaikan dan didorong pencapaiannya, tanpa komitmen dari para pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka akses dan memfasilitasi partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas secara serius, upaya mendorong partisipasi akan berhenti hanya menjadi tindakan normatif dan kurang berdampak.
- **Konstruksi budaya**, yaitu nilai patriarki<sup>8</sup> dan peran gender, norma gender, dan ableisme<sup>9</sup>  
Karena sifatnya yang berbasis komunitas, nilai-nilai ini berpengaruh besar pada partisipasi karena terkait dengan dukungan lingkungan dan lingkaran terdekat seperti pasangan dan keluarga. Sebagian besar kelompok rentan ini tidak memiliki keleluasaan dalam membuat keputusan sendiri tanpa dukungan keluarganya. Dalam upaya mendorong kepemimpinan organisasi di lembaga yang berbasis komunitas, pemahaman kolektif kelompok/masyarakat menjadi aspek krusial.
- **Konsistensi upaya afirmasi** seperti kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan ajakan untuk selalu berpartisipasi secara konsisten  
Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan ajakan agar senantiasa berpartisipasi secara konsisten atau forum tematik untuk kelompok rentan penting.
- **Aksesibilitas**, khususnya bagi penyandang disabilitas
- **Faktor internal kelompok rentan** antara lain: kapasitas dan kepercayaan diri

Terkait kapasitas dan kepercayaan diri, satu catatan penting yang harus diperhatikan adalah kondisi awal kelompok rentan seperti perempuan miskin dan kelompok penyandang disabilitas yang selama ini mengalami eksklusi. Kepercayaan diri yang rendah dan kemampuan yang terbatas, merupakan manifestasi dampak eksklusi yang dialami. Tiap pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaksana program, dan semua pihak yang melakukan upaya pelibatan dan pemberdayaan kelompok rentan harus melihat ini sebagai titik awal dan tidak terburu-buru menyimpulkan ketidakmampuan kelompok rentan untuk berkontribusi dan membuat perubahan seperti yang diharapkan dalam waktu cepat.

---

8 Patriarki adalah perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial yang bisa muncul karena persepsi produktif dan reproduktif terhadap perempuan dan laki-laki. Sumber: <https://katadata.co.id/safrezi/berita/62022e13a3a72/patriarki-adalah-mengutamakan-laki-laki-berikut-ulasannya>

9 Ableisme adalah kecenderungan memandang disabilitas sebagai sebuah ketidaksempurnaan, termasuk mengasosiasikannya dengan penyakit.

## 2.2. TAHAP IMPLEMENTASI

**Pertanyaan Studi 2:** Bagaimana pemetaan peran, kebutuhan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Apakah kondisi tersebut memengaruhi tingkat dan kualitas keterlibatan serta penerimaan manfaat?

**Temuan:** Pemetaan peran perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas didasari beberapa hal seperti potensi atau keterampilan yang sebelumnya sudah melekat dan dimiliki kelompok tersebut berdasarkan kesepakatan dan peran yang dianggap harmonis dengan budaya lokal.

**Kata Kunci:** peran, kebutuhan, peluang dan hambatan.

Pemetaan peran perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas (perempuan dan laki-laki) didasari beberapa hal yaitu: (1) potensi atau keterampilan yang sebelumnya sudah melekat dan dimiliki kelompok tersebut, (2) kesepakatan dan peran yang dianggap harmonis dengan budaya setempat, (3) pembagian peran yang

kadang masih didasarkan pada asumsi dan stereotip karakter yang dilekatkan pada perempuan atau laki-laki (misalnya, perempuan diberi peran yang dianggap menggunakan lebih sedikit tenaga dan memiliki lebih sedikit risiko atau diberi pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan ketelitian karena anggapan bahwa perempuan pasti lebih teliti dan telaten), dan (4) aksesibilitas atau peran yang dapat dijalankan penyandang disabilitas.

***“Tekunilah menganyam untuk menyokong ekonomi keluarga dan menghilangkan suntuk di rumah,” –***

**Pak W, warga Desa Kubu dan suami dari penganyam eceng gondok.**

Berdasarkan aspek tersebut, perempuan banyak mengambil peran di tahapan produksi awal seperti menganyam, memilah, dan mengolah rumput laut, mengeringkan singkong untuk bahan mocaf dan/atau mengolah tepung menjadi produk makanan, dan memetik teh. Di beberapa situasi terkait pelibatan perempuan, pendekatan seperti di atas memudahkan intervensi dan pelibatan kelompok rentan. Namun, di sisi lain, hal ini secara tidak langsung membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran lain yang lebih strategis jika tidak diperkuat/difasilitasi lebih jauh.

Sebagai contoh, perempuan penganyam di Aceh Barat belum bisa naik perannya menjadi bagian dari tim *quality control* yang selama ini hanya dipegang laki-laki. Padahal setelah bertahun-tahun, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, peran ini idealnya bisa mereka ambil. Situasi yang sama juga terjadi di Bantaeng. Tim KP mendorong agar bagian *quality control* divisi rumput laut di BUMDes dipimpin dua perempuan yang dianggap memiliki kapasitas. Ini ternyata belum bisa terealisasi karena adanya keraguan pada kepemimpinan perempuan yang didasari kekhawatiran bahwa perempuan akan memiliki banyak keterbatasan terkait waktu dan fleksibilitas. Hal ini dikaitkan dengan persepsi bahwa perempuan adalah penanggung jawab urusan domestik di keluarga dan tidak memiliki keleluasaan waktu seperti laki-laki.

Peran perempuan sudah terlihat di tiap tahapan, tetapi sebagian besar peran tersebut menyesuaikan dengan peran domestik yang melekat pada perempuan. Ini masih tampak pada pengolahan rumput laut di Koperasi Sipatuo Bantaeng, pengaturan jam produksi atau jam kerja perempuan

dalam pengolahan rumput laut disesuaikan dengan jadwal pekerjaan domestik di rumahnya. Perempuan biasanya melakukan pekerjaan mulai pukul 09.00–12.00, karena pagi dan sore mereka harus menyelesaikan pekerjaan di rumahnya. Hal serupa dialami perajin anyaman eceng gondok di Aceh Barat. Para suami yang awalnya sedikit ragu akhirnya mengizinkan istrinya menjadi perajin anyaman setelah tahu bahwa anyaman bisa dikerjakan di rumah sehingga istri tetap bisa fleksibel (menghasilkan uang tanpa mengganggu rutinitas dan tugas domestik). Suami perajin lain juga mengakui bahwa dukungan diberikan agar perajin ‘betah di rumah’.

Di desa wisata di Lombok Utara, perempuan berperan di kepengurusan Pokdarwis serta UMKM baik sebagai produsen tenun, penjual makanan, atau dengan membuka kafe di lokasi. Penyandang disabilitas mengambil peran di UMKM dan seni pertunjukan (sebagai peniup seruling) yang ada di desa wisata sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Saat ini, sudah ada ruang bagi perempuan untuk mengambil peran sesuai ketertarikannya seperti menjadi pemandu wisata di Desa Senaru yang didukung organisasi perempuan pemandu wisata beranggotakan 70 orang. Peran ini awalnya dianggap tidak cocok dengan perempuan karena mereka harus menemani tamu asing yang kadang berjenis kelamin laki-laki dalam waktu lama dan menjelajah berbagai lokasi sepi dan yang dianggap berisiko, contohnya dalam memandu jelajah Gunung Rinjani. Kelompok perempuan pemandu yang dibentuk dan difasilitasi program lain kemudian melakukan modifikasi jalur wisata menjadi paket jalur keliling yang mudah (*soft tracking*) di desa dan/atau ke sejumlah desa adat lainnya yang memiliki area perkebunan, persawahan, dan air terjun.

Pembagian peran di proses penguatan ekonomi dalam program KP didasarkan pada budaya dan peran gender di komunitas ini berdampak positif dan negatif pada upaya peningkatan partisipasi bermakna dan pemberdayaan perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

**Tabel 4. Dampak Budaya dan Pembagian Peran Gender di Komunitas pada Pemberdayaan Ekonomi**

Dampak ke Penerima Manfaat	
Positif	Negatif
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memudahkan dan membuka peluang perempuan untuk mengambil peran dan berpartisipasi</li> <li>• Meminimalisir penolakan dan hambatan budaya yang berdampak positif pada peningkatan kapasitas serta ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara tidak langsung membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran lain yang lebih strategis jika tidak diperkuat/difasilitasi lebih jauh. Contohnya perempuan penganyam di Aceh Barat yang belum bisa mengambil peran dalam tim <i>quality control</i> yang selama ini hanya dipegang laki-laki. Padahal, setelah bertahun-tahun, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, peran ini idealnya bisa diambil.</li> <li>• Mempersempit kesempatan untuk mendapat penguatan kapasitas. Adanya pemahaman jika ketua UKM atau koperasi harus laki-laki menyebabkan perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas karena sering kali kesempatan ini hanya untuk perwakilan kelompok yang biasanya merupakan ketua kelompok.</li> </ul>

Dalam pemetaan perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya, peran biasanya disesuaikan dengan kondisi individu seperti:

- **Jenis disabilitas dan kondisi penyandang disabilitas termasuk keahlian yang dimilikinya.** Misalnya, dua penyandang disabilitas di Desa Bayan bekerja sebagai perajin souvenir dan pemain seruling untuk pertunjukan seni sebagai bagian aktivitas desa wisata di Lombok Utara.
- **Kondisi lingkungan yang ada yang saat ini memiliki aksesibilitas rendah.** Seorang penyandang disabilitas yang merupakan anggota koperasi di Bantaeng dapat bekerja sebagai nelayan dan terlibat dalam pemasangan bibit rumput laut karena lokasi pembibitan berdekatan dengan rumahnya dan bisa dijangkau terlepas dari kondisi khusus disabilitasnya.

Saat ini, peran yang diberikan kepada penyandang disabilitas masih didasarkan pada kondisi yang ada sebelum intervensi. Di sisi lain, upaya untuk memetakan dan meningkatkan peran sekaligus partisipasi substantif penyandang disabilitas juga sudah dilakukan. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan sudah memiliki data penyandang disabilitas untuk merencanakan pelibatan penyandang disabilitas muda dalam peningkatan kapasitas. Ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas bisa mengambil peran produktif dalam usaha pengolahan teh Paninggaran. Selain itu, rencana Pemkab Bantaeng untuk membangun jalan yang lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas dalam melakukan usaha pembibitan dan pengolahan rumput laut termasuk upaya menjadikan desa wisata Lombok Utara menjadi inklusif.

Terkait dengan pengarusutamaan isu disabilitas dalam pengembangan desa wisata, minimnya pelibatan kelompok penyandang disabilitas sangat disadari dan terpetakan sebagai kelemahan yang ada saat ini. Untuk merespons hal tersebut, Panduan Desa Wisata yang dikembangkan oleh Pemkab Lombok Utara dengan dukungan KOMPAK tahun 2021 telah merumuskan indikator inklusivitas dan keberlanjutan sesuai dengan kategori tingkat perkembangan desa wisata sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

**Tabel 5. Kategori Perkembangan Desa Wisata Berdasarkan Indikator Inklusivitas dan Keberlanjutan<sup>10</sup>**

Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri
Belum memperhatikan keterlibatan kelompok rentan.	Mulai memperhatikan partisipasi dan aksesibilitas kelompok rentan dalam pengembangan dan pengelolaan.	Adanya sistem yang mendukung kesetaraan dan keadilan untuk kelompok rentan, contohnya lewat SOP untuk wisatawan penyandang disabilitas.	Penyelenggaraan sudah inklusif dan dilengkapi sistem sekaligus sarana prasarana yang memadai.
	Memperhatikan pentingnya manajemen krisis kepariwisataan lewat penyediaan kajian risiko bencana, rencana mitigasi, kesiapsiagaan, dan kedaruratan tetapi belum menyelenggarakan simulasi.	Memiliki manajemen krisis kepariwisataan dan melakukan simulasi minimal sekali setahun.	Manajemen krisis diperbarui 6 bulan sekali secara partisipatif dan simulasi dilakukan per 6 bulan sekali.

<sup>10</sup> Hidayat, Andi Wahyu et al. (2021). Buku Panduan Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. KOMPAK. Hal.17.

## PEMETAAN HAMBATAN DAN PELUANG

### Hambatan serta Isu GESI

Berdasarkan berbagai temuan dan situasi di 7 wilayah tersebut di atas, keterlibatan dan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas mengalami sejumlah hambatan yang berpotensi menghalangi proses dan progres peningkatan kualitas partisipasi serta penerimaan manfaat, di antaranya:

**Kapasitas teknis dan peluang peningkatan kapasitas yang terbatas.** Kapasitas ini mencakup kapasitas teknis terkait produksi anyaman dan lainnya, atau kapasitas manajemen dan lainnya yang bisa membuka peluang lebih besar bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengambil peran yang lebih strategis. Peningkatan kapasitas belum dilakukan secara terstruktur oleh pemda yang idealnya menjadi pengampu dan pendamping upaya penguatan ekonomi dalam KP.

**Kesulitan mengakses modal** yang lebih besar karena sebagian besar kelompok rentan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS dan tidak punya modal untuk dijadikan agunan pengajuan pinjaman.

**Aksesibilitas terbatas.** Pemahaman dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar terkait aksesibilitas kurang. Ini mungkin disebabkan oleh adanya pemangku kepentingan atau pihak berwenang yang masih menggunakan *charity-based perspective* dalam melihat urgensi pemenuhan aksesibilitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi.

**Beban ganda bagi perajin dan/atau pegiat perempuan.** Di struktur masyarakat yang masih patriarkis, perempuan lebih mudah mendapat dukungan untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik dan bernilai ekonomi jika berhasil meyakinkan bahwa hal tersebut bisa selaras dengan tugas domestik yang dianggap sebagai kewajiban perempuan. Pekerjaan domestik dianggap kewajiban dan pekerjaan utama perempuan. Perempuan perlu membuktikan bahwa ia mampu menambah penghasilan atau nilai ekonomi yang signifikan sebelum mendapat dukungan untuk berkembang. Meski demikian, tren positif mulai muncul di satu daerah (Bantaeng), yang ditunjukkan dengan adanya beberapa suami yang mulai mau berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan domestik karena istrinya bekerja. Para suami mulai menjadikan hal tersebut sebagai bentuk dukungan untuk istri agar lebih aktif dalam kegiatan perekonomian yang memberi manfaat untuk keluarga.

**Stereotip** terkait pembagian peran dan bias terhadap kepemimpinan perempuan. Mengubah konstruksi sosial terkait ini butuh waktu dan konsistensi. Isu terkait kepemimpinan perempuan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Ini penting karena hanya ada 1 organisasi yang dipimpin perempuan dari 7 lokasi studi, yakni kelompok pengolahan mocaf di Pacitan, itupun karena semua anggotanya perempuan. Sementara itu, di lokasi lain, sebagian besar perempuan diberi posisi seperti sekretaris dan bendahara atau pencatat keuangan. Berikut pemetaan yang dilakukan di lokasi studi.

**Tabel 6. Identifikasi Isu Gender dan Inklusi Sosial untuk Tiap Komoditas**

No	Mitra Lokal dan Kelompok Dampingan	Komoditas	Isu Gender dan Inklusi Sosial
1.	UKM Kubu Raya, Aceh Barat	Anyaman eceng gondok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan perlu ditempatkan di posisi yang lebih strategis (saat ini, baru sebatas penganyam dan pencatat keuangan).</li> <li>Beban ganda</li> <li>Terbatasnya keleluasaan perempuan untuk mengambil peran lain atau meningkatkan kapasitas karena pola kerja berdasar peran gender di masyarakat.</li> <li>Penyandang disabilitas belum terjangkau.</li> </ul>
2.	Koperasi Simatuo dan BUMDes Layar Berkembang, Bantaeng, Sulawesi Selatan	Budidaya dan pengolahan rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan perempuan</li> <li>Pembagian kerja</li> <li>Beban ganda</li> <li>Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terlibat perlu ditingkatkan.</li> </ul>
3.	Koperasi Berdikari Makmur, Pematang	Pemetikan & pengolahan teh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan perempuan</li> <li>Beban ganda</li> <li>Penyandang disabilitas belum terjangkau.</li> </ul>
4.	Pokdarwis Desa Wisata, Lombok Utara	Desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan perempuan</li> <li>Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan</li> <li>Stereotip dalam pembagian peran</li> <li>Beban ganda</li> <li>Pelibatan penyandang disabilitas dan aksesibilitas di lokasi wisata perlu ditingkatkan.</li> </ul>
5.	BUMDes dan UKM	Sabut kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan belum mengambil peran di posisi strategis.</li> <li>Beban ganda</li> </ul>
6.	Pokdarwis Dewi Nadulang, Pematang	Desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan belum mengambil peran di posisi strategis.</li> <li>Beban ganda</li> </ul>
7.	Kelompok Mocaf Bogati, Pacitan.	Tepung mocaf (tepung olahan dari singkong)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses modal terbatas.</li> <li>Belum ada mekanisme pemberdayaan yang terstruktur.</li> </ul>

Bila dilihat sekilas, ada segregasi yang melanggengkan berbagai stigma terkait peran gender, seperti beban ganda pada perempuan yakni agar mereka bekerja dan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Pembagian peran yang tampak seperti segregasi peran laki-laki dan perempuan di sebagian besar lokasi bukanlah segregasi yang disengaja, alih-alih disebabkan pendekatan KP yang selama ini dilakukan belum didesain agar dapat menggeser konstruksi sosial dan pembagian peran yang dipengaruhi nilai patriarki dalam masyarakat. Mengingat pendekatan ini berbasis komunitas, konstruksi sosial lokasi intervensi jadi hal yang berpengaruh besar pada proses dan hasil akhir intervensi. Namun, jika dilihat lebih dalam, ini merupakan proses yang perlu dilalui sebelum tujuan akhir untuk menguatkan daya tawar dan memberdayakan kelompok rentan khususnya perempuan bisa tercapai.

Meski demikian, secara tidak langsung, di akhir intervensi ada sejumlah perubahan pada kesempatan dan kemandirian perempuan yang berpotensi mendorong dan/atau menjadi permulaan perubahan konstruksi sosial dalam jangka panjang. Realitas ini ditemukan di Trenggalek pada intervensi sabut kelapa. Dalam wawancara, ada beberapa suami yang sejak istrinya bekerja dan memiliki pendapatan dari pengolahan sabut kelapa mulai membantu melakukan pekerjaan domestik di rumah. Mereka merasa perlu membantu karena istrinya juga bekerja dan menganggap bantuannya adalah bentuk dukungan untuk istrinya yang bekerja.

Temuan lain dari kajian ini adalah, meski dalam implementasinya pendekatan KP masih mengikuti nilai dan kultur yang cenderung patriarkis, penguatan ekonomi khususnya bagi kelompok rentan perempuan ini memberi peluang besar untuk peningkatan daya tawar perempuan terkait pola relasi yang sering kali timpang baik dalam keluarga maupun masyarakat.

### Studi Kasus 1

#### **Penguatan Ekonomi Perempuan dan Pembagian Peran dalam Keluarga di Kelompok Pengolahan Sabut Kelapa, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Trenggalek, Jawa Timur**

Intervensi penguatan ekonomi melalui pendekatan KP terbukti memberikan manfaat ekonomi nyata bagi perempuan, di antaranya perempuan pengolah sabut kelapa. Kesempatan yang dibuka dan peningkatan kapasitas sekaligus dukungan mulai dari permodalan oleh desa dan alat produksi oleh pemda sudah membuahkan hasil. Perubahan kondisi ekonomi perempuan juga telah menambah nilai kontribusi ekonomi mereka untuk keluarga.

Di lokasi lain kajian, perubahan terjadi bersamaan dengan pemenuhan beban ganda karena masyarakat masih melihat perempuan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan domestik meskipun sudah bekerja. Situasi berbeda ditemukan di Trenggalek. Relasi beberapa keluarga mulai bergeser dengan adanya pembagian peran secara sadar terkait tanggung jawab pekerjaan domestik antara suami dan istri. Beberapa suami yang istrinya bekerja memberikan dukungan dengan ikut serta mengerjakan tugas domestik di rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi berpengaruh pada pola relasi yang timpang atau tidak setara dalam keluarga.

## Peluang

Selain berbagai hambatan yang dihadapi dan muncul dalam upaya pelibatan kelompok rentan, ada beragam peluang yang mendukung akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi kelompok rentan dalam penguatan ekonomi melalui pendekatan KP, di antaranya:

**Peningkatan kesadaran akan pentingnya potensi dan pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas di antara para pemangku kepentingan.** Kesadaran ini sudah terbentuk dan tampak di semua lokasi kajian. Kesadaran ini mencakup pemahaman terhadap manfaat langsung yang diterima kelompok rentan dan perkembangan ekonomi secara umum. Meskipun demikian, pemda masih perlu memperkuat diri dengan kapasitas teknis untuk memastikan pelibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas lebih bermakna dan sistematis.

**Pelibatan dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas aktivitas produksi dan berbagai upaya ekonomi,** pemerintah dapat menjadi penghubung dan memfasilitasi kolaborasi ini. Peluang ini tampak dalam pengolahan komoditas sabut kelapa di Trenggalek, Jawa Timur; pengolahan teh Paninggaran di Pekalongan, Jawa Tengah; dan budidaya sekaligus pengolahan rumput laut di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

**Peningkatan kemitraan dengan universitas yang bersifat mutual.** Di satu sisi, universitas butuh laboratorium untuk pengembangan mahasiswa dan programnya, di sisi lain masyarakat serta kelompok rentan mendapatkan manfaat lewat peningkatan kapasitas serta pengenalan teknologi pendukung sederhana. Peluang ini muncul untuk komoditas eceng gondok di Aceh Barat, Aceh.

**Peningkatan pengakuan kepemimpinan perempuan.** Peran perempuan dalam pengelolaan usaha sudah diakui oleh anggota koperasi dan pemangku kepentingan lainnya, meski upaya untuk menjadi pemimpin resmi organisasi masih terhambat situasi politik di desa (koperasi teh di Paninggaran).

**Peningkatan pemetaan dan pendataan penyandang disabilitas.** Pemetaan sudah dilakukan di Paninggaran. Data adalah modalitas awal untuk pelibatan penyandang disabilitas, termasuk pemetaan potensinya. Adanya pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan pemda merupakan langkah awal yang berpotensi meningkatkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pendekatan keperantaraan pasar ini.

**Penguatan ekonomi perempuan.** Ini secara khusus akan memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan dan mendorong terwujudnya relasi yang lebih adil dalam keluarga. Temuan terkait berbagai isu gender yang muncul salah satunya mencakup perubahan di salah satu lokasi yaitu Trenggalek. Meskipun selain peningkatan ekonomi perempuan, banyak aspek lain yang berperan dalam proses perubahan relasi ini.

**Pemanfaatan musyawarah khusus kelompok rentan** sebagai kanal potensial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi dan KP. Meski belum semua aspek bisa bersinergi, kanal ini adalah potensi yang bisa dikembangkan sebagai bentuk sinergi intervensi penguatan kelompok rentan di intervensi lain. Dari 3 lokasi dengan kanal musyawarah khusus, Trenggalek berhasil memfasilitasi perempuan dan kelompok rentan untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan terkait dukungan yang diperlukan untuk industri pengolahan sabut kelapa.

## Praktik Baik terkait Kemitraan dengan *Off-takers*

### Peran PT CKC dalam Lahirnya Produk Premium Parama Tea oleh Koperasi Berdikasi Makmur

PT Citra Kencana Cemerlang (CKC) adalah produsen teh premium bermerek Havilla Tea. PT CKC adalah *off-taker* yang difasilitasi KP dalam bermitra dengan Koperasi Berdikari Makmur di Paningaran, Pekalongan. Koperasi ini diharapkan menjadi salah satu pemasok teh premium untuk PT CKC. Namun, setelah penilaian, produk tehnya belum memenuhi standar teh premium yang diharapkan. Awalnya, PT CKC hanya diminta berperan sebagai pemberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas teh, mengenal pasar potensial bagi koperasi, dan membeli olahan teh koperasi. Namun, setelah berinteraksi langsung, ternyata produk koperasi belum bisa dibeli.

PT CKC lalu menawarkan diri untuk mendampingi koperasi dalam pengembangan produk dan *rebranding*. Tindakan PT CKC ini didasari peluang yang tampak setelah berinteraksi dengan koperasi, pemetik teh, dan petani teh dan teridentifikasinya situasi yang kurang menguntungkan, seperti terancamnya regenerasi pemetik teh akibat rendahnya penghasilannya yang mendorong kaum muda atau anak-anak pemetik teh memilih bekerja ke kota. Selain itu, ada fakta menarik, yakni bahwa perempuan adalah ujung tombak dari industri teh ini. *Rebranding* dilakukan dengan mengangkat dan mengakui peran perempuan pemetik teh tradisional pada cover depan produk, dan menampilkan perempuan modern di cover belakang produk (yang merupakan target pasar). Filosofi di balik *rebranding* ini adalah pembagian produk dari perempuan pemetik teh ke perempuan modern dan milenial, semacam visualisasi konsep *woman support woman*. PT CKC memberikan pendampingan hingga koperasi bisa memproduksi teh premiumnya sendiri dan masih memberikan pendampingan *business matching* hingga kini.



Kemasan Lama



Kemasan Baru

## Dampak COVID-19

Intervensi penguatan ekonomi lokal melalui KP ini dimulai sejak 2018. Saat pandemi COVID-19 terjadi di awal 2020, beberapa upaya yang harusnya dilaksanakan dan capaian besarnya bisa diwujudkan terhenti. Contoh upaya yang terhenti adalah transaksi yang berhasil dilakukan setelah pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi rumput laut di Bantaeng dilakukan. Setelah berhasil bertransaksi dan mengirim 1 kontainer rumput laut ke salah satu *off-taker*, transaksi terhenti akibat COVID-19 dan koperasi mengalami kesulitan permodalan karena dukungan dari desa dialihkan untuk penanganan COVID-19. Lebih jauh, saat ingin mengajukan KUR, ada kendala terkait agunan karena mayoritas anggota koperasi tercakup dalam DTKS dan tidak memiliki aset untuk agunan.

Contoh lainnya terkait *rebranding*. Setelah koperasi pengolah teh di Paninggaran menyelesaikan riset dan desain kemasan teh Parama untuk menasar pasar premium, launching produk tidak dapat dilakukan akibat pandemi. Produk tidak sempat dikenalkan dan dihubungkan ke pasar potensial. Namun, saat laporan kajian ini ditulis, upaya promosi ke pasar premium sudah dilakukan dan memberikan hasil: teh Paninggaran mulai digunakan sebagai salah satu menu teh unggulan di salah satu hotel ternama di Jakarta.

Selain dampak negatif, pandemi COVID-19 juga memunculkan beberapa inovasi sebagai upaya menyalahi situasi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Berikut adalah dampak COVID-19 pada komoditas di lokasi kajian.

Tabel 7. Identifikasi Dampak COVID-19 terhadap Komoditas

Dampak COVID-19 terhadap Komoditas	
Positif	Negatif
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan melalui e-commerce naik (produk anyaman UKM Kubu Raya). Setelah beberapa <i>off-takers</i> besar seperti pembeli di Yogyakarta menghentikan transaksi karena pandemi, UKM beralih ke distributor personal yang membuka penjualan melalui <i>e-commerce</i>. Ternyata, penjualan lancar dan bahkan meningkat.</li> <li>• Inovasi berupa paket jelajah virtual desa wisata berjalan dan mendapat penghargaan (Pokdarwis Dewi Nadulang Pemalang - BCA Awards).</li> <li>• Ada fokus untuk meningkatkan kualitas produk premium (teh Paninggaran).</li> <li>• Ada fokus ke pasar lokal (penjual tenun di desa wisata Lombok Utara dan olahan rumput laut di Bantaeng).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan melalui <i>off-takers</i> turun (untuk anyaman eceng gondok, produk sabut kelapa, teh, dan rumput laut).</li> <li>• Aktivitas ekonomi terhenti sama sekali (produksi dan penjualan tepung mocaf di Pacitan berhenti dan desa wisata tepi pengujung).</li> <li>• Penjualan turun drastis (bagi UMKM desa wisata, khususnya yang membuka kafe, menjual makanan, dan mengadakan hiburan).</li> <li>• Kesulitan modal karena penjualan turun dan hilangnya bantuan permodalan dari desa dan dukungan <i>off-takers</i> (untuk pengolahan rumput laut, teh, dan anyaman eceng gondok).</li> </ul>

### 2.3. POLA DAN RELASI KELEMBAGAAN

**Pertanyaan Studi 3 : Bagaimana pola dan relasi berbagai lembaga di desa memengaruhi ketersediaan dukungan dan keberlanjutan program UMKM dalam model keperantaraan pasar yang diimplementasikan oleh KOMPAK (khususnya dalam aspek keterlibatan kelompok rentan dan manfaatnya bagi mereka)?**

**Temuan:** Di tiap intervensi KP, kolaborasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan berdampak signifikan terhadap kedalaman dan hasil intervensi.

**Kata Kunci:** Pola relasi/kelembagaan, keberlanjutan.

Relasi dan peran yang dijalankan pemangku kepentingan di tiap daerah beragam. Beberapa faktornya antara lain pemahaman tentang urgensi intervensi dan kemanfaatannya bagi masyarakat termasuk kelompok rentan sekaligus komitmen dari institusi atau lembaga terkait. Misalnya, beberapa pemkab mengambil peran dengan memperkuat intervensi melalui kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sekaligus memastikan bahwa kelompok rentan yang termasuk dalam data DTKS menjadi penerima manfaat dan anggota aktif dari usaha berbasis komunitas. Pemda juga terlibat dalam proses pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung.

Peran dalam pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas, baik terkait produksi, pengemasan, penjualan, serta promosi produk dan jasa, sebagai pembeli dijalankan oleh *off-takers* yang memang memiliki pengetahuan di sektor terkait. Untuk Aceh Barat dan Lombok Utara, peran peningkatan kapasitas ini juga dijalankan perguruan tinggi. Keduanya berkolaborasi dengan Pemda dalam pelaksanaannya.

**Diagram 2. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pendekatan KP**



Di beberapa wilayah, pembagian peran dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan berjalan cukup baik. Contohnya tampak dalam kolaborasi dan pembagian peran antara pemda Bantaeng dan *off-takers* dalam pengadaan fasilitas penunjang budidaya rumput laut berupa kendaraan operasional dan fasilitas lain yang terbukti meningkatkan efektivitas produksi dan mempercepat penerimaan manfaat oleh petani rumput laut yang juga merupakan kelompok rentan. Kolaborasi dan pembagian peran yang berjalan harmonis berdampak positif pada upaya mengurangi kesenjangan dan mengatasi tantangan yang ada, yang berujung pada akselerasi peningkatan ekonomi kelompok rentan. Ketidاكلancaran upaya ini akan berpengaruh pada keberlanjutan pemberdayaan ekonomi dalam program keperantaraan pasar. Ini tampak dalam situasi yang dialami kelompok pengolah mocaf Bogasari di Kabupaten Pacitan, gagalnya kolaborasi antara pemdes, BUMDes, dan kelompok pengolah mocaf membuat permasalahan ketersediaan bahan baku terus terjadi.

**Tabel 8. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Bentuk Dukungannya**

Lembaga/Organisasi		Bentuk Dukungan	
1	<b>UKM Kubu Kreatif, Aceh</b>	Dukungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility/CSR</i> ), Bank Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelian mesin finishing dan pelatihan perajin</li> </ul>
		Forum CSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan wadah koordinasi untuk sejumlah instansi terkait serta pelaku usaha skala besar untuk mendukung program pembangunan, termasuk pengembangan UKM di Aceh Barat, melalui program keperantaraan pasar KOMPAK.</li> <li>Upaya untuk memastikan dan memprioritaskan keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal.</li> </ul>
		Pemkab Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian biaya operasional dan pendampingan.</li> </ul>
		Universitas Syiah Kuala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan <i>solar dryer</i> atau alat pengering eceng gondok.</li> <li>Penelitian skripsi oleh 3 mahasiswa terkait sistem otomatis ventilasi <i>solar dryer</i>. Riset ini dilakukan guna mendukung UKM dalam mengolah bahan baku siap anyam dengan tingkat kekeringan yang tepat.</li> </ul>
2	<b>Koperasi Pengolah Rumput Laut Sipatuwo, Bantaeng</b>	<i>Off-taker</i> : CV Ocean Fresh dari Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertindak sebagai pembeli.</li> <li>Bertindak sebagai fasilitator lokakarya pengembangan kapasitas KU, misalnya untuk pelatihan pembibitan dan pembinaan cara menggunakan mesin pengolah rumput laut menjadi bahan baku kering yang dinamakan <i>Alkali Treated Cottonii (ATC)</i>.</li> </ul>

		Pemkab Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan fasilitas lokasi budidaya rumput laut dengan kapasitas sampai 1.000 bentangan dan pembudidaya lokal.</li> <li>• Ketersediaan untuk mengadakan fasilitas budidaya rumput laut dan penandatanganan pendiriannya lewat MoU, dengan catatan <i>off-taker</i> mengadakan tali dan perahu.</li> </ul>
		BUMDes Layar Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan rumput laut kering dari petani menjadi ATC.</li> <li>• Penyelenggaraan pengemasan dan transaksi dengan <i>off-taker</i> (CV Ocean Fresh).</li> </ul>
		Kementerian Desa (Kemendes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bantuan alat pengolahan rumput laut menjadi bahan baku kering ATC.</li> <li>• Pengadaan bantuan alat transportasi untuk menjemput rumput laut dari warga, yaitu 2 buah motor beroda tiga. Kendaraan digunakan oleh BUMDes Layar Berkembang untuk mengangkut rumput laut yang sudah dijemur oleh warga ke gedung pengolahan sehingga meringankan biaya transportasi petani rumput laut.</li> </ul>
3	<b>Desa Wisata, Lombok Utara</b>	Pokdarwis Desa Bayan, Senaru, dan Genggulang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan koordinasi pengelolaan desa wisata.</li> <li>• Pembagian peran dengan BUMDes dalam mengelola desa wisata dan sektor pendukungnya seperti UMKM yang berjualan di desa wisata.</li> </ul>
		Pemda Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi atraksi di destinasi wisata, pengadaan fasilitas kantor Pokdarwis dan BUMDes, serta pengadaan peralatan produksi untuk UMK lewat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.</li> </ul>
		Pemdes (3 Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa 2021 sebesar Rp718 juta untuk ketiga desa dan Rp1 miliar untuk tahun anggaran 2022.</li> </ul>

		<i>Off-taker</i> : Caventer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan penilaian potensi pariwisata di tiap desa.</li> <li>• Pelaksanaan pelatihan untuk Pokdarwis di Desa Geggelang dan Desa Senaru terkait pembuatan beragam paket wisata yang menarik bagi wisatawan, termasuk pelatihan terkait <i>service excellence</i>.</li> <li>• Pendampingan untuk Pokdarwis dalam melakukan promosi lewat media sosial serta mengenalkan Pokdarwis ke jaringan tour operator guna memperluas pemasaran (AKATIGA, 2021). Dalam pelatihan ini, jumlah partisipan dari kelompok rentan yang terlibat (perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas) sudah ditetapkan.</li> <li>• Untuk Desa Bayan, <i>off-taker</i> melakukan pendampingan untuk Pokdarwis dalam membuat desa wisata virtual, yang menjadi bagian dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> </ul>
		STP Mataram (kampus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan KKN Tematik yang mencakup sejumlah pelatihan untuk Pokdarwis dan masyarakat, di antaranya terkait: pengelolaan daya tarik wisata, pemasaran pariwisata, dan bahasa asing.</li> <li>• Pelaksanaan pelatihan pembuatan beragam paket wisata dan pengadaan bantuan promosi melalui media sosial.</li> </ul>
5	<b>Desa Wisata (Dewi) Nadulang, Pemalang</b>	<i>Off-taker</i> : Caventer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan untuk Pokdarwis dalam menyusun kegiatan di tiap desa wisata.</li> </ul>
6	<b>BUMDesma</b>	<i>Off-taker</i> untuk sentra pengolahan sabut kelapa di Banjar dan Panggul, Kabupaten Trenggalek	<p>Peningkatan kapasitas bagi BUMDesma lewat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis terkait pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan seperti sapu, vas bunga, dan lainnya.</li> <li>• Pelatihan nonteknis seperti terkait tata kelola BUMDesma.</li> </ul>

		Pemkab Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari desa sebagai modal untuk membuat mesin pengolahan sabut kelapa (mesin dibuat masyarakat lokal dengan menggunakan mesin UKM lokal sebagai contoh) dan mendirikan pabrik sabut kelapa.</li> </ul>
		Pemdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan 6 mesin penunjang, gudang, listrik, dan akses jalan menuju pabrik bersama pemerintah kabupaten.</li> </ul>
		UKM lokal dan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengolahan limbah sabut kelapa.</li> </ul>
		Petani kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan limbah sabut kelapa.</li> </ul>
7	<b>Pengolah mocaf di Pacitan, Jawa Timur</b>	Pemkab Pacitan: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan, dan Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan pelatihan terkait pengadaan bahan baku dan produksi.</li> </ul>
		BUMDes Kebon Agung, Pemerintah Kecamatan Kebon Agung, dan Pemdes Ketro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kemasan.</li> <li>• Pelatihan pemasaran secara daring.</li> </ul>

Kolaborasi antarpemangku kepentingan ini difasilitasi oleh Konsultan Bisnis Lokal<sup>12</sup>/Fasilitator KP. Fasilitator KP ini mengawal implementasi intervensi sejak tahap awal hingga evaluasi. Mengingat perannya yang sangat strategis, Fasilitator KP harus memahami pendekatan KP dan komoditas ekonomi potensial sekaligus memiliki perspektif, pemahaman, dan pengalaman terkait isu gender dan inklusi sosial yang kuat. Konsultan Bisnis Lokal/Fasilitator KP sebagai bagian dari Operator KP yang bertugas memfasilitasi implementasi KP di daerah berperan strategis dalam pengarusutamaan GESI di keseluruhan tahapan.

### Peran Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Kelembagaan Usaha

Situasi yang beragam terkait pembagian peran terutama dalam kelembagaan atau pengelolaan organisasi dalam KP tampak di 7 lokasi studi. Sesuai dengan temuan terkait pembagian peran untuk pertanyaan studi ke-2, mewujudkan kepemimpinan perempuan masih menjadi tantangan. Dari 7 lokasi, hanya 1 organisasi yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin, yaitu pada kelompok produksi mocaf di Pacitan. Hal ini pun dikarenakan semua anggotanya perempuan. Di Koperasi Kuburaya di Aceh Barat, meski mayoritas anggota dan perajin adalah perempuan, posisi pemimpin termasuk posisi strategis sebagai pelaksana *quality control* dipegang oleh laki-laki. Selibhnya, selain pada kepengurusan inti, perempuan ditugaskan sebagai sekretaris dan bendahara. Struktur ini dibangun atas dasar pemahaman dan kultur masyarakat yang masih meyakini bahwa pemimpin komunitas dan organisasi lebih baik laki-laki. Perempuan sudah diperbolehkan mengambil peran lain, tetapi dengan pembatasan karena mereka memikul beban ganda dan ada beragam stereotip tentang peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga.

Pelibatan penyandang disabilitas juga masih minim. Meskipun 4 lokasi sudah melibatkan penyandang disabilitas laki-laki sebagai anggota dan turut berpartisipasi sesuai dengan kompetensinya, upaya penguatan pelibatan yang lebih serius belum tampak, seperti di kebun teh Paninggaran. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan mengundang penyandang disabilitas untuk mendapat peningkatan kapasitas. Namun, tidak ada upaya lanjutan yang untuk mengubah keadaan dan menghilangkan hambatan kepercayaan diri dan kurangnya kemampuan yang memang timbul akibat eksklusi penyandang disabilitas selama ini. Hampir semua penyandang disabilitas yang terlibat adalah laki-laki. Pelibatan perempuan penyandang disabilitas dalam proses ini belum tampak.

**Tabel 9. Peta Pelibatan Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Kelembagaan**

No.	Organisasi/ Lembaga	Laki-laki		Perempuan	
		Bukan penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas	Bukan penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas
1	UKM Kubu Kreatif, Aceh Barat	Menjadi Ketua	Tidak ada	Menjadi anggota koperasi, pengolah bahan baku, dan penganyam	Tidak ada
2	Koperasi Sipatuo, Bantaeng	Ketua Koperasi	Petani rumput laut	Pengolah rumput laut	Tidak ada
3	Pokdarwis Desa Wisata, Lombok Utara	Ketua Pokdarwis	Pemain seruling (atraksi Pariwisata)	Sekretaris, bendahara, dan anggota Pokdarwis	Tidak ada
4	Koperasi Berdikari Makmur, Paninggaran	Ketua koperasi	Petani teh (2 orang penyandang disabilitas fisik, 1 orang memiliki keterbatasan komunikasi, dan 1 orang penderita katarak)	Anggota koperasi dan pemetik teh	Tidak ada
5	Dewi Nadulang, Pernalang	Ketua Pokdarwis	Perajin anyaman bambu untuk dijual di desa wisata (1 orang)	Pengurus Pokdarwis bidang administrasi/ pembukuan, partisipan aktivitas pariwisata berdasarkan ketertarikan	Tidak ada
6	BUMDesma Banjar dan Panggul, Kabupaten Trenggalek	Ketua BUMDesma dan pemilik UMKM	Tidak ada	Perajin sabut kelapa	Tidak ada
7	Kelompok mocaif Boga Lestari, Pacitan		Tidak ada	Ketua kelompok, anggota kelompok	Tidak ada

12 Konsultan Bisnis Lokal, yang secara singkat disebut 'Konsultan' dalam dokumen ini, adalah tenaga ahli di tingkat daerah yang bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan keperantaraan dengan menjalankan tiap langkah dalam proses keperantaraan pasar. (Bappenas. (2021). Panduan Keperantaraan Pasar. Hal. 11.)

Di beberapa wilayah, pembagian peran dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan berjalan cukup baik. Misalnya, di antara pemda Bantaeng dan *off-takers* dalam penyediaan fasilitas penunjang budidaya rumput laut yakni kendaraan operasional dan fasilitas lain yang terbukti meningkatkan efektivitas produksi dan mempercepat penerimaan manfaat oleh petani rumput laut yang juga merupakan kelompok rentan.

Kolaborasi dan pembagian peran yang berjalan harmonis akan berdampak positif pada upaya mengurangi kesenjangan dan tantangan yang ada, yang nantinya berujung pada akselerasi peningkatan ekonomi kelompok rentan. Ketidاكلancaran upaya ini akan berpengaruh pada keberlanjutan pemberdayaan ekonomi dalam program keperantaraan pasar. Situasi semacam ini terjadi pada kelompok mocaq Bogasari Kabupaten Pacitan. Gagalnya kolaborasi antara pemdes, BUMDes, dan kelompok mocaq dalam menjalankan upaya ini membuat permasalahan pasokan bahan baku terus terjadi.

## 2.4. TAHAP EVALUASI

**Pertanyaan Kajian 4: Apa pembelajaran penting yang didapatkan dari implementasi keperantaraan pasar dalam kaitannya dengan upaya mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, baik secara umum untuk semua kelompok rentan (termasuk kelompok yang diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS), dan secara khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin?**

**Temuan:** Pengarusutamaan GESI di tiap tahapan proses pendekatan KP mempunyai intensitas dan perkembangan yang beragam. Ini dipengaruhi oleh peluang usaha, peran, dan tingkat pemahaman para aktor, pemetaan potensi, dan keberadaan *local champion*, sekaligus kolaborasi di antara pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:** Pembelajaran

Beberapa pembelajaran penting yang menentukan tingkat kesetaraan dan inklusi sosial yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut.

1

**Isu dan pendekatan GESI perlu diintegrasikan sejak perencanaan, termasuk di tahap pemetaan peluang bisnis dan aktornya.**

Pemetaan aktor ini perlu memetakan pihak sekaligus peran dan kewenangannya dan pemahaman sekaligus komitmen aktor tersebut terkait GESI. Lebih jauh, pemetaan juga harus mencakup potensi dari penerima manfaat yang bisa menjadi *local champion*. Keberadaan *local champion* dapat memberikan bukti hidup atau *living evidence* akan perubahan positif dan menjadi motivasi bagi anggota atau penerima manfaat lainnya.

2

**Anggota masyarakat perlu didorong untuk menjadi *local champion*.** *Local champion* memberikan bukti hidup atau *living evidence* akan perubahan positif dan menjadi motivasi bagi anggota atau penerima manfaat lainnya. Hal ini terlihat cukup menonjol pada UKM Kubu Kreatif di Aceh Barat. Perubahan kondisi ekonomi ketua UKM dan sejumlah perajin anyaman menginspirasi perempuan lain untuk bergabung dan mulai konsisten menekuni usaha anyaman eceng gondok.

3

**Kolaborasi di antara para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan**, yaitu di antara pemkab, pemdes, *off-takers*, akademisi, dan pihak swasta lain lewat dukungan CSR-nya, dan, yang terpenting, masyarakat. Contoh kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta yang menjadi *off-taker* tampak di penguatan koperasi pengolahan teh di Paninggaran dan pengolahan rumput laut di Bantaeng serta di Kabupaten Trenggalek. Sektor swasta dan pemerintah, baik pemkab dan pemdes, berkolaborasi dalam memberikan peningkatan kapasitas, sarana pendukung usaha, dan tambahan modal. Sedangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang membawa dampak signifikan tampak di kerja sama yang terjadi di Aceh Barat dan pengembangan desa wisata di Lombok Utara. Contoh lain yang menunjukkan sebaliknya, terjadi di Pacitan. Kurang lancarnya kolaborasi antara KU dan pemdes terus-menerus menyulitkan perolehan bahan baku dan terhambatnya produksi, distribusi, serta penjualan tepung mocaf.

4

**Keberlanjutan perlu diupayakan**. Ini masih merupakan catatan di berbagai intervensi KP di 7 wilayah. Mengupayakan keberlanjutan menjadi tantangan serius, apalagi setelah pandemi COVID 19 melanda dan membuat proses bisnis macet, serta menimbulkan berbagai akibat lain seperti kesimpangsiuran keberlanjutan dukungan dari pemda dan hal mendasar seperti bahan utama industri sebagaimana yang dialami pengolah mocaf di Pacitan.

5

**Pemahaman tentang isu gender dan disabilitas perlu diseragamkan dan ditingkatkan** di antara pemangku kepentingan kunci seperti pemerintah, pemilik UKM, serta mitra. Ini penting untuk mengakselerasi upaya mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan responsif gender. Selain itu, hambatan yang berasal dari masyarakat seperti budaya patriarkis juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi intervensi penguatan ekonomi kelompok rentan.

## 2.5. INDIKATOR

**Pertanyaan Studi 5: Indikator apa saja (kuantitatif dan kualitatif) yang dapat secara sensitif dan tepat guna mengukur tingkat keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sekaligus manfaatnya bagi kelompok tersebut?**

**Temuan:** Saat ini, indikator yang digunakan masih merujuk pada indikator KOMPAK dan pencatatan perkembangannya masih terbatas dan belum sistematis.

**Kata Kunci:** Indikator capaian

Indikator yang sejauh ini digunakan dalam proses pemantauan untuk mengukur partisipasi dan kemanfaatan program bagi kelompok rentan masih merujuk pada indikator yang dibuat KOMPAK, yaitu:

- 1 | Persentase keterlibatan/partisipasi
- 2 | Bentuk keterlibatan
- 3 | Pihak yang menjadi penerima manfaat
- 4 | Jenis manfaat yang diberikan.

Jenis manfaat yang dimaksud antara lain kesempatan penguatan kapasitas, peningkatan kapasitas aktual, manfaat ekonomi, dan perubahan positif lain yang merupakan hasil dari proses intervensi (mis. perubahan pendapatan ibu-ibu petani rumput laut atau peningkatan penghasilan pemetik teh perempuan di Paninggaran setelah ada perbaikan kualitas hasil petikan teh dan perubahan harga beli teh).

Berikut adalah sejumlah manfaat intervensi langsung yang teridentifikasi:

1. Peningkatan pendapatan kelompok, baik pemilik atau anggota usaha kecil dan kelompok rentan seperti perempuan:
  - a. **UKM Kubu Raya – Aceh Barat:** Ibu rumah tangga yang awalnya tidak punya penghasilan menjadi penganyam dan kini mendapat penghasilan mulai Rp1-2 juta per bulan.
  - b. **Koperasi Teh Berdikari Makmur – Paninggaran, Pekalongan:** Pemetik teh mengalami peningkatan penghasilan. Harga pucuk teh yang semula Rp900/kg menjadi Rp2.200/kg dan pucuk teh premium dihargai Rp3.500–5.000/kg.
  - c. **Desa Wisata – Lombok Utara:** Pemandu perempuan yang merupakan ibu rumah tangga yang awalnya membantu suami bertani tanpa mendapat upah kini menjadi pemandu wisata dan memiliki pendapatan sebesar Rp250.000–Rp300.000/hari.
  - d. **Koperasi Pengolahan Rumput Laut Simatuo – Bantaeng:** Perempuan yang dulunya ibu rumah tangga tanpa penghasilan kini bekerja pukul 09.00–12.00 dengan pendapatan Rp30.000 sampai Rp50.000.
  - e. **UKM Sabut Kelapa – Trenggalek:** Perempuan yang semula ibu rumah tangga tanpa penghasilan kini menjadi pengolah dan penganyam sabut kelapa dan mendapat Rp40.000/hari atau Rp1.200.000/bulan. Pendapatan mereka meningkat 2 kali lipat bila menggunakan mesin produksi, yakni antara Rp70.000–Rp80.000/hari.

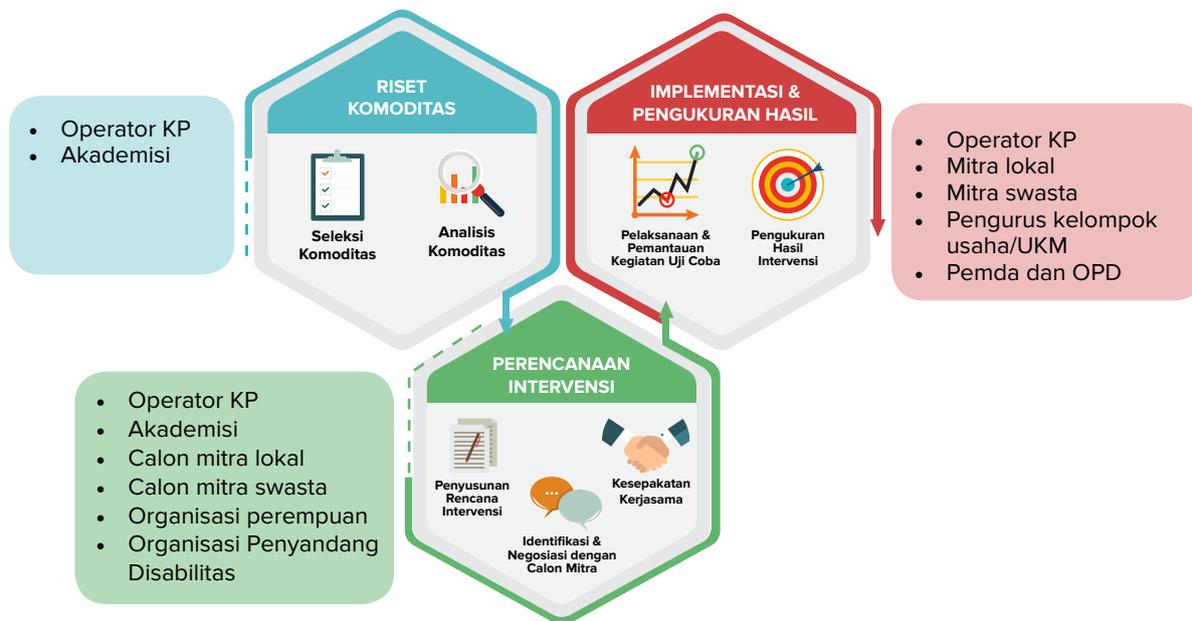
2. Peningkatan kapasitas: (1) kapasitas teknis produksi seperti kemampuan memetik teh lebih baik sehingga teh premium dapat dihasilkan, jenis kerajinan anyaman eceng gondok menjadi lebih beragam, kemampuan budidaya dan pengolahan rumput laut jadi lebih baik, serta keterampilan mengolah sabut kelapa menjadi lebih baik. (2) Kemampuan manajerial dan pemasaran: pembukuan dan pencatatan produksi dan keuangan memenuhi standar perbankan, rebranding dijalankan, dan pengemasan produk menjadi lebih baik, dan manajemen organisasi (khususnya BUMDes, Pokdarwis, dan koperasi) menjadi lebih baik.
3. Perluasan jaringan: anggota masyarakat dapat terhubung dan berjejaring dengan berbagai pihak yang bisa dan berpotensi mendukung usahanya seperti jaringan pembeli atau pembeli potensial (*off-takers*), pemkab, pemdes, dan pemerintah pusat/pempus, serta pihak swasta lain seperti bank dan universitas.
4. Peningkatan kualitas produk dan jangkauan penjualan.
5. Peningkatan kepercayaan bank. Ini tampak di UKM Kubu Raya. Sebelum bergabung dengan program KP, KUR hanya ditawarkan sebesar Rp50 juta. Kini, bank menawarkan modal hingga Rp100 juta.

Selain manfaat langsung, beberapa manfaat tidak langsung juga dipetakan di beberapa lokasi intervensi KP. Manfaat tersebut di antaranya:

- a. **Dampak pada lingkungan** yakni terselenggaranya pencegahan banjir agar eceng gondok untuk bahan baku kerajinan di Aceh Barat terjaga dan pengolahan limbah sabut kelapa di Trenggalek.
- b. **Ketersediaan air terjaga** untuk 6 desa di Panningaran karena area perkebunan teh turut berkontribusi dalam menjaga debit air.
- c. **Peningkatan kesempatan kerja di desa wisata Lombok Utara** turut menurunkan risiko tindak kriminal akibat keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya angka putus sekolah.

## 2.6. PERANAN MITRA DALAM IMPLEMENTASI GESI DALAM TAHAPAN KP DI DAERAH

Setelah mengetahui pentingnya aspek GESI dalam tiap tahapan KP, penekanan terkait penanggung jawab implementasi dan penerapan aspek GESI ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Adapun hal ini dirangkum dalam bagan berikut.



Pada dasarnya, mandat untuk melaksanakan pengarusutamaan GESI dalam KP diemban penanggung jawab dan pelaksana KP sesuai dengan regulasi terkait dan rumusan dalam panduan nasional KP dan dibahas dalam pelatihan untuk Kelompok Kerja di wilayah kajian. Tugas tambahannya hanya koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) atau OPD pengampu untuk mengawal isu gender dan inklusi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pembagian peran di antara peran strategis dalam perumusan kebijakan dan strategi besar serta indikator capaian yang diampu oleh pempus, dengan peran teknis terkait pelaksanaan KP diemban pemda di bawah koordinasi dengan kementerian teknis sudah cukup jelas. Namun, berdasarkan temuan kajian, ada sejumlah rekomendasi yang lebih khusus yang dapat diterapkan sebagaimana tertera di bab berikutnya.

Mandat untuk menjamin pengarusutamaan GESI dalam rangka memastikan kebermanfaatan intervensi untuk sasaran program yaitu kelompok rentan, hanya bisa berjalan jika terbangun kesepahaman yang sama akan urgensi pengarusutamaan ini. Menyadari beragamnya tingkat pemahaman terkait isu kelompok rentan seperti isu perempuan dan penyandang disabilitas, strategi implementasi KP perlu menyertakan kementerian dan dinas pengampu isu gender dan kelompok rentan yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kemensos, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) di tiap lokasi yang fokus pada isu pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan/atau penyandang disabilitas.

Pelibatan OMS, baik yang berupa organisasi perempuan dan/atau organisasi penyandang disabilitas, adalah hal yang harus dilakukan untuk mengakselerasi berbagai kerja pemberdayaan yang sudah berjalan. Keterbatasan dan kesenjangan pemahaman para pemangku program soal isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang ditemukan dalam kajian ini dapat diatasi lewat pelibatan OMS ini. Kedekatan OMS dengan kelompok masyarakat yang didampinginya

juga dapat memfasilitasi terbangunnya kepercayaan dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan pihak lainnya yang berfungsi sebagai pintu masuk program. Potensi lain yang perlu dioptimalkan adalah keberadaan pendamping desa dengan pemahaman cukup mendalam tentang siapa kelompok miskin dan rentan yang berpotensi terlibat sebagai penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan KP ini.

Urgensi untuk mendorong pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain saat laporan ini ditulis dilatarbelakangi oleh potens pelibatan tersebut untuk menguatkan respons terhadap pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di tingkat nasional, hal ini juga diperkuat dengan hasil studi terkait lainnya yang menemukan bahwa pengarusutamaan gender di Indonesia, perlu diperkuat dengan mekanisme M&E yang memfasilitasi penandaan (*gender budget tagging*) untuk memudahkan penilaian kinerja melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender/PPRG (Bappenas-USAID, 2022). Koordinasi dengan KPPPA penting, mengingat pemberdayaan ekonomi berpotensi mengatasi persoalan pelik lainnya yang dihadapi oleh perempuan, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan gizi buruk yang mengakibatkan kekerdilan pada anak-anak .

Terkait kelompok penyandang disabilitas, studi kolaborasi antara MAHKOTA, KOMPAK, dan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk respons COVID-19 yang lebih inklusif di Indonesia, melaporkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak parah dan berkepanjangan pada perekonomian Indonesia serta membawa kesulitan bagi hampir seluruh penduduk. Namun, keterpurukan lebih mendalam dirasakan oleh penyandang disabilitas.

---

**Ini dikarenakan secara umum penyandang disabilitas cenderung memiliki: (i) tingkat pendidikan yang lebih rendah; (ii) keterbatasan akses ke pasar tenaga kerja; (iii) biaya hidup yang lebih tinggi untuk menutup berbagai kebutuhan seperti alat bantu dan perawatan kesehatan; dan (iv) pendapatan yang lebih rendah serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Kerentanan tersebut juga dipengaruhi oleh gender; perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas.**

---

Dorongan dari pempus lewat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagai kerangka implementasi Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 yang merupakan aturan teknis dari Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 juga mencantumkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu targetnya. Saat laporan ini ditulis, KOMPAK telah mendukung Bappenas dalam menjalankan sosialisasi dan dukungan teknis di 16 provinsi dalam rangka mengembangkan matriks dan panduan terkait Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas. Setidaknya 16 provinsi telah mempunyai dokumen rujukan, yaitu: Aceh, Bali, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, NTB, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta.







## BAB 3

# Kesimpulan dan Rekomendasi

### 3.1. KESIMPULAN

Dari temuan di 7 kabupaten lokasi uji coba pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan KP, dapat disimpulkan pembelajaran penting sebagai berikut:

**1** **Seleksi komoditas dan pemilihan mitra merupakan aspek krusial** dalam tahapan perencanaan intervensi. Ini penting mengingat tahapan analisis menunjukkan sejauh mana komoditas berpotensi mendorong keterlibatan kelompok rentan dan memberikan manfaat ekonomi sekaligus nonekonomi lewat proses bisnis.

**2** **Pemetaan dan analisis peran mitra dan/atau pemangku kepentingan penting**, dalam hal ini mengenai pemahaman dan kesadaran GESI yang memengaruhi implementasi program dan kebermanfaatan program bagi kelompok rentan. Sebagai contoh, kesadaran pemda yang dimanifestasikan dalam penyelenggaraan kegiatan tambahan Musyawarah Rencana Pembangunan/Musrenbang yang inklusif dapat dilanjutkan dan aspirasi kelompok rentan dalam forum dapat ditindaklanjuti.

**3** **Pemahaman dan kemampuan teknis untuk mengintegrasikan aspek GESI penting** dan harus dimiliki secara utuh oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan Tim Operator KP. Memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan pelibatan kelompok rentan tanpa kemampuan teknis sekaligus cara menguatkan dan berinteraksi dengan kelompok rentan yang menghadapi situasi khusus tidak hanya menjadikan intervensi sebagai ruang tetapi juga berdampak jangka panjang dan berkelanjutan.

**4** **Mendorong partisipasi kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas penting**. Perlu dipahami bahwa melibatkan dan mendorong partisipasi kelompok rentan untuk mengambil peran yang lebih strategis sama pentingnya.

**5** **Keberadaan *local champion* penting** karena dapat menjadi faktor pendorong pelibatan kelompok rentan. Adanya kisah sukses *local champion* dalam menjalankan usaha bisa jadi contoh dan memotivasi anggota masyarakat rentan lain untuk terlibat. Selain itu, pendekatan yang diberikan *local champion* dapat lebih dipahami oleh masyarakat lokal.

**6** **Intervensi KP sebagai salah satu intervensi pengentasan kemiskinan** melalui pengembangan ekonomi lokal dalam praktiknya memberikan banyak manfaat termasuk manfaat ekonomi (ada peningkatan penghasilan bagi kelompok rentan yang terlibat).

7

**Intervensi ini memberikan berbagai manfaat (termasuk manfaat nonekonomi),** seperti: peningkatan aktualisasi diri, rasa percaya diri, dan penilaian diri kelompok rentan setelah akses dan kesempatan untuk berkegiatan usaha diberikan dan peningkatan rasa percaya diri kelompok rentan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitar mereka.

8

**Intervensi juga memberikan dampak tidak langsung,** seperti: penurunan angka tindak kriminal di desa, terjaganya lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan UKM (Lombok Utara); penurunan risiko banjir di desa (Aceh Barat); dan terjaganya debit air di desa lewat perkebunan teh yang terawat dengan baik (Pekalongan).

9

KOMPAK yang fokus pada pelibatan kelompok rentan telah **meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan** (mis. Pemkab dan OPD terkait) mengenai **pentingnya pelibatan kelompok rentan** dalam program-program mereka. Cerita sukses dari kelompok rentan memotivasi pemangku kepentingan agar bisa menjangkau kelompok rentan di daerahnya dengan lebih baik. Contoh kisah sukses ini adalah pelibatan anak-anak putus sekolah di Kabupaten Pekalongan dalam pengolahan teh serta upaya untuk mendorong mereka kembali ke sekolah melalui program KUDU Sekolah.

10

**Kolaborasi dengan dinas pengampu isu GESI minim.** Hanya 1 daerah yang sudah berkolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk membangun desa wisata yang inklusif. Sisanya belum. Dinas pengampu isu peningkatan ekonomi bersinergi dengan dinas yang mengampu isu kelompok rentan seperti Dinsos dan Dinas PPPA untuk menguatkan sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian kelompok rentan, dalam hal ini perempuan, perempuan miskin, dan penyandang disabilitas.

11

**Belum ada pelibatan OMS dan atau organisasi penyandang disabilitas/OPDis.** Rendahnya pelibatan penyandang disabilitas salah satunya disebabkan lemahnya pemahaman teknis soal pelibatan penyandang disabilitas. Karenanya, diperlukan kolaborasi dan pelibatan OPDis atau ahli isu disabilitas bersama dengan dinas teknis maupun pemdes.

**12** **COVID-19 memiliki dampak cukup negatif di beberapa sektor dan komoditas usaha tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi.** Dampak negatif utamanya tampak di sektor pariwisata dan UKM penyangganya, serta penjualan produk (seperti teh dan rumput laut) karena off-takers utama terdampak COVID-19. Dampak positif pandemi di antaranya adalah munculnya inovasi penjualan lewat e-commerce dan pengembangan pariwisata virtual.

**13** **Musyawarah khusus kelompok rentan terbukti berpengaruh pada akselerasi pembangunan ekonomi eksklusif.** Usulan dari Musrena Keren Trenggalek ke pemdes akhirnya diwujudkan lewat bantuan modal oleh pemdes dan pengadaan mesin produksi olahan sabut kelapa oleh pemda.

**14** **Meningkatnya pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh pada pola relasi dan pembagian kerja domestik dalam keluarga.** Hal ini berdampak positif pada upaya program dalam mendorong kesetaraan gender.

### 3.2. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan kesimpulan, kajian ini memberikan rekomendasi berikut kepada berbagai pemangku kepentingan.

**Tabel 8. Rekomendasi bagi Tim Kerja KP**

Tim Kerja KP	
<b>I. Riset Komoditas</b> A. Seleksi Komoditas B. Analisis Komoditas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria GESI perlu ditetapkan di tahap seleksi komoditas, beberapa di antaranya ialah:</li> <li>• Potensi besaran manfaat yang diterima oleh kelompok rentan;</li> <li>• Potensi peningkatan pendapatan kelompok rentan;</li> <li>• Potensi pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dalam rantai nilai; dan</li> <li>• Dampak pengembangan komoditas terhadap kesetaraan gender.</li> <li>• Analisis GESI perlu dilakukan di tahap analisis komoditas, khususnya terkait prospek sejauh mana pengembangan komoditas dapat melibatkan (kuantitas) dan mengakomodasi (kualitas) kebutuhan kelompok rentan di seluruh tahapan rantai nilai.</li> </ul>
<b>II. Perencanaan Intervensi</b> A. Penyusunan Rencana Intervensi B. Identifikasi dan Negosiasi dengan Calon Mitra C. Kesepakatan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam penyusunan desain program uji coba, khususnya UKM (perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas), OPD, Pemda dan <i>start up</i> atau calon <i>off-taker</i>.</li> <li>• Identifikasi mitra dalam pola kelembagaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek GESI:</li> <li>• Akses kelompok rentan ke program;</li> <li>• Partisipasi kelompok rentan dalam program;</li> <li>• Kebermanfaatn program bagi kelompok rentan; dan</li> <li>• Pemahaman mitra terkait pengarustamaan GESI dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan.</li> </ul>

<p><b>III. Implementasi dan Pengukuran Hasil</b></p> <p>A. Pelaksanaan</p>	<p>Aspek GESI berikut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan kelompok rentan dalam program, termasuk jumlah kelompok rentan, rasio laki-laki dan perempuan yang terlibat, dan pemerataan penerima manfaat;</li> <li>• Pembagian peran beserta landasan pembagian peran, sekaligus keterlibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan;</li> <li>• Pembagian jam kerja, alokasi dan faktor-faktor yang memengaruhi jam kerja kelompok rentan dalam program;</li> <li>• Akses, sarana, dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan, serta bantuan modal terkait fasilitas; dan</li> <li>• Keselamatan kerja, misalnya potensi risiko keselamatan kerja dan mitigasi risiko terhadap kelompok rentan dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>
	<p><b>Target capaian: Keterlibatan kelompok rentan.</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan jumlah kelompok rentan yang terlibat dalam program (data terpilah yang meliputi keterwakilan perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas);</li> <li>• Penetapan rasio perbandingan kelompok rentan yang terlibat dengan kelompok umum lainnya;</li> <li>• Penetapan jumlah kelompok rentan yang menduduki posisi strategis/ pengambil keputusan;</li> <li>• Penetapan jumlah kelompok rentan yang menerima pelatihan; dan</li> <li>• Penetapan jumlah kegiatan yang memberikan ruang bagi kelompok rentan untuk menyuarakan pendapat (misal: Musrenbang inklusif).</li> </ul> <p><b>Target capaian: Manfaat yang diterima kelompok rentan.</b></p> <p><b>Rekomendasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kelompok rentan untuk meningkatkan penghasilan;</li> <li>• Pemberian akses ke kelompok rentan ke layanan keuangan, misalnya: pinjaman koperasi/bank atau yang lainnya;</li> <li>• Pelibatan kelompok rentan dalam pelatihan peningkatan keterampilan; dan</li> <li>• Penetapan jumlah UMKM yang dibentuk/diketahui oleh kelompok rentan.</li> </ul>

## REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH PUSAT

- **Bappenas bersama kementerian terkait pemberdayaan ekonomi melalui KP** yaitu Kemenkop UKM serta Kemenparekraf memastikan sinergi strategi KP dengan implementasi RAN-RAD PD, khususnya dalam pencapaian indikator yang mendorong kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.
- **Bappenas menggunakan praktik terbaik dan pembelajaran yang sudah ada sebagai referensi pengembangan atau penguatan program pemberdayaan UMKM/ekonomi** khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas melalui kementerian terkait maupun pemda. Misalnya, menyertakan praktik baik dan temuan sebagai sumber referensi penunjang modul KP.
- **Kemenkop UKM dan Kemenparekraf melakukan pengarusutamaan GESI pada program-program penguatan ekonomi**, khususnya program-program KP di bawah koordinasinya. Pengarusutamaan dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan indikator yang jelas seperti memasukkan data terpilah gender dan disabilitas dan menjadikan perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai salah bagian dari penerima manfaat. Pengarusutamaan dilakukan di program yang sudah ada atau program afirmasi dengan target khusus.
- **Kementerian pelaksana program KP, berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendes, KPPPA, dan Kemensos**, mengawal implementasi KP sebagai salah satu strategi pemberdayaan perempuan dan penghapusan kemiskinan ekstrem lewat pemberdayaan ekonomi desa yang dimotori oleh BUMDes.
- **Bappenas berkoordinasi dengan KPPPA dan Kemensos** memastikan pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas di tiap tahapan pendekatan KP, termasuk pada pencapaian target dan indikator capaian.
- **Kementerian terkait memasukkan pemahaman & pengalaman** terkait gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai salah satu kompetensi bagi Mentor KP di tingkat nasional/pusat.

## REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN

- **OPD pelaksana KP berkolaborasi dengan OPD pengampu isu gender dan disabilitas.** Sektor peningkatan ekonomi seperti Dinas KUKM dan lainnya perlu berkolaborasi dengan dinas pengampu seperti Dinsos dan Dinas PPPA untuk menguatkan dan menyelaraskan upaya penguatan kelompok rentan (perempuan, perempuan miskin, dan penyandang disabilitas).
- **Penguatan ekonomi kelompok rentan dengan pendekatan KP** yang berperspektif gender dan inklusi, disinkronkan dengan RAN-RAD PD, dengan salah satu indikatornya berupa perwujudan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

- **Memastikan aksesibilitas di semua pembangunan infrastruktur**, khususnya yang menunjang perekonomian lokal.
- **Membuat data terpilah untuk gender dan disabilitas** seperti lewat pemetaan saat perencanaan dan menyertakan penjangkauan penyandang disabilitas dalam indikator capaian program penguatan ekonomi.
- **Dinas PPA dan Dinsos, berkoordinasi dengan Dinas PMD, melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas** terkait gender dan disabilitas untuk aktor KP, termasuk pemdes. Selain itu, dinas mendampingi dan menyelenggarakan edukasi terus-menerus untuk masyarakat lebih luas.
- **Dalam pembentukan Tim Operator KP** termasuk didalamnya Konsultan Bisnis Lokal/Fasilitator KP, pemda menyertakan pemahaman dan pengalaman terkait gender, disabilitas, dan inkusi sosol sebagai salah satu kompetensi.
- **Membuka peluang bagi perempuan dan penyandang disabilitas** untuk turut serta dalam struktur Operator KP.
- **Melibatkan OMS dan OPDis setempat.**
- **Meningkatkan kualitas pemahaman** terkait partisipasi bermakna dan pengetahuan teknis pemerintah terkait pelibatan penyandang disabilitas.

## REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN

- **Menyusun data terpilah** berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas serta usia dalam SID
- **Mengadakan pendataan dan pemetaan kondisi dan potensi** penyandang disabilitas di desa.
- **Menyertakan penyandang disabilitas** sebagai bagian target dan penerima manfaat dalam upaya pengembangan desa baik melalui BUMDes maupun program lain yang di dukung pemdes.
- **Memfasilitasi aksesibilitas fasum desa, dan/atau mengalokasikan anggaran** untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis masyarakat di desa.
- **Memfasilitasi partisipasi kelompok rentan** seperti perempuan dan penyandang disabilitas dan khususnya perempuan dan kelompok rentang pegiat ekonomi lokal, dalam forum diskusi perencanaan program desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, N. (2022). Meningkatkan kualitas anggaran responsif gender di Indonesia: strategi percepatan PUG melalui penguatan pemantauan dan evaluasi dalam PPRG. Bappenas-USAID.

Asian Development Bank. (2014). Gender tool kit: Micro, small, and medium-sized enterprise finance and development Mandaluyong City, Philippines.

Hidayat, Andy Wahyu et al. (2021). Buku Panduan Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. KOMPAK.

Balasubramanian, K. et al. (2002). "Labour, Market Linkages and Gender: Case Study of a Village in Tamil Nadu." *Economic and Political Weekly* 4390-4396.

Badan Pusat Statistik. (2020). "Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan". <https://www.bps.go.id/indicator/23/1539/1/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-kelompok-umur.html>

ILO. n.d. Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jakarta: ILO Jakarta.

Jemimah, Njuki et al. (2011). "Linking Smallholder Farmers to Markets, Gender and Intra-Household Dynamics: Does the Choice of Commodity Matter?". *European Journal of Development Research*.

Kemenpppa. (2020). Sisprenneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM dalam Masa Pandemi. Diakses 12 Agustus di: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2827/sisprenneur-strategi-dukung-perempuan-pelaku-umkm-dalam-masa-pandemi>

Saraini, Mustika & Kholifah, S. (2018). Implementasi Perda Syariah sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 73-87, dec. 2018. ISSN 2527-5879. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/5387>

Satriana, S. dkk. (2021). Covid-19 Impact on People with Disabilities in Indonesia: In Deep Look. Bappenas RI.

Winters, P., et al. (2005). "Evaluation of a Hybrid Seed Contract between Smallholders and a Multinational Company in East Java, Indonesia". *The Journal of Development Studies*.



# LAMPIRAN 1

**Tabel 9. Instrumen Kajian Mendorong Pelibatan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pertanyaan Utama	Pertanyaan Turunan	Informan
<p><b>1. Sejauh mana sistem dalam pendekatan keperantaraan pasar menjamin keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Faktor-faktor utama apa saja yang memengaruhi keterlibatan mereka?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin seperti apa yang diharapkan dalam program keperantaraan pasar ini? Apabila memungkinkan, ceritakan secara terperinci untuk tiap tahap prosesnya.</li> <li>2. Faktor apa saja yang sekiranya memengaruhi keterlibatan kelompok tersebut dalam program keperantaraan pasar?</li> <li>3. Apakah pandemi COVID-19 berdampak pada keterlibatan kelompok rentan dalam keperantaraan pasar? Jika ya, sebutkan dampaknya</li> <li>4. Hingga kajian dilakukan, bagaimana/ seberapa besar persentase keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dalam program keperantaraan pasar ini?</li> <li>5. Mempertimbangkan tahap perencanaan program, bagaimana proses penentuan keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dalam program keperantaraan pasar ini?</li> <li>6. Siapakah aktor yang berperan menentukan para pihak yang terlibat dalam program ini? Apakah dari KOMPAK, OPD terkait, <i>off-taker</i>, atau lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM yang menangani penyandang disabilitas)? Apakah LSM tersebut turut berperan/diajak berkonsultasi?</li> <li>7. Apakah faktor keterlibatan kelompok tersebut sudah tercantum dalam desain awal/tahap perencanaan program?</li> <li>8. Dalam tahap monitoring implementasi program, apakah keterlibatan kelompok tersebut masuk dalam aspek yang diukur? Jika ya, faktor apa saja yang diukur?</li> </ol>	<p>KOMPAK (Tim LED dan staf lapangan), Pemda, OPD terkait, Pemdes, KU, dan <i>off-takers</i></p>

<p><b>2. Bagaimana pemetaan peran, kebutuhan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin? Apakah kondisi tersebut memengaruhi tingkat dan kualitas keterlibatan serta penerimaan manfaat?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam tahap desain dan perencanaan program keberantaraan pasar ini, apakah pemetaan peran; kebutuhan; peluang dan hambatan yang dihadapi oleh penerima manfaat perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sudah diperhitungkan? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana metodenya?</li> <li>- Siapa saja penentu keputusannya?</li> <li>- Apa hasilnya? Dan bagaimana pemetaan ini digunakan dalam implementasi, baik secara langsung atau tidak langsung?</li> <li>- Apakah kegiatan program sudah mengakomodasi aspek-aspek tersebut di atas?</li> <li>- Dalam penentuan desainnya, apakah fokus hanya pada kelompok rentan perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas?</li> </ul> </li> <li>2. Bagaimana cara atau peran KOMPAK/pemda/OPD/pemerintah dalam menganalisis kebutuhan dan peluang yang dirasakan oleh kelompok rentan selama pandemi COVID-19?</li> <li>3. Dalam hal keterlibatan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin dalam program keberantaraan pasar ini, peran apa saja yang mereka pegang? Faktor apa saja yang memengaruhi pembagian peran ini?</li> <li>4. Apakah ada perubahan peran/keterlibatan kelompok rentan dalam program keberantaraan pasar setelah pandemi COVID-19?</li> </ol>	<p>KOMPAK (Tim LED dan staf lapangan), Pemda, OPD terkait, Pemdes, KU, <i>off-takers</i>, dan kelompok rentan</p>
<p><b>3. Bagaimana pola dan relasi berbagai lembaga di desa memengaruhi ketersediaan dukungan dan keberlanjutan program UMKM dalam pendekatan keberantaraan pasar yang diimplementasikan oleh KOMPAK (khususnya dalam aspek keterlibatan kelompok rentan dan manfaatnya bagi mereka)?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tahap/proses pengarusutamaan GESI dalam relasi/kerja sama antarpihak dalam program ini?</li> <li>2. Apakah aspek GESI (mis. penekanan pada pelibatan kelompok rentan dalam program) sudah dijelaskan, dipahami, dan disepakati oleh pemangku kepentingan?</li> <li>3. Bagaimana pemetaan pemangku kepentingan dan perannya dalam pengarusutamaan GESI di program ini?</li> <li>4. Dalam pengarusutamaan GESI, pihak-pihak mana saja (mis. organisasi perempuan, LSM yang menangani penyandang disabilitas, dsb.) yang berperan dan diajak berkonsultasi?</li> <li>5. Bagaimana pola dan relasi antarlembaga ini membawa manfaat bagi kelompok rentan?</li> <li>6. Apa pendapat dan harapan para pemangku kepentingan atas pelibatan kelompok rentan sehubungan dengan program pengembangan UMKM dalam keberantaraan pasar ini? Apa saja praktik terbaik dan petikan pembelajaran yang sudah terbentuk selama ini?</li> <li>7. Apakah ada potential stakeholders/partners yang diharapkan dapat berpartisipasi untuk mendukung program ini ke depannya?</li> <li>8. Bagaimana pengaruh pola kelembagaan yang selama ini terbentuk pada keterlibatan kelompok rentan dalam program ini?</li> </ol>	<p>KOMPAK (Tim LED dan staf lapangan), pemda dan pemdes, OPD terkait, <i>off-takers</i>, KU</p> <p>Penerima manfaat (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin)</p>

<p><b>4. Apa pembelajaran penting yang didapatkan dari implementasi pendekatan keperantaraan pasar dalam kaitannya dengan upaya mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial, baik secara umum untuk semua kelompok rentan (termasuk kelompok yang diidentifikasi sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS), dan secara khusus untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah program ini bermanfaat bagi penerima manfaat?</li> <li>2. Jika ya, manfaat apa saja yang dirasakan? Contoh: peningkatan penghasilan, peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial/ekonomi, dsb., sebutkan.</li> <li>3. Apakah program ini sudah cukup mendorong partisipasi kelompok rentan/perempuan/penyandang disabilitas/kelompok miskin?</li> <li>4. Apa saja hal-hal baik yang penerima manfaat rasakan dari program ini?</li> <li>5. Apa saja hal-hal yang menurut penerima manfaat masih perlu ditingkatkan dari program ini?</li> <li>6. Apa yang penerima manfaat rasakan terkait dampak COVID-19 terhadap penerimaan manfaat dari program keperantaraan pasar?</li> </ol> <p>Pertanyaan bagi KOMPAK (Tim LED/MEL), pemda dan OPD terkait, serta KU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa tujuan yang ingin dicapai (<i>expected outcomes and/or outputs</i>) lewat kegiatan keperantaraan pasar ini?</li> <li>2. Bagaimana pencapaiannya (achievement to date) sampai saat ini?</li> <li>3. Apakah program ini sudah cukup mendorong partisipasi kelompok rentan/perempuan/penyandang disabilitas/kelompok miskin? Apakah sudah sesuai dengan harapan/target?</li> <li>4. Apa saja hal-hal yang dirasa sudah cukup baik?</li> <li>5. Apa saja hal-hal yang dirasa perlu ditingkatkan?</li> </ol>	<p>Penerima manfaat (perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin)</p> <p>Pemda, OPD, Pemdes, KU (pemilik dan pengelola), dan kelompok rentan</p>
<p><b>5. Indikator apa saja (kuantitatif dan kualitatif) yang dapat secara sensitif dan tepat guna mengukur tingkat keterlibatan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin sekaligus manfaatnya bagi kelompok tersebut?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana keterlibatan kelompok tersebut diukur?</li> <li>2. Apakah ada indikator khusus yang digunakan?</li> <li>3. Apakah ada benchmark atau standar internasional yang menjadi tolok ukur indikator?</li> <li>4. Apakah ada perubahan indikator evaluasi untuk keterlibatan kelompok rentan setelah pandemi COVID-19?</li> </ol>	<p>KOMPAK, Bappenas, Pemda, OPD, Pemdes, dan KU</p>
<p><i>*Catatan: Kajian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan hasil capaian dari semua indikator, melainkan fokus terhadap analisis kerangka atau sistem yang digunakan untuk mengukur indikator.</i></p> <p>Selain itu, berdasarkan ulasan kajian literatur dan studi sebelumnya, kajian ini juga telah mengidentifikasi beberapa indikator umum digunakan dalam proses evaluasi GESI yang disajikan di dalam Lampiran I. Indikator yang disebutkan disini adalah asumsi awal, menggunakan indikator yang juga akan disesuaikan dengan indikator yang digunakan oleh Tim Evaluator LED.</p> <p>Dalam pengambilan data yang berupa semi-structured interview, akan ditelaah lebih lanjut indikator yang digunakan oleh pelaksana program dan pemangku kepentingan dalam mengukur capaian program, utamanya dalam aspek GESI. Dengan demikian, di akhir kajian akan diperoleh dan dikompilasi indikator-indikator lain yang teridentifikasi selama proses interview, yang selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengukuran aspek GESI di program-program serupa ke depannya.</p>		





## LAMPIRAN 2

**Profil Pengarusutamaan  
Gender dan Inklusi Sosial dalam  
Program Keperantaraan Pasar  
di 7 Lokasi Kajian**

## 2.1. UKM KUBU KREATIF, ACEH BARAT, ACEH DENGAN KOMODITAS ECENG GONDOK (*EICHORNIA CRASSIPES*)



Penelitian Etnografi Kemiskinan di Aceh (Bappeda Aceh, 2017) menemukan bahwa Kecamatan Arongan Lambalek merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh Barat. Ini dikarenakan kawasan ini sering dilanda banjir hingga lima bulan dalam satu tahun. Karenanya, mayoritas masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek tidak dapat pergi bekerja di sawah (Tabangun Aceh, 2017). Salah satu penyebab utama banjir ialah melimpahnya eceng gondok di sepanjang sungai. Studi Bappeda Aceh (2017) juga menemukan bahwa kemiskinan di Kecamatan Arongan Lambalek disebabkan minimnya pemberdayaan masyarakat setelah terjadinya konflik dan tsunami.

Sudah ada banyak intervensi program dari pemerintah dan lembaga bantuan nonpemerintah, tetapi sifatnya belum masif dan terstruktur. Salah satu programnya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh banyak universitas di Aceh Barat. KOMPAK, lewat program Universitas Membangun Desa (UMD), bermitra dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan tiga perguruan tinggi lainnya untuk menginisiasi pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Tematik. Tujuan program ini adalah memberikan pendampingan langsung dan peningkatan ekonomi kreatif di tiga gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, salah satunya Gampong Kubu.

## Tahapan Riset Komoditas dan Tahap Perencanaan Intervensi

### 1. Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan

**Kegiatan pertama** yang dilakukan KOMPAK dan UIN Ar-Raniry ialah survei awal untuk menganalisis ketersediaan sumber daya alam yang siap dijadikan bahan dasar kerajinan. Temuan penelitian yang melatarbelakangi intervensi ini meliputi: (1) tingginya jumlah kelompok rentan di Kecamatan Arongan Lambalek, seperti kepala keluarga perempuan dan perempuan korban tsunami; serta (2) tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Arongan Lambalek. Dua hal tadi mendasari faktor utama penentuan komoditas yakni besarnya manfaat intervensi bagi kelompok rentan di Aceh Barat.

**Kegiatan kedua** ialah *Focus Group Discussion (FGD)* dengan seluruh perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perempuan, masyarakat miskin, OPD, dan pemerintah di tingkat desa hingga kecamatan. FGD diawali dengan sosialisasi terkait potensi eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan hingga penentuan jenis kerajinan yang akan dibuat masyarakat dengan bantuan pelatih kerajinan anyaman dari Yogyakarta. Dalam hal ini, **keterampilan dasar menganyam** menjadi salah satu alasan penting dibalik pemilihan komoditas eceng gondok untuk kerajinan. Bagi pemangku kepentingan dan masyarakat setempat, penentuan komoditas untuk kerajinan tangan berbasis keterampilan menganyam ini dinilai memiliki sisi feminin sehingga secara umum dapat mendorong keterlibatan perajin perempuan.

Selain pemetaan kebutuhan kelompok rentan, diskusi khusus juga dilakukan di Kecamatan Arongan Lambalek secara rutin melalui Musrenbang Kecamatan. Tujuannya adalah agar tiap kelompok lebih leluasa menyampaikan aspirasinya soal program kecamatan seperti terkait persoalan waktu pengeringan eceng gondok yang memakan waktu, yang kemudian direspons pemda dengan penyediaan alat pengeringan eceng gondok lewat kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala.

### 2. Tahap Perencanaan Intervensi

KOMPAK selalu menerapkan prinsip GESI dalam perencanaan intervensi. Penyusunan **grand design program** merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh KOMPAK, UIN Ar-Raniry, dan OPD/ pemda terkait. Adapun OPD/pemda yang terlibat ialah: Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat; Bappeda Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat; Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat; serta Dinas Perindustrian Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat

Tahap perencanaan intervensi mencakup: (1) Penjelasan terperinci terkait **siapa saja kelompok rentan** yang menjadi sasaran, yakni perempuan, masyarakat penerima bantuan PKH, masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan, dan penyandang disabilitas; (2) Penetapan jumlah minimal sebesar 30% untuk keterlibatan perempuan di tiap kegiatan; dan (3) Penyelenggaraan PUG yang bertujuan untuk memberikan akses kepada perempuan untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemda.

### 3. Tahap Implementasi

Pemetaan peran dilakukan berdasarkan kapasitas/modalitas yang dimiliki kelompok rentan. **Keterampilan dasar menganyam** merupakan salah satu alasan penting dibalik pemilihan komoditas eceng gondok untuk kerajinan di Aceh Barat.



#### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Pada dasarnya, ada 62 perajin yang bekerja dan menjadi anggota di UKM Kubu Kreatif. Namun, hanya 32 yang aktif tiap harinya dengan keterangan sebagai berikut: (1) Mayoritas perajin adalah **kelompok rentan** (perempuan, penerima PKH, janda yang menanggung anak-anak, dan lansia perempuan yang beralih pekerjaan dari petani menjadi perajin eceng gondok); (2) **Hanya 2 perajin laki-laki** yang terlibat aktif; (3) 15 perajin aktif merupakan **kepala keluarga perempuan penerima bantuan sosial dalam DTKS** dari Dinsos.

Sebagian besar perajin yang bergabung di UKM Kreatif Kubu menjadikan Bapak Mursalim dan Ibu Cut Afni sebagai panutan dan *local champion* dalam hal pengembangan usaha kerajinan eceng gondok di Desa Kubu. Sebelum membentuk UKM Kreatif Kubu bersama KOMPAK, Pak Mursalim bekerja sebagai penjual ikan dan Ibu Cut Afni, istrinya, adalah ibu rumah tangga. Beliau aktif mengajak dan memotivasi masyarakat agar bergabung ke UKM Kreatif Kubu. Pesan yang selalu keduanya sampaikan kepada perajin ialah “*belajar dan terus belajar untuk meningkatkan keterampilan*”. Setelah bergabung dengan UKM Kreatif Kubu, kesejahteraan ekonomi keluarga Pak Mursalim meningkat dan ia mampu menguliahkan anaknya di Jakarta.

***“Tekunilah menganyam untuk menyokong ekonomi keluarga dan menghilangkan suntuk di rumah,” –***

**Pak W, warga Desa Kubu dan suami dari penganyam eceng gondok.**

Secara umum, pembagian peran perajin eceng gondok di UKM Kubu Kreatif didasari oleh **sifat pekerjaan**. Di fase awal produksi, perajin perempuan mengambil bahan baku eceng gondok di tepi sungai. Saat ada intrusi air laut dan **risiko pengambilan bahan baku di tengah sungai meningkat, pengambilan eceng gondok dilakukan oleh laki-laki menggunakan perahu dan perempuan melakukan pengeringan dan penganyaman**.

UKM Kubu Kreatif diketuai seorang laki-laki yakni Pak Mursalim. Ia didampingi 2 perempuan yakni Ibu Cut sebagai bendahara dan Ibu Ernawati sebagai sekretaris. Ketua UKM berperan penting dalam pengambilan keputusan, misalnya perihal pengecekan kualitas penganyaman (*quality control*) dan pencarian *off-taker* baru. Ketua UKM juga selalu berpartisipasi aktif dalam pelatihan yang difasilitasi KOMPAK atau *off-taker*, dan mengajarkan keterampilan menganyam ini kepada anggota lain agar keterampilan dan pembagian pekerjaan untuk anggota relatif merata.

Para perajin perempuan berpendapat bahwa **mereka memilih** untuk menganyam eceng gondok karena tidak menyita waktu. Selain itu, alasan pendukung lainnya meliputi: (1) **Pekerjaan dapat dilakukan di rumah**, sehingga tidak mengganggu pekerjaan domestik; (2) **Pekerjaan dilakukan di waktu senggang**, yakni setelah mengerjakan pekerjaan domestik; (3) **Jam kerja fleksibel**, perempuan dapat bekerja di sawah di pagi hari dan menganyam di malam hari.



### Peluang dan Manfaat

Program ini memberikan manfaat yang sangat besar, UKM Kreatif Kubu dapat **beroperasi dan bertahan** sejak intervensi dimulai hingga sekarang. Secara ekonomi, pelaku usaha mengalami **peningkatan pendapatan** yang membantu ekonomi keluarganya. Misalnya, **perajin perempuan yang tadinya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan kini bisa mendapatkan pendapatan utama sebesar Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per bulan.**

Pendapatan juga **meningkat selama pandemi COVID-19 di tahun 2020**. Pembatasan aktivitas membuat masyarakat tertarik membeli produk-produk perabotan rumah, salah satunya yang terbuat dari eceng gondok. Penjualan selama pandemi meningkat sebesar Rp800.000 hingga Rp3.000.000 per bulan melalui penjualan daring (*e-commerce*) yang dibantu oleh 4–5 resellers individu. Penjualan secara daring dan koordinasi eksternal dengan resellers ini dikontrol oleh bendahara UKM. Bendahara UKM juga menampung aspirasi resellers, resellers dapat menyampaikan saran atau *feedbacks* dari konsumen kepada bendahara UKM misalnya saat ada permintaan konsumen agar produk dibuat lebih beragam.

Selain manfaat ekonomi, program KP juga **membuka pasar dan jaringan** bagi UKM Kubu Kreatif. Dari sisi eksternal, ada banyak pesanan yang datang setelah UKM berpartisipasi di acara-acara yang diselenggarakan oleh pemda dan KOMPAK di berbagai daerah. Ini tidak terlepas dari peran ketua UKM dan bendahara UKM (*local champions*) yang aktif melakukan *follow-up* pascaacara dan mencari pasar-pasar baru. Misalnya, saat pesanan dari *off-taker* pertama di Yogyakarta berhenti akibat pandemi, *local champions* berusaha mencari *off-takers* baru yakni resellers individu yang bisa menjual produk secara daring melalui platform *e-commerce*.

Secara internal, kumpul mingguan dilakukan para perajin di rumah UKM untuk meningkatkan **keterampilan menganyam dan kualitas produk hasil anyaman** sekaligus mempererat silaturahmi dan kekerabatan di antara perajin, khususnya saat ada **pendatang baru**. Bahkan, pengurus dan para perajin UKM Kreatif Kubu bertamasya ke pantai di akhir tahun.



### Hambatan

1. **Kapasitas kemampuan teknis perempuan masih terbatas.**  
Keterbatasan peran perajin perempuan dalam *quality control* disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk berkembang.
2. **Kemampuan produksi UKM belum bisa memenuhi permintaan pasar yang naik cukup banyak.** Ini disebabkan oleh dua hal, yakni:
  - a. **Kurangnya jumlah perajin aktif**, sehingga permintaan bervolume besar dari luar Aceh Barat tidak bisa sepenuhnya terpenuhi, diantaranya karena: (1) Perajin punya pekerjaan berpenghasilan lain, seperti bekerja di sawah; (2) Perajin nonaktif hanya bergabung saat jumlah pesanan banyak; dan (3) Perajin kurang serius dan berminat untuk bekerja penuh waktu.
  - b. **Adanya sistem pembayaran termin di awal perjanjian dengan off-taker.** Di awal perjanjian dengan *off-taker*, perajin tidak menerima uang secara langsung setelah menyetor produk anyaman ke UKM. Ini menjadikan perajin kekurangan modal dan hanya bisa membuat 500 dari 2000 target produk. Akhirnya KOMPAK membantu mencarikan modal dan mendapatkan KUR dari BRI Syariah dengan bunga yang sangat kecil. Kemudian, didapatkan *off-takers* dengan skala yang lebih kecil yakni Hotel Hermes di Banda Aceh dan Sarinah di Jakarta.
3. **Kemampuan perajin untuk menganyam seluruh jenis produk terbatas.** Misalnya, ada perajin yang menganggur karena tidak ada pesanan untuk produk tikar.
4. **Prasarana untuk pengambilan bahan baku eceng gondok di sungai atau parit sedalam 4–5 meter tidak memadai.** Sampan masih digunakan untuk pengambilan di sungai yang membahayakan dari segi keseimbangan dan hanya ada becak untuk mengangkut bahan baku dari sungai ke lokasi UKM.
5. **Kepercayaan diri perajin perempuan dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal rendah.** Ini salah satunya dikarenakan ada banyak perajin yang hanya menguasai bahasa lokal.



### Pola Kelembagaan

UKM Kreatif Kubu telah terdaftar sebagai usaha mikro formal. Legalitas ini menjadi potensi awal untuk memfasilitasi penyediaan peluang kerja dan pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan. Beberapa sarana dan prasarana untuk mengembangkan UKM Kreatif Kubu telah didukung berbagai pihak. Contohnya, Bank Aceh telah

memberikan dana CSR sebesar Rp28.000.000 untuk pembelian mesin finishing produk dan pelatihan bagi perajin. Di Aceh Barat, Forum CSR yang terdiri atas beberapa instansi relevan serta pelaku usaha skala besar dibentuk dan didukung oleh akademisi yakni Universitas Syiah Kuala lewat program Inkubator Bisnis, yang direalisasikan melalui 2 proyek yakni:

1. Pembuatan solar dryer atau alat pengering eceng gondok; dan
2. Penelitian skripsi oleh 3 mahasiswa terkait sistem otomatis ventilasi *solar dryer*.



**Keberadaraan *local champion* adalah salah satu kunci utama berjalannya UKM Kreatif Kubu.**

1. Komunikasi intensif terjalin antara *local champion* dengan perajin tiap minggu untuk berbagi seputar kendala menganyam.
2. *Local champion* melakukan upskilling secara mandiri. Misalnya, *local champion* memberikan pelatihan kepada 3 orang per minggu demi meningkatkan keterampilan spesialisasi untuk produk tertentu.
3. Selain mengajak perajin bergabung, *local champion* membuktikan ketekunan dan keberhasilannya, sehingga perajin salut dan ingin mengikuti langkah suksesnya.
4. Ada perluasan kesempatan untuk perempuan di industri kerajinan eceng gondok yakni agar bisa mengambil peran lain seperti menjadi pelatih untuk meningkatkan sumber daya manusia baru, menjadi bagian *quality control*, dan pengurus UKM Kreatif Kubu yang ikut serta dalam pengambilan keputusan usaha.

***“...ketekunan dan kesabaran pasti akan membuahkan hasil,”*** -

**Ibu Cut Afni, Sekretaris UKM Kreatif Kubu**

Namun, isu keselamatan kerja bagi kelompok rentan dalam pengambilan bahan baku masih belum diperhatikan. Selama ini, pemda dan pemangku kepentingan belum menerima keluhan terkait pengambilan bahan baku yang berisiko tinggi sehingga belum ada fasilitas tambahan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa inisiatif pemangku kepentingan dalam melakukan monitoring isu-isu di lapangan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait sejauh mana keterlibatan kelompok rentan dalam program berpengaruh kepada kesejahteraan mereka.

**Tabel 10. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Mendukung UKM Kubu Kreatif**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	Bank Aceh (CSR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian mesin <i>finishing</i></li> <li>• Pelatihan untuk perajin</li> </ul>
2	Forum CSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan wadah koordinasi untuk sejumlah instansi terkait yang relevan serta pelaku usaha skala besar yang dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan, termasuk pengembangan UKM di Aceh Barat.</li> <li>• Upaya memastikan dan memprioritaskan keterlibatan perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal.</li> </ul>
3	Pemkab Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian biaya operasional</li> <li>• Pendampingan teknis</li> </ul>
4	Universitas Syiah Kuala	<p>Pelaksanaan program Inkubator Bisnis yang merealisasikan 2 proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan solar dryer atau alat pengering eceng gondok; dan</li> <li>• Penelitian skripsi oleh 3 mahasiswa terkait sistem otomatis ventilasi <i>solar dryer</i>. Riset ini dilakukan guna mendukung UKM dalam mengolah bahan baku siap anyam dengan tingkat kekeringan yang tepat.</li> </ul>

## Tahap Pengukuran Hasil

Selama ini, pemda melakukan monitoring program secara **reguler per 3 bulan**. Namun, **monitoring secara beriringan dilakukan saat ada kunjungan dari tamu**, baik dari pihak pemerintah maupun eksternal. Pemda mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki secara berkala. Monitoring dilakukan dalam beberapa tahapan: pemantauan, observasi cara kerja UKM, hingga penyampaian saran kepada pelaku UKM untuk menyelesaikan isu yang dihadapi.

Ini didukung dengan berjalannya Musrenbang inklusif di tingkat kecamatan. Musrenbang ini menampung aspirasi kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dan mempertimbangkannya dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, pemda juga mulai **merumuskan aturan tentang paguyuban UMKM di Kabupaten Aceh Barat**. 30% tim perumus adalah perempuan, mengingat ada **jumlah kuota minimal perempuan** untuk tiap kegiatan yang telah disertakan sebagai syarat oleh pemkab. Beberapa hal yang sedang dirumuskan di antaranya:

- 1) Cara meningkatkan kualitas produk;
- 2) Target dan informasi pasar;
- 3) Keterlibatan kelompok rentan—minimal jumlah keterlibatan partisipasi perempuan masih didiskusikan, target sementara ialah 60% partisipasi perempuan (masih dalam tahap perumusan). Informasi terkait target keterlibatan penyandang disabilitas dalam UMKM belum didapatkan.

Indikator pengukuran keberhasilan yang digunakan KOMPAK dan pemangku kepentingan terkait untuk pelibatan kelompok rentan dalam program adalah **siapa saja penerima manfaat dari program ini** dan **seberapa besar manfaat yang diterima oleh penerima manfaat**. Beberapa contoh pengukuran hasil yang dinilai berhasil akibat adanya KP ialah:

**1 Pemanfaatan komoditas eceng gondok;**

**2 Kelompok rentan yang sebelumnya tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan;**

- a. Perajin yang dulunya ibu rumah tangga, kini berpenghasilan dan bisa mendukung ekonomi keluarga, dan
- b. Masyarakat sudah menjadikan menganyam eceng gondok sebagai mata pencaharian tetap yang menghasilkan.

**3 Akses ke layanan perbankan makin meningkat; dan**

**4 Hampir semua lembaga di Aceh Barat menggunakan UKM Kubu Kreatif sebagai *role model*.**



## 2.2. KOPERASI SIPATUO, BANTAENG, SULAWESI SELATAN DENGAN KOMODITAS RUMPUT LAUT



### Konteks Ekonomi Lokal

Program KP di Bantaeng dirancang sebagai program pengembangan ekonomi lokal dengan rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah. Secara spesifik, cakupan wilayah pembudidayaan rumput laut ada di Kecamatan Pa'jukukang, Bantaeng, dan Bissappu. Kecamatan Pa'jukukang menjadi wilayah percontohan budidaya rumput laut karena di ada pesisir laut yang panjangnya 21 km, dan sebanyak 70% masyarakatnya merupakan pembudidaya rumput laut dan 30% lainnya nelayan. Selain itu, perempuan juga banyak terlibat dalam persiapan budidaya dan kegiatan pascapanen. Meski demikian, Kecamatan Pa'jukukang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk termiskin terbesar di Kabupaten Bantaeng yakni sebanyak 17.046 Kepala Keluarga (KK) per Agustus 2020 (BPS, 2020). Dengan demikian, program KP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat miskin, dan masyarakat berkebutuhan khusus.

#### 1. Tahap Riset Komoditas dan Tahap Perencanaan Intervensi

##### Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan

Di tahap seleksi dan analisis komoditas utama yakni rumput laut, kopi, dan jagung maring, komoditas rumput laut dan kopi secara berurutan memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan

komoditas jagung marning. Pembobotan komoditas dilakukan berdasarkan enam indikator yakni: (1) dampak ke masyarakat miskin; (2) potensi nilai tambah; (3) berbasis kawasan; (4) keberadaan local champion; (5) program unggulan daerah; dan (6) dampak pada kesehatan (Tulodo, 2018).

Mayoritas responden yang merupakan kelompok rentan (anggota KU) mengakui bahwa intervensi ini selalu mengupayakan pelibatan kelompok rentan di tiap kegiatannya. Misalnya, selain OPD dan pemda terkait, kelompok UKM juga dilibatkan dalam proses riset pengguna. Namun, perwakilan dari kelompok penyandang disabilitas masih belum terlibat dalam riset pengguna ini.

Dalam proses riset pengguna, pelaku UKM dilibatkan dalam kuesioner awal guna mendapatkan data-data dasar dari pelaku UKM (seperti omzet usaha dan program pemerintah yang pernah diikuti untuk mengidentifikasi apakah pelaku merupakan penerima bantuan sosial). Survei juga dilakukan untuk mendapatkan data terkait jumlah, jenis usaha, sektor usaha, dan tingkat perkembangan BUMDes, sekaligus data potensi dan perangkat desa guna mendapatkan data terkait ekosistem desa. Sayangnya, survei ini belum menghasilkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin maupun keberadaan penyandang disabilitas.

Setelah survei, para pelaku UKM juga dilibatkan dalam diskusi terbatas untuk menyalurkan aspirasi terkait analisis komoditas. Sosialisasi juga dilakukan untuk KU, seperti BUMDes dan koperasi. Sosialisasi memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya memberdayakan kelompok rentan. Di samping itu, pemda berkomitmen kuat untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Misalnya, Musrenbang tahunan dan Musrenbang inklusif sudah dilaksanakan sejak 2012. Musrenbang inklusif dibagi menjadi Musrenbang untuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat yang kurang mampu, dan anak.

Rekognisi pendapat kelompok rentan melalui Musrenbang inklusif ini cukup efektif, dan aspirasi yang diangkat dalam Musrenbang telah ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh pemda (**OPD dan pemda menekankan bahwa hak-hak dan aspirasi di dalam Musrenbang inklusif harus diakomodasi dan kemudian dibahas dalam Musrenbang reguler pemdes, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten**). Sebelum Musrenbang reguler, pemda menggali gagasan di Musrenbang inklusif. Adapun beberapa contoh usulannya meliputi:

- **Perempuan** memberikan usulan terkait: (1) modal usaha; (2) peningkatan kapasitas ekonomi; (3) pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, anak-anak, dan balita; dan (4) pengadaan infrastruktur (drainase jalan, beton, dsb);
- **Anak** memberikan usulan terkait: (1) bantuan beasiswa; (2) pengadaan perangkat internet di desanya, khususnya saat pandemi; dan (3) pembangunan taman bermain di sekitar Pantai Seruni (sudah terealisasikan);
- **Penyandang disabilitas** memberikan usulan terkait: pengadaan bantuan sosial.

Usulan-usulan yang lahir di Musrenbang inklusif ini **wajib masuk di Musrenbang reguler** dan dilarang dihapus karena sudah diatur dalam **ketentuan peraturan bupati (perbup)**. Meskipun pemda sudah memiliki komitmen untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi lokal, **belum ada isu spesifik KP yang diangkat di Musrenbang perempuan dan penyandang disabilitas** karena Musrenbang hanya membahas isu-isu umum dan diadakan di beberapa desa. Usulan yang selama ini ada belum mendapat dukungan langsung dalam upaya

peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam program pengembangan ekonomi lokal lewat pendekatan KP yang didukung oleh KOMPAK. Di sisi lain, KOMPAK juga telah menginisiasi diskusi tematik dengan beragam pokok bahasan untuk kelompok rentan. Misalnya, hasil diskusi dengan perempuan terkait hasil pelatihan KOMPAK telah mendorong terbentuknya forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perkasa, yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas secara aktif agar peserta responsif dan peka terhadap kebutuhan kelompok rentan. **Inisiasi ini berhasil berjalan dan difasilitasi sendiri oleh kelompok perempuan desa tanpa pendampingan secara terus menerus.**

## 2. Tahap Perencanaan Intervensi

### Implementasi Prinsip GESI dalam Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi disusun berdasarkan data terkait kelompok rentan yang berpotensi menjadi penerima manfaat program. Misalnya, proses perencanaan diawali dengan menganalisis data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Analisis jumlah kelompok rentan juga didukung SID, dengan DTKS sudah diverifikasi dan divalidasi melalui SID.

### Tahap Implementasi



#### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Secara umum, program keperantaraan pasar di sektor rumput laut telah melibatkan kelompok rentan, masyarakat miskin. Berdasarkan survei penerima manfaat keperantaraan pasar KOMPAK, mayoritas penerima manfaat merupakan **penerima DTKS dan perempuan.**

Dalam kepengurusan Koperasi Sipatuo, **komposisi kepengurusan sudah *gender-balanced*** dari segi jumlah pengurus dan anggota. Koperasi Sipatuo memiliki 67 orang anggota, 6 orang calon anggota, 4 pengurus, dan 3 pengawas. Dari 67 anggota koperasi, 36 di antaranya adalah anggota/petani laki-laki dan 31 anggota/petani perempuan. Di Koperasi Sipatuo, ada 1 penyandang disabilitas yang sudah terlibat sejak tahun 2017, yakni Pak Muzakkir. Sebelumnya ia bekerja sebagai nelayan dan sejak ada program KOMPAK, ia memiliki dua mata pencaharian yakni sebagai nelayan dan petani rumput laut. Ia mengakui mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi sejak tergabung di dalam KU rumput laut.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan tingkat kapabilitas fisik dan risiko pekerjaan. Pekerja laki-laki turun ke laut (melakukan pengambilan bibit, pembentangan, dan penanaman), sedangkan pekerja perempuan mengikat bentangan yang diturunkan ke laut (atau pembibitan di darat). Selain itu, pekerja perempuan juga berpartisipasi dalam pengolahan rumput laut untuk dijadikan, misalnya, sirup dan jelly. Ini merupakan bagian dari kerja sama PMD dengan Balai Latihan Kerja. Petani penyandang disabilitas melakukan pembibitan di laut. Pemda, melalui OPD terkait, berencana membangun dan menyediakan fasilitas untuk mendukung kebutuhan mereka. Misalnya, jalur kursi roda akan dibuat di jalan ke tempat kerja. Namun, belum ada pemetaan terkait pembagian peran dalam produksi yang ramah disabilitas dan fokus pada keselamatan petani penyandang disabilitas.

Jam kerja budidaya rumput laut fleksibel sehingga tidak mengganggu pekerjaan perempuan. Perempuan melakukan pekerjaan domestik di pagi hari, kemudian pukul 09.00–12.00 mulai budidaya rumput laut. Perempuan mendapat pendapatan Rp30.000–Rp50.000, atau setara Rp2.500 per tali. Biasanya petani bisa menghasilkan 10 ikatan hingga pukul 12.00 siang, dan 20 ikatan hingga sore (tergantung bibit). Ini sangat membantu perekonomian pekerja perempuan. Dengan adanya **fleksibilitas jam kerja** dan **peningkatan pendapatan ekonomi keluarga**, pekerja perempuan mengakui mendapat dukungan penuh oleh suami karena ‘merasa dibantu mencari nafkah’.



### Peluang dan Manfaat

Peluang dan manfaat bagi kelompok rentan meliputi:

1. **Adanya kesempatan kerja;**
2. **Adanya peningkatan penghasilan.** Sebelum program KOMPAK, pengepul membeli komoditas seharga Rp6.000 per tali dan setelahnya, komoditas terjual dengan harga di atas

Rp6.000 per tali. Bahkan bagi penyandang disabilitas, budidaya rumput laut bisa dijadikan sumber penghasilan utama yang meningkatkan kesejahteraan tanpa harus meninggalkan mata pencaharian lamanya (nelayan);

3. **Adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan** baik secara teknis maupun nonteknis, seperti terkait:
  - Pelatihan terkait cara melakukan pembibitan rumput laut yang benar;
  - Peningkatan pengetahuan teknis terkait jarak tanam sebesar 30 cm dan juga kedalaman tanam;
  - Pelatihan terkait cara menjaga kualitas rumput laut;
  - Pelatihan *quality control* untuk perhitungan kualitas rumput laut;
  - Pelatihan terkait cara mengolah rumput laut menjadi ATC menggunakan mesin;
  - Pelatihan terkait pemasaran; dan
  - Kerja sama dengan *marketplace* untuk melatih KU dan pelaku UKM memasarkan produk secara online.
4. **Adanya peningkatan kapasitas oleh KOMPAK untuk BPD PERKASA (Perempuan Kawal Desa) di Bantaeng.** Salah satu program yang diikuti oleh BPD PERKASA ialah program Pelatihan Sekar yang bertujuan agar masyarakat desa lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hingga kini, forum BPD PERKASA sudah bisa berjalan sendiri tanpa perlu selalu didampingi KOMPAK.



### Hambatan

Dalam pelaksanaan program, ada beberapa hambatan. Pertama, kapasitas pembudidaya rumput laut terbatas. Diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk menghasilkan rumput laut yang berkualitas. Kedua, ada kesulitan terkait permodalan. Selama pandemi, koperasi tidak mendapat dukungan modal dari desa karena dana

dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Namun, saat koperasi mengajukan KUR, koperasi tidak memiliki agunan untuk memenuhi persyaratan sehingga ditolak bank meskipun pinjaman yang diajukan di bawah 50 juta rupiah. Mayoritas pelaku UKM tercakup dalam DTKS, sehingga mereka sulit memperoleh agunan.



### Pola Kelembagaan

Salah satu peran KOMPAK dalam membantu KU ialah menghubungkannya dengan *off-taker*. *Off-taker* pertama adalah CV Ocean Fresh dari Bandung. CV Ocean Fresh menjadi pembeli sekaligus fasilitator lokakarya pengembangan kapasitas KU. Misalnya,

CV ini memberikan pelatihan pembibitan dan penggunaan mesin pengolah rumput laut menjadi bahan baku kering (ATC).

1. **Dari sisi kelembagaan**, program KP dapat berjalan karena ada kerja sama antara *off-taker* dengan dinas setempat. CV Ocean Fresh mengajukan permintaan untuk dukungan fasilitas. Kemudian, pemda memberikan fasilitas lokasi budidaya rumput laut untuk kapasitas hingga 1.000 bentangan dan tenaga kerja pembudidaya lokal dengan catatan *off-taker* mengadakan tali dan perahu. Sayangnya, BUMDes Layar Berkembang hanya melakukan transaksi sebanyak tiga kali dengan CV Ocean Fresh. Transaksi harus terhenti karena pandemi sehingga KU tidak mampu membeli bahan baku. Sebagai solusi, KOMPAK mencari *off-taker* baru yakni CV Sarifan Mitra Global. Kerja sama dengan CV baru ini akan berjalan dalam waktu dekat.
2. **KU juga mendapat dukungan dari Kemendes** dalam bentuk alat pengolahan yang mengolah rumput laut menjadi ATC dan alat transportasi untuk menjemput rumput laut dari warga. 2 motor beroda tiga kini digunakan mengangkut rumput laut ke gedung pengolahan oleh BUMDes Layar Berkembang. Selanjutnya, setelah rumput laut diolah menjadi ATC oleh BUMDes Layar Berkembang, CV Ocean Fresh menjemput ATC untuk dikirim ke Makassar (dengan volume 10 ton/kontainer). Dari sini, bisa dilihat bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah memudahkan produksi dan manfaatnya dirasakan oleh pembudidaya sekaligus *off-taker*.

**Tabel 11. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan Koperasi Sipatuo, Bantaeng untuk Komoditas Rumput Laut**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	<i>Off taker</i> : CV Ocean Fresh dari Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi pembeli; dan</li> <li>Menjadi fasilitator lokakarya pengembangan kapasitas KU. Misalnya terkait pembibitan, penggunaan mesin pengolah rumput laut menjadi ATC.</li> </ul>
2	Pemda Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan fasilitas budidaya rumput laut untuk kapasitas sampai 1.000 bentangan dan tenaga kerja pembudidaya lokal; dan</li> <li>Penandatanganan MoU terkait pengadaan tersebut, dengan catatan <i>off-taker</i> mengadakan tali dan perahu.</li> </ul>
3	Bumdes Layar Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan rumput laut kering dari petani menjadi ATC; dan</li> <li>Pelaksanaan pengemasan dan transaksi dengan CV Ocean Fresh.</li> </ul>
4	Kemendes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan alat pengolahan yang mengolah rumput laut ATC; dan</li> <li>Pengadaan alat transportasi untuk menjemput rumput laut warga, yaitu 2 buah motor beroda tiga sehingga rumput laut yang sudah dijemur oleh warga dapat diangkut ke gedung pengolahan oleh BUMDes Layar Berkembang dan meringankan biaya transportasi petani rumput laut.</li> </ul>

## Pembelajaran Penting



**Pola pikir terbuka pengurus koperasi memengaruhi keterlibatan perempuan dan kelompok perempuan dalam kepengurusan.** Ini membuka peluang kerja terbuka untuk semua orang dan memastikan pembayaran upah didasarkan pada kemampuan dan keluaran.

**Ada perluasan peluang kerja untuk perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas** di Kabupaten Pa'jukukang. Kelompok rentan kini bisa lebih mudah mengakses lokasi kerja karena dekat dengan tempat tinggal mereka.

**Sudah ada kerja sama yang berkesinambungan** di antara *off-taker* dan pemerintah setempat dalam pembudidayaan rumput laut yang manfaatnya dirasakan langsung oleh petani perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sekaligus *off-taker* di seluruh rantai nilai.

**Akses rumah usaha jadi lebih mudah.** Rumah kayu pengikatan tersebar di banyak tempat dan tidak terlalu jauh pinggir pantai sehingga memudahkan kelompok rentan.

**Off-taker berperan sebagai pembeli sekaligus pendamping.** Pendampingan teknis oleh *off-taker* membantu petani meningkatkan kualitas rumput laut. Dengan tekun mengikuti pelatihan, petani menjalankan budidaya yang lebih efektif dan mendapat keterampilan lebih. Selain itu, *off-taker* mendapat produk yang berkualitas.

**Selain pemberian sarpras, pemetaan peran dan potensi partisipasi penyandang disabilitas juga penting.** Pembibitan berlangsung di laut sehingga sangat bergantung pada cuaca dan alam, karenanya diperlukan strategi alternatif lain serta pemetaan risiko guna memastikan keselamatan kerja petani penyandang disabilitas.

## Tahap Pengukuran Hasil

Saat mengukur keberhasilan aspek GESI program, data penting untuk melihat gap antara target program dan realitas sekaligus tingkat peningkatan kesejahteraan kelompok rentan oleh program. Namun, OPD/Pemkab Bantaeng mengakui bahwa data yang ada masih sangat kurang, misalnya data peningkatan pendapatan penerima manfaat sebelum dan setelah program serta data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas. Sejauh ini, pengukuran masih dilihat dari sisi peningkatan harga jual ikatan rumput laut. Karenanya, belum ada standar atau metode yang dapat digunakan OPD/pemda untuk mengukur tingkat pelibatan dan manfaat yang diterima kelompok rentan selama program.



### 2.3. DESA WISATA, LOMBOK UTARA, NTB DENGAN KOMODITAS PARIWISATA



#### Konteks Ekonomi Lokal

Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang dikenal dengan pariwisatanya. Kabupaten Lombok Utara memiliki 218.533 orang penduduk, 51% berjenis kelamin perempuan dan 49% berjenis kelamin laki-laki (BPS, 2018). Sektor pariwisata merupakan sumber mata pencaharian 75% masyarakat di Lombok Utara. Mengingat desa wisata bersifat multisektor, masyarakat yang terlibat tidak hanya berperan sebagai pemandu wisata, tetapi juga pelaku UKM pendukung. Secara geografis, daerah ini dekat dengan Gunung Rinjani dan Gili Trawangan sehingga agregasi dari dua destinasi wisata ini diharapkan memberi dampak ke desa wisata lainnya, seperti Desa Bayan, Desa Genggelang, Desa Senaru, Desa Medane, Desa Melake, dan Desa Karangbajo.

Namun, di awal program, permasalahan ada di pemasaran desa wisata yang masih bersifat umum dan belum menargetkan kelompok-kelompok tertentu (Tulodo, 2018). Selain itu, kabupaten ini mengalami musibah dua kali berturut-turut, yakni gempa dan tsunami di tanggal 5 Agustus 2018, dan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Keduanya menambah angka kemiskinan yakni menjadi 26,99% di tahun 2020, lebih tinggi dari angka di tingkat provinsi NTB yakni 13,97% (BPS, 2020). Tingkat kemiskinan tinggi sering dikaitkan dengan tingginya jumlah perempuan yang menjadi tenaga kerja asing, kasus kawin-cerai yang menyebabkan tingginya jumlah kepala keluarga

perempuan, serta budaya patriarki yang cukup kuat. Sebelum intervensi KOMPAK, penyusunan anggaran kegiatan didominasi oleh kelompok elit perempuan dan kelompok laki-laki. Dengan demikian, program KP di Kabupaten Lombok Utara diharapkan menjadi salah satu intervensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas.

## **Tahap Riset Komoditas dan Tahap Perencanaan intervensi**

### **1. Seleksi dan Analisis Komoditas serta Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan**

---

Berdasarkan hasil observasi dan riset situasi dan kondisi desa wisata, potensi pariwisata yang besar serta isu sosial dan kemiskinan di Lombok Utara menjadi landasan pemilihan lokasi uji coba. Ini dilakukan dengan menganalisis data kelompok rentan yang menjadi penerima PKH. Kelompok ini diharapkan dapat bergabung dalam pengelolaan desa wisata. Di awal seleksi dan analisis komoditas, pemilihan desa wisata belum melibatkan kelompok rentan secara langsung. Namun, setelah intervensi KOMPAK, segmentasi kebijakan yang dibuat pemda mulai fokus pada kelompok rentan. Sebagai contoh, KOMPAK berhasil meyakinkan Pemda Lombok Utara untuk melaksanakan Musrenbang inklusif di tingkat kecamatan dan desa. Bahkan, undangan untuk kelompok rentan dilakukan secara *door-to-door* karena ada indikator partisipasi dan kehadiran minimal perempuan sebanyak 30%. Namun, fokus kelompok rentan lebih condong ke perempuan dan masyarakat miskin, belum mencakup kelompok penyandang disabilitas.

Isu-isu GESI yang diangkat di Musrenbangdes inklusif belum terbawa hingga Musrenbang di kecamatan. Sebagai contoh, ada sekolah perempuan (Akademi Paradigta) yang memberikan pelatihan dan pembimbingan perempuan agar perempuan lebih aktif berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Tetapi, akademi ini belum dapat didirikan di seluruh desa meskipun banyak alumni perempuan sekolah ini sudah berani tampil dan memberikan pendapat, bahkan ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, rekognisi pendapat kelompok rentan di Kabupaten Lombok Utara masih sebatas pada pemberian akses partisipasi untuk kelompok rentan.

### **2. Tahap Perencanaan Intervensi**

---

KOMPAK selalu menekankan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan di tahapan perencanaan intervensi dan dalam berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan. Responden dari akademisi dan pemda mengakui bahwa penekanan dilakukan oleh KOMPAK di tingkat kabupaten dan tingkat nasional. Selain itu, pihak akademisi menyadari pentingnya pemetaan kebutuhan kelompok rentan dalam implementasi program setelah bekerja sama dengan KOMPAK. Dalam praktik KKN tematik di desa, dorongan ini menggerakkan para dosen untuk membagi mahasiswa ke dalam kelompok, dengan setidaknya 30% dari tiap kelompok beranggotakan mahasiswi. Namun, jumlah partisipasi minimum masih hanya mencakup perempuan dan masyarakat miskin, belum ada fokus pada penyandang disabilitas.

## Tahap Implementasi dan Pengukuran Hasil



### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Pengorganisasian dan pembagian peran dalam Pokdarwis dilakukan secara mandiri oleh warga di tiap desa wisata. Perekrutan anggota Pokdarwis dilakukan secara terbuka sehingga siapa saja boleh bergabung. Selain itu, perempuan juga banyak dilibatkan dalam kepengurusan Pokdarwis dan BUMDes. Namun, belum ada penyandang disabilitas dalam kepengurusan. Penyandang disabilitas baru dilibatkan di UKM pendukung. Meskipun begitu, perempuan di desa wisata Lombok Utara sangat proaktif, khususnya di Desa Senaru. Mereka membentuk Ikatan Pemandu Perempuan (*Women Guide*) Senaru, mendirikan organisasi perempuan, dan menjalankan negosiasi dan mengemukakan berpendapat di forum diskusi.

Terwujudnya kesetaraan sejak tahap perekrutan berlanjut ke tahap pembagian peran dalam Pokdarwis. Peran anggota dan pengurus disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Di dalam diskusi pun, tiap pengurus diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi. Pemandu wisata pendakian Gunung Rinjani masih didominasi laki-laki. Awalnya, hanya laki-laki yang menjadi pemandu wisata. Namun, di tahun 2000, terbentuk organisasi *Women Guide*, yang beranggotakan pemandu perempuan. Para pemandu perempuan ini membuat paket-paket *soft trekking* keliling desa Rinjani dan desa-desa adat lainnya, seperti ke perkebunan, persawahan, dan air terjun. *Women Guide* menjadi contoh bagi para perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan bisa berkontribusi di desa wisata. Hingga saat ini *Women Guide* sudah **beranggota 70 pemandu wisata**.

Seluruh responden perempuan menyatakan tidak ada hambatan yang berarti dari suami terkait partisipasi mereka dalam kegiatan desa wisata. Suami memberikan peluang kepada istrinya untuk bekerja di luar rumah, **dengan catatan bahwa perempuan harus bisa membagi waktu dan kepentingan keluarga tetap diutamakan**. Dengan begitu, banyak perempuan memilih bekerja sebagai pemandu wisata karena pembagian jam kerjanya tidak memberatkan. Situasi serupa tampak pada partisipasi perempuan di UKM pendukung, seperti UKM penjualan kopi. Responden pertama berpendapat bahwa dengan bekerja di UKM pengolahan kopi, ia merasa tidak terikat dengan jam kerja dan **bisa mengerjakan pekerjaan sambilan** di rumah. Ini diamini responden kedua yang berpendapat bahwa **perempuan memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sehingga perempuan memiliki lebih sedikit waktu luang untuk melakukan aktivitas ekonomi**.



### Peluang dan Manfaat

Program KP memberikan manfaat bagi kelompok rentan, seperti:

- a) Membuka kesempatan kelompok rentan menjadi pengurus Pokdarwis karena terbentuknya pola pikir terbuka;
- b) Mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata lewat ikatan pemandu perempuan; dan
- c) Berkembangnya UKM pendukung yang mayoritas dimiliki perempuan menghadirkan efek multiplier untuk manfaat yang dirasakan dari perkembangan desa wisata.

Adapun peluang yang dihadirkan meliputi:

**1 Peningkatan manfaat ekonomi (pendapatan) bagi perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok penyandang disabilitas.** Misalnya, pemandu perempuan kini memiliki pendapatan sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 per hari. Ini tak hanya dirasakan oleh pegiat wisata, **efek multiplier juga dirasakan UKM yang dimiliki perempuan.** Salah satu responden perempuan UKM merasa ekonomi keluarganya makin maju, dibandingkan sebelum pendampingan oleh KOMPAK.

**2 Peningkatan hard skills dan soft skills perempuan dan masyarakat miskin lewat pelatihan dan interaksi dengan pemangku kepentingan.** Terkait *hard skills*, pegiat wisata mendapatkan pengetahuan tentang pemasaran dan pembuatan paket-paket wisata. Perempuan pemilik UKM mendapat peningkatan keterampilan. Misalnya, di Desa Bayan, ada pendampingan pengolahan produk sumber daya yang ada menjadi produk *Pure Coconut Oil (PCO)* dan madu. Untuk *soft skills*, penerima manfaat dari kelompok rentan mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Selain wawasan seputar pariwisata, wawasan tentang teknologi, target pasar, hingga kemampuan bahasa asing juga didapatkan. Keterampilan berorganisasi terbentuk lewat partisipasi penerima manfaat dalam Pokdarwis dan BUMDes. Misalnya, Pokdarwis yang beranggotakan perempuan dan remaja **menjadi tanggap dan sigap** saat ada tamu yang dibawa KOMPAK ke desa-desa wisata. Latihan mengakomodasi tamu membuat mereka terbiasa dengan berbagai kegiatan di desa wisata.



## Hambatan

- a) **Keterlibatan kelompok rentan hanya sebatas dalam implementasi program.** Seiring berjalannya waktu, perencanaan program pengembangan ekonomi lokal mulai melibatkan kelompok rentan meski belum sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas. Akses sarpras juga masih kurang. Selain itu, rekognisi pendapat kelompok rentan masih sangat rendah. Banyak aspirasi yang disampaikan belum dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Ini dikarenakan sebagian besar OPD/Pemda, bahkan akademisi, baru mulai sadar akan pentingnya pemenuhan kebutuhan kelompok rentan setelah berdiskusi dengan KOMPAK. Adopsi GESI di tiap tahapannya juga belum disampaikan sejak awal. Pelaksana program merasa bahwa sosialisasi terkait fokus GESI secara spesifik sangat dibutuhkan di tahap perencanaan awal, untuk memastikan agar seleksi dan analisis komoditas melibatkan kelompok rentan sejak awal.
- b) **Dampak COVID-19 cukup parah terhadap keberlangsungan desa wisata.** Di tahun 2018, Agustus, dampak gempa dan tsunami berangsur teratasi selama 2 tahun. Namun, pandemi COVID-19 terjadi di 2020 ketika kondisi mulai pulih. Kegiatan desa wisata terhenti karena adanya pembatasan kunjungan. Ini titik masuk KOMPAK untuk memberikan pengembangan kapasitas bagi pegiat pariwisata untuk mengeluarkan aspirasinya, salah satunya melalui pelatihan paket wisata dan tur virtual desa wisata. UKM pendukung desa wisata pun terdampak cukup parah. Sebelum pandemi, UKM pengolah kopi bisa menjual 3 dus per hari, selama pandemi hanya 3 buah. Untuk merespons hal ini, UKM terus didorong dan dimotivasi untuk melakukan produksi dan berpartisipasi dalam bazar. Informasi terkait bazar diberikan oleh KOMPAK. Ini membantu UKM untuk kembali melakukan produksi setelah penjualan terhenti.
- c) **Nilai-nilai patriarki masih langgeng.** Perempuan punya beban kerja lebih tinggi dibanding laki-laki. Sekalipun berpartisipasi di desa wisata, beban ganda dipikul perempuan karena mereka dianggap penanggung jawab pekerjaan domestik yang dipandang sebagai pekerjaan 'prioritas'.

KOMPAK memilih Desa Bayan, Desa Ganggalang, dan Desa Senaru sebagai 3 lokasi uji coba KP karena ketiganya merupakan desa tematik prioritas di Kabupaten Lombok Utara (Surat Keputusan/SK Bupati No.366/556/Disbudpar/2020). Dalam desain programnya, KOMPAK menggunakan kemitraan Pentahelix, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, sektor swasta, lembaga nonpemerintah, pemerintah, dan media guna mengembangkan desa wisata melalui penguatan Pokdarwis dan BUMDes. Beberapa program yang dijalankan mencakup:

- a. **Pelaksanaan KKN Tematik** pada bulan Oktober–Desember 2020 bersama dengan akademisi Sekolah Tinggi Pariwisata/STP Mataram dan beberapa OPD serta Pemda Lombok Utara. KOMPAK melihat STP Mataram sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan potensi desa wisata. KOMPAK bersama dengan STP Mataram, pemdes, dan Pemkab Lombok Utara melakukan pengembangan potensi 6 desa wisata yakni Desa Bayan, Desa Ganggalang, Desa Senaru, Desa Medane, Desa Melake, dan Desa Karangbajo. Mahasiswa memberikan beberapa pelatihan kepada Pokdarwis dan masyarakat desa wisata, seperti terkait pengelolaan daya tarik wisata, keterampilan, pemasaran pariwisata, serta bahasa asing. Dalam hal ini, KOMPAK

membantu penandatanganan MoU untuk KKN tematik bersama dengan STP Mataram dan Pemda Lombok Utara.

- b. Pelatihan pengembangan kapasitas dan promosi paket wisata oleh off-taker.** *Off-taker*, Caventer, berperan besar dalam melakukan pelatihan pariwisata untuk Pokdarwis. Contohnya, setelah melakukan penilaian potensi pariwisata di tiap desa, *off-taker* memberikan Pokdarwis di Desa Ganggalang dan Desa Senaru pelatihan pembuatan paket-paket wisata yang menarik bagi wisatawan, termasuk pelatihan terkait *service excellence*. Selain itu, *off-taker* juga membantu promosi melalui media sosial serta mengenalkan Pokdarwis ke jaringan tour operator guna memperluas pemasaran (AKATIGA, 2021). Kemudian, untuk Desa Bayan sendiri, *off-taker* melakukan pendampingan bagi Pokdarwis dalam membuat desa wisata virtual.
- c. Pembuatan buku panduan dan modul pelatihan** ‘Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan’ bersama dengan *off-taker*, akademisi, dan pemda. Para pemangku kepentingan duduk bersama untuk mendiskusikan prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure/SOP*) terkait pengembangan dan pengelolaan desa wisata agar menjadi silabus yang dapat digunakan sebagai acuan standar minimum bagi semua desa wisata di Kabupaten Lombok Utara. Buku panduan ini memasukkan indikator GESI sebagai acuan dan pengukuran kualitas desa wisata.



#### Pola Kelembagaan

Ketiga desa wisata ini dikelola oleh Pokdarwis, dengan pengorganisasian dan pembagian peran dilakukan sendiri oleh masyarakat desa setempat (AKATIGA, 2021). Selanjutnya Pokdarwis dihubungkan dengan *off-taker*, Caventer, serta STP Mataram sebagai agregator program dari

pihak akademisi. Dalam hal ini, *off-taker* dan agregator menjalankan berbagai program seperti peningkatan kapasitas melalui KKN tematik, pelatihan desa wisata, pembuatan paket-paket wisata, dan pengadaan bantuan promosi melalui media sosial. Adanya program ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas desa wisata, termasuk produk-produk UMK di bawah BUMDes dan selanjutnya dapat menarik masuk potensi pasar khusus seperti KEK Mandalika, Event Moto GP 2022, dan acara lainnya di Kabupaten Lombok Utara 2022. Untuk merealisasikan tujuan ini, Pokdarwis dan BUMDes didukung penuh oleh Pemda Lombok Utara lewat penyediaan sarpras dan modal lewat Dana Desa 2021 sebesar Rp718 juta yang didistribusikan ke ketiga desa, dan Rp1 miliar untuk tahun anggaran 2022.

Menurut responden akademisi dari STP Mataram, pola kelembagaan harus fokus pada beberapa faktor utama: akses, partisipasi, kontrol, dan kebermanfaatannya bagi kelompok rentan. Misalnya, terkait akses, kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas jalan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Dinsos Lombok Utara sudah menyusun peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, tetapi masih sebatas rancangan. Dengan demikian, pemahaman OPD terkait GESI dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan perlu ditingkatkan.

**Tabel 12. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan Desa Wisata, Lombok Utara**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	Pokdarwis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian pengelolaan desa wisata; dan</li> <li>• Pembagian peran dengan BUMDes dalam pengelolaan desa wisata dan sektor pendukungnya seperti UMKM yang berjualan di desa wisata.</li> </ul>
2	Pemda Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi atraksi di destinasi wisata, pengadaan fasilitas kantor Pokdarwis dan BUMDES, serta pengadaan peralatan produksi untuk UMK dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.</li> </ul>
3	Pemdes (3 desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Dana Desa 2021 sebesar Rp718 juta untuk ketiga desa, dan Rp1 miliar untuk tahun anggaran 2022.</li> </ul>
4	BUMDes	
5	Caunter ( <i>off-taker</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian potensi pariwisata di tiap desa;</li> <li>• Pelaksanaan pelatihan untuk Pokdarwis di Desa Genggeling dan Desa Senaru terkait pembuatan paket-paket wisata yang menarik bagi wisatawan, termasuk pelatihan terkait <i>service excellence</i>;</li> <li>• Pendampingan untuk Pokdarwis dalam melakukan promosi melalui media sosial serta pengenalan Pokdarwis ke jaringan tour operator guna memperluas pemasaran (AKATIGA, 2021);</li> <li>• Penetapan target jumlah partisipan kelompok rentan yang terlibat (perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas);</li> <li>• Pendampingan untuk Pokdarwis Desa Bayan dalam membuat desa wisata virtual, yang merupakan bagian dari program Kemenparekraf.</li> </ul>
6	STP Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan MoU terkait KKN tematik dengan Pemda Lombok Utara;</li> <li>• Penyelenggaraan sejumlah pelatihan oleh mahasiswa lewat KKN tematik untuk Pokdarwis dan masyarakat desa wisata terkait: pengelolaan daya tarik wisata; keterampilan; pemasaran pariwisata; dan bahasa asing; dan</li> <li>• Peningkatan kapasitas melalui KKN tematik, pelatihan desa wisata, pembuatan paket-paket wisata, dan pengadaan bantuan promosi melalui media sosial.</li> </ul>

## Pembelajaran Penting



**LSM dan Lembaga NonPemerintah berperan penting dalam mendorong motivasi masyarakat.** Selain KOMPAK, ada banyak LSM yang melakukan intervensi di Lombok Utara yang juga membicarakan isu GESI. Sebagai contoh, terbentuknya Pokdarwis di tahun 2014 merupakan hasil dari program CSR suatu bank di Lombok Utara. Demikian pula *Woman Guide* Desa Senaru, yang awalnya merupakan inisiatif LSM asing.

**Ada berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan kelompok rentan dan yang perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.** Ini mencakup:

- **Keberadaan peluang dan potensi desa wisata.** Misalnya, terkait variasi produk yang dapat dihasilkan UMKM, jenis-jenis paket wisata, sekaligus akses ke pasar.
- **Besaran manfaat yang diperoleh.** Banyak dari kelompok rentan yang terlibat karena melihat kesuksesan rekan pegiat wisata sebelumnya—misalnya menjadi mampu menguliahkan anaknya dan berinvestasi membeli tanah setelah mendapat manfaat ekonomi dari program.
- **Kesempatan untuk terlibat dalam pelatihan.** Banyaknya kesempatan mengikuti pelatihan dan pertemuan dengan tamu-tamu yang berkunjung mengasah keterampilan pegiat usaha untuk menjadi mahir di bidang pariwisata seperti menjadi lebih percaya diri bertemu tamu.

## Tahap Pengukuran Hasil

Dalam melakukan monitoring program di lapangan, Dinas Pariwisata (Dinpar) daerah, selalu menyempatkan diri untuk turun ke lapangan bersama KOMPAK. Di lapangan, pemda dan KOMPAK berdiskusi dengan pegiat wisata di desa wisata untuk membahas progres dan tantangan yang dihadapi. Adapun Dinpar biasanya tiap bulan datang ke desa wisata untuk menangani Pokdarwis secara langsung. Meskipun tidak ada indikator pengukuran tertulis dan terencana, OPD/Pemda yang terlibat melihat bahwa salah satu keberhasilan program dapat dilihat dari keberanian Pokdarwis dan pegiat usaha untuk mempromosikan pasar sekaligus bernegosiasi dengan pasar. Misalnya, ada banyak anggota Pokdarwis sudah berani mengemukakan hal-hal yang mereka inginkan ke pasar.



## 2.4. KOPERASI BERDIKARI MAKMUR, DESA PANINGGARAN, PEKALONGAN, JAWA TENGAH DENGAN KOMODITAS TEH



### Konteks Ekonomi Lokal

Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang terkenal dengan potensi alam perkebunan teh. Salah satu sentra produksi teh di Pekalongan adalah Kecamatan Paninggaran. Ada pabrik teh Paninggaran yang cukup besar. Kecamatan Paninggaran memiliki potensi alam di sektor pertanian, perkebunan teh (sejak tahun 1986), perkebunan cengkeh, serta peternakan. Geliat perkebunan teh di Paninggaran tampak sejak tahun 1986 dalam program Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perkebunan terbentang seluas sekitar 500 hektar. Petani teh menjual teh basah hasil petikan mereka ke PT Paninggaran hingga sekitar tahun 1990-an. Namun, geliat itu menurun karena ekspor teh terhenti sejak 2012 dan harga teh mulai tak stabil dan pembayaran pihak PT ke petani tidak menentu. Saat itu, pucuk daun teh basah hanya dihargai Rp900/kg.

Keresahan di tahun 2012 memotivasi petani untuk membentuk kelompok tani yang menjadi cikal bakal Koperasi Teh Berdikari Makmur yang berbadan hukum tahun 2016. Di tahun 2017, koperasi mencoba mengolah pucuk teh menjadi teh premium (value-added tea) kualitas rendah dan mendapatkan kenaikan harga pucuk basah menjadi Rp2.200/kg (sebelum pandemi COVID-19). Setelah pendampingan KOMPAK, dan peningkatan kualitas pucuk teh, harga naik menjadi Rp3.000-5.000/kg. Pendampingan KOMPAK hadir di tahun 2017, berawal dari pendampingan penyusunan Peraturan Desa/PerDes mengenai Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa. Selanjutnya, dalam flagship pengembangan ekonomi lokal, KOMPAK turut mendampingi Koperasi Teh Berdikari Makmur **untuk maju dalam pengolahan teh dan memperoleh harga lebih tinggi untuk daun teh yang diproduksi.**

Pemilihan teh sebagai komoditas unggulan yang didukung oleh KOMPAK ini telah melalui tahapan riset dan seleksi komoditas melalui urun ide kolektif antara pemerintah lokal (Pemkab Pekalongan dan OPD terkait; Bappeda; pemerintah kecamatan; pemerintah desa, dan Dinas Koperasi), UMKM, dan KOMPAK. Adapun latar belakang pemilihan teh sebagai komoditas unggulan adalah sebagai berikut: (1) Padat karya, melibatkan banyak pekerja; (2) Siklus panen yang pendek, teh dapat dipanen tiap 15 hari sekali (lebih singkat siklusnya jika dibandingkan dengan komoditas cengkeh, yang siklus panennya hanya 1 kali dalam setahun); dan (3) Aspek pemberdayaan perempuan, mengingat **pemetik teh sedari dulu sebagian besar adalah perempuan**.

## **Tahap Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi**

### **1. Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan**

---

Kabupaten Pekalongan yang merupakan salah satu zona merah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan angka urbanisasi penduduk ke kota-kota besar yang tinggi menjadi faktor dipilihnya daerah ini sebagai lokasi uji coba program KP. Dengan adanya potensi berupa lahan kebun teh yang luas dan harga yang kurang menguntungkan, di awal 2020, KOMPAK melalui model inovasi KP memberikan dukungan kepada Koperasi Paninggaran untuk memperluas akses pasar, salah satunya dengan memfasilitasi kerja sama koperasi dengan PT CKC (produsen teh premium Havilla Tea). Harapannya, koperasi dapat menjadi salah satu pemasok teh premium untuk PT CKC. Melalui kerja sama ini PT CKC juga berperan dalam meningkatkan kemampuan petani dan koperasi dalam tata kelola kebun, teknik pemetikan, pelayuan, pengeringan, hingga pengemasan, sehingga bisa menghasilkan produk berkualitas. Selain manfaat ekonomi, peningkatan keterampilan dalam pengelolaan kebun teh juga bermanfaat bagi lingkungan yakni terjaganya debit air di desa.

Untuk komoditas cengkeh, mayoritas pekerjaannya adalah laki-laki. Sementara perkebunan teh hampir 100% pemetiknya adalah perempuan. Oleh karena itu, teh dipilih sebagai komoditas dampingan KOMPAK. Pemdes juga memperhitungkan penyandang disabilitas agar dilibatkan dalam kegiatan koperasi teh ini. Data di Kecamatan Paninggaran menyebutkan ada sekitar 300 penyandang disabilitas dan 35 orang di antaranya sudah dilibatkan dalam koperasi teh. Jumlah pekerja penyandang disabilitas aktif saat ini adalah 4 orang (2 orang disabilitas fisik, 1 dengan keterbatasan komunikasi, dan 1 penderita katarak).

Dalam pelibatan kelompok rentan, KOMPAK berperan menyampaikan fokus program KOMPAK di awal yakni untuk melibatkan, memberi peluang, dan memberikan manfaat bagi kelompok rentan yaitu perempuan, masyarakat miskin penerima bantuan sosial, penyandang disabilitas, serta anak putus sekolah. Tak hanya itu, sebelum KOMPAK hadir di Paninggaran, pihak desa sudah memberikan cukup perhatian bagi warga penyandang disabilitas lewat pendataan, pemberian bantuan sosial, serta fasilitasi pelatihan dan pemberian bantuan biaya lanjut sekolah bagi anak putus sekolah. Adanya keselarasan antara visi program KOMPAK dengan program pemdes ini merupakan salah satu praktik terbaik dalam upaya penegakan GESI dalam program.

### **2. Tahap Perencanaan Intervensi**

---

Dalam aspek kesetaraan gender, pekerjaan pemetik teh merupakan pekerjaan yang muncul *by nature*, yakni pekerjaan yang khas perempuan. Sementara itu, laki-laki bertanggung jawab merawat kebun. Dari sisi regulasi dan peran pemangku kepentingan, regulasi mewajibkan pelibatan perempuan minimal 30% dari total pelibatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Angka

tersebut dituangkan dalam daftar hadir berbagai acara-acara di desa. Ini cukup efektif mendorong pelibatan perempuan. Meski demikian, tingkat kualitas pelibatan perempuan perlu dikaji lebih jauh. Misalnya, perlu dicari tahu perempuan yang hadir sudah mendapat cukup ruang untuk menyampaikan pendapat, kepercayaan untuk memegang peranan strategis dalam kegiatan desa, dan lain sebagainya. Pihak Pemdes Paninggaran menyatakan bahwa desanya sudah memberi ruang memadai untuk kesetaraan gender melalui beberapa kegiatan berikut:

- **Penyediaan ruang yang luas bagi perempuan** untuk menyampaikan pendapat, seperti Rembuk Desa yang sudah membuka akses untuk partisipasi perempuan (30%);
- **Upaya memastikan keadilan dan keterwakilan perempuan** dalam berbagai program di desa; dan
- **Upaya menjadikan perempuan sebagai wakil ketua dan sekretaris** Koperasi Teh Berdikari Makmur.

Untuk aspek PUG dalam **pelaksanaan program**, OPD selaku pelaksana program dan tim program berperan penting dalam menyampaikan pesan PUG di tahap perencanaan dan desain program. Sebagai contoh, **Tim KOMPAK (LED Coordinator dan District Coordinator)** menyampaikan **fokus kerja KOMPAK** yaitu kelompok rentan, serta memberi **pemahaman bagi pemangku kepentingan** di tingkat lokal (OPD, perangkat desa, dan pengurus koperasi) terkait pentingnya pelibatan kelompok rentan sebagai sasaran program.

Pemdes berperan cukup aktif dan peduli terhadap kelompok penyandang disabilitas di wilayahnya. Karenanya, penggunaan data warga penyandang disabilitas desa dalam penentuan dan pelibatan kelompok penyandang disabilitas sebagai target program ini cukup optimal. Identifikasi kelompok rentan di Paninggaran juga mencakup anak putus sekolah (jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas). Pemdes melakukan pendataan sebagai dasar pemberdayaan melalui: fasilitasi pelatihan keterampilan, pemberian bantuan biaya melanjutkan sekolah, serta pelibatan kelompok muda-mudi dalam kegiatan pengolahan teh di koperasi.

## Tahap Implementasi dan Pengukuran Hasil



### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Ada 35 orang petani teh yang tergabung dalam Koperasi Berdikari Makmur (30% laki-laki dan 70% perempuan). Dari jumlah tersebut, 4 orang merupakan penyandang disabilitas (2 orang penyandang disabilitas fisik, 1 orang dengan keterbatasan komunikasi, dan 1 orang penderita katarak). Data Pemdes Paninggaran menyebutkan bahwa

20% petani teh tercakup dalam DTKS. Pembagian peran adalah sebagai berikut: perempuan bertugas sebagai pemetik teh dan laki-laki sebagai perawat kebun teh. Penyandang disabilitas diberi peran yang lebih ringan/sesuai dengan kemampuan fisik mereka, seperti memetik teh dengan bantuan seperti fasilitas antar-jemput dengan sepeda motor oleh anggota koperasi dari rumah ke kebun serta dari kebun ke koperasi teh.

Jam kerja umumnya mulai pukul 07.00 pagi sampai 10.00/11.00 pagi. Perempuan/ibu rumah tangga bekerja memetik teh setelah menyelesaikan pekerjaan domestik. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan memetik teh sesuai dengan kesediaan waktu perempuan pemetik teh dan ada beban ganda bagi perempuan. Dalam praktiknya, tidak ada kendala dalam pembagian waktu antara

kerja memetik teh dengan kerja domestik dan tidak ada larangan dari suami. Upah bagi pemetik teh perempuan umumnya digunakan untuk menopang ekonomi keluarga.



### Peluang dan Manfaat

Sejumlah peluang dan manfaat yang ada dan sudah mulai dirasakan oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya di Desa Paninggaran adalah sebagai berikut:

- **Angka penyandang disabilitas di Paninggaran sudah terpetakan dengan cukup baik** oleh pemdes, sehingga mereka lebih mudah dilibatkan dalam program.
- **Seiring pendampingan dari KOMPAK dan sehubungan dengan adanya program KUDU Sekolah**, muncul pemahaman dan ketertarikan dari kaum muda (yang sebelumnya putus sekolah) untuk turut serta dalam pengolahan teh di koperasi.
- **Adanya PT CKC sebagai off-taker yang memiliki visi yang sejalan** dalam hal pemberdayaan perempuan, menawarkan peluang keberlangsungan program ke depannya.



### Hambatan

- **Harga teh masih relatif rendah.** Sebagai gambaran:
  1. Pembelian oleh PT Pagilaran sangat rendah dan pembayaran sering terhambat;
  2. Tahun 2012, berdiri kelompok tani, harga naik menjadi Rp2.200/kg;
  3. Berkat pendampingan KOMPAK di tahun 2020 dan peningkatan kualitas teh premium, pucuk teh basah dihargai Rp3.500–5.000/kg.
- **Keterampilan pemetik relatif masih rendah** sehingga produk dihargai rendah. Teknik pemetikan teh berpengaruh pada kualitas pucuk teh yang dipetik.
- **Harga teh yang relatif rendah**, lapangan kerja terbatas, angka kemiskinan tinggi, dan angka putus sekolah tinggi memunculkan fenomena tingginya angka anak putus sekolah yang memilih bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta.
- **Faktor kondisi alam: jalur pejalan kaki** untuk pemetik teh yang mayoritas berupa jalan tanah setapak yang licin saat hujan menyulitkan dan berisiko bagi perempuan dan penyandang disabilitas fisik.
- **Kurangnya rasa percaya diri** (perasaan minder) pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas menyulitkan pelibatan mereka dalam program.



### Kebutuhan

- Pemahaman dan kemampuan petani teh dalam memahami permintaan pasar perlu ditingkatkan.
- Kelompok rentan perlu dibekali keterampilan untuk mengolah daun teh menjadi produk olahan (*value-added tea*).
- Pelatihan perlu diberikan kepada kaum muda penyandang disabilitas terkait produksi teh.
- Akses jalan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas fisik diperlukan di kebun teh.



### Tantangan

Tantangan muncul akibat pandemi COVID-19. Penjualan teh menurun, tetapi waktu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas teh menjadi premium. Anggota koperasi juga mencoba melakukan pemasaran online. Pendampingan KP yang diberikan meliputi pelatihan tata kelola perkebunan teh dan pemetikan teh yang baik, pengolahan (pengeringan dan pengemasan) teh, serta pemasaran yang didampingi oleh PT CKC selaku *off-taker*.



### Pola Kelembagaan

Koperasi Berdikari Makmur Paninggaran telah berbadan hukum sejak tahun 2016. Dalam implementasi program KP, KOMPAK menggandeng beberapa OPD di antaranya Bappeda Kabupaten Pekalongan, Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah kecamatan, dan Pemdes Paninggaran, dan *off-taker*, yakni PT CKC.

### Pembelajaran Penting



**Pendekatan yang baik, humanis, dan terjalin/terpelihara dalam jangka waktu lama diperlukan untuk membangun kepercayaan** penyandang disabilitas terhadap pemdes dan/atau komponen lain di masyarakat (misal: pengurus koperasi, dll.) karena adanya kecenderungan untuk menutup diri.

**Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan di tahap perencanaan intervensi memengaruhi implementasi program.** Dari perspektif GESI, pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan soal GESI penting untuk menjamin pelibatan kelompok rentan.

### Praktik Terbaik

- *Local champion* dengan kesadaran, pemahaman, dan komitmen tinggi mendukung kesuksesan implementasi program.
- Kesadaran dan dukungan pemdes dalam pelibatan dan pemberdayaan kelompok rentan berdampak signifikan.
- Pelibatan kelompok rentan dalam program pemberdayaan masyarakat yang berhasil, pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemdes untuk membangun desa.

### Keberlanjutan Program

Program sudah berjalan cukup baik. Kendala ada di aspek transisi karena pemangku kepentingan lokal (OPD dan pemda terkait) umumnya punya agenda dan kepentingan sendiri, sehingga pemdes dan koperasi merasa membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk memastikan keberlanjutan program setelah kerja KOMPAK selesai.

### Tahap Pengukuran Hasil

M&E dilakukan melalui observasi dan kunjungan lapangan oleh pemdes, serta diskusi berkala dengan staf KOMPAK di Paninggaran, Pekalongan. Indikator keberhasilan (dirangkum dari pendapat pemangku kepentingan dan penerima manfaat) meliputi:

**1 Peningkatan penghasilan. Harga pucuk teh mulai membaik dari Rp900/kg, menjadi Rp2.200/kg dan untuk pucuk premium dihargai Rp3.500–5.000/kg.**

**2 Peningkatan kepercayaan diri petani teh** dalam mengolah produk (teh kualitas premium). Setelah pendampingan dari KOMPAK, produk ini dianggap menjadi ikon desa.

**3 Peran kelompok disabilitas yang diuntungkan.** Sebelumnya, kelompok ini hanya bisa memetik 1 kg teh yang dihargai Rp5000/kg. Kini, pekerjaan kelompok ini lebih ringan tetapi pendapatan relatif meningkat.

**4 Peningkatan kapabilitas** di antara pengurus koperasi (manajemen, pengelolaan keuangan, dsb).

**5 Peningkatan keterampilan tata kelola kebun teh di antara petani.** Ini merupakan dampak tidak langsung dari pendampingan KOMPAK. Kebun teh kini terpelihara dengan baik dan debit air desa terjaga (ada 900 sambungan air yang tersuplai dengan baik di semua musim yang mampu menyuplai 6 desa lain saat musim kemarau).

**6 Peningkatan kualitas teh mendorong peningkatan jumlah *off-taker* yang melirik produk teh.** Sejauh ini, secara resmi PT CKC bertindak sebagai *off-taker* untuk Koperasi Berdikari Makmur.

**7 Peningkatan kualitas keterlibatan perempuan.** Ini tampak pada peran penting yang mulai dipegang perempuan (mis. wakil ketua dan sekretaris) dalam kepemimpinan koperasi.



## 2.5. DESA WISATA NANAS MADU PEMALANG, JAWA TENGAH DENGAN KOMODITAS PARIWISATA



### Konteks Ekonomi Lokal

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan 16,2% dan tingginya angka pengangguran tinggi yakni sebesar 6,5%. Situasi ini menjadi salah satu alasan pemilihan kabupaten ini sebagai lokasi uji coba pendekatan KP. Potensi lokal kabupaten adalah nanas madu Pemalang yang dikembangkan untuk tujuan pariwisata berbasis kawasan: Desa Wisata Nanas Madu Pemalang (Dewi Nadulang). Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk yang menjadi buruh bangunan di kota besar cukup tinggi. Salah satu kondisi yang melatarbelakangi ini adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah. Lokasi program berada di Kecamatan Belik (Desa Sikasur dan Bulakan) dan Kecamatan Pulosari (Desa Gunungsari dan Cikedung) yang memiliki karakteristik potensi pariwisata masing-masing (agrowisata perkebunan nanas, pertunjukan seni tari, arung jeram, dll.).

### Tahap Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi

#### 1. Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan

Tahapan seleksi dan analisis komoditas dilaksanakan dengan diskusi bersama atau urun ide antara KOMPAK dan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah lokal, OPD terkait, pemdes, serta perwakilan masyarakat). Pemkab Pemalang menggandeng Dinpar dan Bappeda Pemalang, pemerintah kecamatan, dan pemdes terkait, sekaligus Pokdarwis. Analisis potensi wisata dilaksanakan dengan mengundang pihak dari Caventer (platform edukasi dan promosi untuk

pengembangan komunitas dan pariwisata berkelanjutan) yang selanjutnya berperan sebagai *off-taker* dan memberikan pendampingan kepada Pokdarwis dalam pengembangan Dewi Nadulang.

Pendampingan KOMPAK didasari penetapan 27 kawasan pengembangan wisata oleh Pemkab Pemalang serta payung hukum yakni 5 perbup terkait Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Dalam kajian analisis potensi wisata yang dilaksanakan lewat Caventer, potensi atraksi wisata, kesiapan desa terhadap pengembangan wisata, pemetaan mitra potensial, serta strategi diidentifikasi.

Forum desa untuk menampung aspirasi warga di Pemalang hadir dalam bentuk acara Selapanan, yang dalam Bahasa Jawa artinya “peringatan 35 hari”. Selapanan merupakan acara pertemuan sebulan sekali bagi warga desa untuk membahas isu-isu di wilayah mereka. Perempuan dan penyandang disabilitas turut hadir dalam acara ini. Pelibatan kelompok penyandang disabilitas masih belum optimal. Sejauh ini, baru ada 1 orang penyandang disabilitas fisik yang terlibat dalam pengembangan Dewi Nadulang yakni sebagai perajin anyaman bambu. Hasil anyamannya dijual di kawasan wisata. Ke depannya, pemdes dan OPD akan bersiap untuk lebih optimal melibatkan penyandang disabilitas dalam bidang Teknologi Informasi/TI atau promosi wisata. Selain Selapanan, pemdes juga mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di tingkat dusun agar kelompok rentan lebih berani menyuarkan pendapat.

## 2. Tahap Perencanaan Intervensi

KOMPAK selalu menerapkan prinsip GESI dalam programnya. Dalam acara-acara di tingkat desa, partisipasi perempuan minimal 30% sudah digalakkan. Awalnya, perempuan hanya berperan sebagai admin promosi paket wisata dan bendahara. Namun, seiring berjalannya waktu, pengurus membuka kesempatan bagi anggota perempuannya untuk mengikuti pelatihan sebagai pemandu arung jeram. Selain itu, perempuan diberi peran di UKM pendukung desa wisata seperti untuk membuka kedai kopi, warung, dsb.



### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Pemdes mengintegrasikan data penyandang disabilitas untuk memetakan peluang pelibatan mereka dalam program pengembangan desa wisata ini. Namun, kegiatan yang ada (agrowisata nanas, wisata alam, pertunjukan seni tari, dll.) dirasa belum cukup ramah bagi penyandang disabilitas. Kepala Desa Bulakan mengatakan salah satu

upaya untuk menjadikan kegiatan ramah penyandang disabilitas adalah penyediaan sarpras berupa akses khusus bagi penyandang disabilitas di panggung pertunjukan seni tari. Meski demikian, pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal dan ke depannya, kegiatan akan diupayakan agar lebih ramah untuk penyandang disabilitas yang menjadi pengunjung dan pengelola desa wisata, misalnya sebagai staf administrasi, TI/internet, promosi wisata, dan staf UKM pendukung desa wisata.

## Tahap Implementasi

Pokdarwis dan pemdes menyatakan bahwa pengembangan desa wisata ini telah memberikan cukup ruang bagi kelompok rentan, khususnya perempuan (dengan angka partisipasi minimal 30%). Namun, baru ada 1 orang penyandang disabilitas yang dilibatkan dalam program.

Dalam Pokdarwis, perempuan berperan sebagai sekretaris/staf pembukuan, dan di UKM pendukung, perempuan diberi akses dan pilihan untuk memegang peran berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, faktor keselamatan kerja perlu dipertimbangkan. Pemdes perlu mempertimbangkan pelibatan kelompok penyandang disabilitas secara khusus dalam mengembangkan desa wisata yang mengandalkan potensi alam (perkebunan dan sungai untuk arung jeram).

Sejauh ini, pelibatan belum optimal karena sarpras pendukung belum memadai. Pelibatan satu orang penyandang disabilitas sebagai perajin anyaman bambu adalah salah satu bentuk pertimbangan pelibatan kelompok penyandang disabilitas berdasarkan akses dan keselamatan kerja. Jam kerja di UKM pendukung Pokdarwis bergantung dari jumlah dan waktu kunjungan. Waktu kunjungan wisata yang fleksibel (yang terkadang sampai malam) menjadi kendala bagi perempuan untuk turut serta secara penuh.

Tabel 13. Pola dan Peran Para Pemangku Kepentingan Dewi Nadulang, Pemalang

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	Caventer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan Pokdarwis; dan</li> <li>• Penyusunan kegiatan di tiap desa.</li> </ul>



### Peluang dan Manfaat

- Dinsos sudah menjalankan program pelatihan bagi ibu-ibu, seperti terkait pengolahan kerupuk kulit yang hasilnya dijadikan suvenir desa wisata.
- Partisipasi aktif PKK, pegiat lingkungan, pegiat/kader sosial dan perangkat desa, dapat menjadi motor penggerak dan pendukung keberlangsungan program/pelibatan kelompok rentan.



### Hambatan

- Angka pekerja yang memilih bekerja sebagai buruh bangunan di kota-kota besar tinggi.
- Faktor **kondisi alam** desa wisata kurang sesuai untuk pelibatan kelompok penyandang disabilitas.
- Pelibatan **perempuan** terkendala **kurangnya komitmen** mereka di program Dewi Nadulang.
- Pengetahuan dan keterampilan Pokdarwis mengenai pengelolaan wisata masih kurang.
- **Wadah untuk penyandang disabilitas** di program-program pemberdayaan masyarakat belum ada.
- Keanggotaan di Pokdarwis masih sebatas untuk kerja sosial.
- Lapangan kerja bagi kaum muda usia lulus SMA minim, sehingga meningkatkan risiko pengangguran.



### Kebutuhan

- Pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan desa wisata, diversifikasi produk pendukung desa wisata, dan promosi wisata perlu ditingkatkan.
- Pelatihan manajerial perlu diberikan bagi Pokdarwis.
- Peningkatan kapasitas perlu diberikan bagi perangkat desa guna menciptakan wadah bagi pelibatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- **Kemudahan akses** diperlukan bagi penyandang disabilitas fisik di desa wisata maupun fasilitas pendukung.
- Akses pasar bagi produk-produk hasil produksi kelompok rentan perlu ditingkatkan.



### Tantangan (Dampak Pandemi Covid-19)

- Kunjungan wisata terdampak/menurun drastis (hampir 0).
- Ada penyesuaian dengan keadaan pandemi yang dijalankan lewat pelatihan *virtual tour* (yang justru mendapatkan respons yang luar biasa, bahkan memenangkan BCA Awards).

Di tahap awal, uji potensi wisata dilaksanakan lewat Caventer. Penyusunan kegiatan di tiap desa selanjutnya dilakukan oleh tiap Pokdarwis. *Off-taker* juga telah memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai target program ini (kelompok rentan).



### Pola Kelembagaan

Pola relasi antarlembaga (pemdes, Dinsos, dan Pokdarwis) sudah cukup mengakomodasi kebutuhan dan pelibatan kelompok rentan. Caventer sebagai *off-taker* berkontribusi dalam meningkatkan kualitas desa

wisata melalui pelatihan paket wisata dan service excellence sekaligus pendampingan promosi melalui media sosial dan pengenalan Pokdarwis ke jaringan tour operator. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KOMPAK bersama-sama melakukan penguatan kelembagaan pengelolaan desa wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM akan membantu kelembagaan BUMDes dan UMKM desa, Dinas Kebersihan akan membantu menjaga kebersihan desa wisata, dan sebagainya<sup>15</sup>.

15 AKATIGA. (2021). Laporan Studi Evaluasi, Program Uji Coba Keperantaraan UMKM KOMPAK.

## Pembelajaran Penting



Pelibatan kelompok penyandang disabilitas perlu mempertimbangkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki, serta mencakup pendampingan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan tersebut. Misalnya, dalam pelibatan satu orang penyandang disabilitas dengan keterampilan menganyam, yang ternyata juga memiliki minat dan keterampilan menggambar dan/atau

melukis wayang, pendamping perlu peka dalam membaca permintaan pasar akan anyaman untuk menyesuaikan produksi anyaman dengan minat pasar.

## Praktik Terbaik dan Keberlanjutan Program

Kesadaran dan dukungan Pemdes dalam pelibatan dan pemberdayaan kelompok rentan berperan signifikan misalnya, dalam pemetaan warga desa penyandang disabilitas, pemetaan kebutuhan mereka, pemberian bantuan sosial/pelatihan keterampilan, dsb. **Dari sisi keberlanjutan program,** kendala ada di **aspek transisi** karena pihak pemangku kepentingan lokal (OPD dan Pemda terkait) umumnya memiliki agenda dan kepentingan sendiri, sehingga pemdes dan koperasi merasa memerlukan dukungan dari pihak lain untuk memastikan keberlanjutan program ini setelah kerja KOMPAK selesai.

## Tahap Pengukuran Hasil

M&E dilakukan melalui observasi dan kunjungan lapangan oleh Pemdes serta diskusi berkala dengan staf KOMPAK, **Indikator keberhasilan** di antaranya: (1) Peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan *public speaking* perempuan, (2) Perempuan memegang peran cukup penting dalam kepengurusan Pokdarwis, (3) Angka partisipasi kelompok penyandang disabilitas, dan (4) Rasio laki-laki dan perempuan dalam program.



## 2.6. BUMDESMA BANJAR DAN PANGGUL, KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR DENGAN KOMODITAS SABUT KELAPA



### Konteks Ekonomi Lokal

Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mencapai 12,02% dari total penduduknya (BPS, 2018). Kecamatan Panggul memiliki jumlah penduduk paling besar di Kabupaten Trenggalek, dengan luas wilayah sebesar 131,56 KM<sup>2</sup>. Sebanyak 17 desa di Kecamatan Panggul merupakan wilayah paling miskin, dengan sebanyak 10.834 rumah tangganya memiliki tingkat kesejahteraan 40% terbawah<sup>16</sup>. Sejak awal, Kecamatan Panggul merupakan wilayah sentra pohon kelapa dan ada UKM skala kecil dengan produksi terbatas dan pegawai sedikit yang menjalankan usaha pengolahan sabut kelapa menjadi *coco fiber* dan *coco britsle* (pengolahan sabut kelapa menjadi produk seperti sapu lantai). KOMPAK melihat wilayah ini memiliki komoditas potensial, masyarakat miskin yang dapat dilibatkan, dan UKM lokal. Karenanya, KOMPAK berharap potensi ini dapat dikembangkan melalui program KP.

### Tahap Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi

#### 1. Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan

Tahapan pertama adalah **observasi lapangan** dan **diskusi dengan Pemkab Trenggalek**. Observasi lapangan menemukan bahwa Kecamatan Panggul memiliki banyak pohon kelapa dengan sabut kelapa yang menumpuk di sepanjang jalan. **Melalui diskusi dengan pihak Kecamatan Panggul dan UKM lokal**, selanjutnya dipilih komoditas sabut kelapa di Desa Panggul dan Banjar untuk diolah menjadi produk olahan sabut kelapa. Pendampingan pengolahan sabut kelapa ini didasari realitas UKM lokal yang telah mengolah sabut kelapa sejak tahun 2014 dengan mayoritas pekerjanya perempuan. Pendapatan yang diterima adalah Rp40.000/hari (untuk produk sapu/anyaman) dan Rp70.000/hari (untuk produk *coco bristle*).

16 [https://www.kompak.or.id/id/download/412/2019\\_Pengembangan%20Sentra%20Pengolahan%20Sabut%20Kelapa%20Kecamatan%20Pule%20Kabupaten%20Trenggalek.pdf](https://www.kompak.or.id/id/download/412/2019_Pengembangan%20Sentra%20Pengolahan%20Sabut%20Kelapa%20Kecamatan%20Pule%20Kabupaten%20Trenggalek.pdf)

Tahapan seleksi dan analisis komoditas dilaksanakan lewat diskusi bersama atau urun ide antara KOMPAK dan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah lokal, OPD terkait, pemdes, serta **perwakilan masyarakat/UKM**). Pemkab Trenggalek menggandeng Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pendamping kecamatan. Pemkab Trenggalek dengan pendampingan KOMPAK juga melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (**Musrena Keren**) dan Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan (**Sepeda Keren**) selama 3 tahun terakhir. Kegiatan ini sudah berjalan hingga tingkat kabupaten dan melahirkan program-program prioritas untuk kelompok rentan. Musyawarah ini telah melibatkan ibu-ibu dan penyandang disabilitas. Melalui dua agenda tersebut, berbagai OPD menunjukkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam intervensi ini.

KOMPAK sudah menerapkan prinsip GESI saat berdiskusi membahas **kesesuaian komoditas dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan** dengan pemda dan UKM lokal. Beberapa pembahasan yang diangkat ialah sebagai berikut: (1) pengolahan sabut kelapa menjadi beberapa produk seperti sapu dan pot bunga membutuhkan keterampilan menganyam, dan tidak memerlukan alat berat, **sehingga tidak berisiko dan dinilai cocok untuk dilakukan perempuan dan penyandang disabilitas**, (2) pekerjaan menganyam **bisa dikerjakan di waktu luang**, dan (3) **penentuan lokasi rumah produksi di tengah permukiman sehingga bisa diakses kapan saja**.

Perempuan di Kecamatan Panggul menunjukkan antusiasnya terhadap program selama sosialisasi dari KOMPAK yang menginformasikan bahwa program akan melibatkan kelompok rentan termasuk perempuan.

## Tahap Implementasi

Proses produksi di BUMDesma sebelumnya belum berjalan karena hasil olahan sabut belum memenuhi standar dan modal tidak mencukupi di awal uji coba, sehingga produksi tidak bisa dilanjutkan dengan *off-taker*. Dengan bantuan modal dan peralatan di tahun 2019 dan 2021, pendampingan dimulai lagi di pertengahan tahun 2021 bersama UMKM. Karena BUMDesma melibatkan UKM lokal dalam prosesnya, kajian selanjutnya terkait dengan GESI dengan fokus pada pelibatan kelompok rentan dalam proses pengolahan sabut kelapa di UKM lokal.

*“...meskipun usaha ini milik saya (terserah saya), tetap ada arahan dari KOMPAK untuk melibatkan kelompok rentan dan penyandang disabilitas”*

Pemilik UKM Lokal Sabut Kelapa



### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Di UKM lokal pengolahan sabut kelapa, jumlah pekerja saat ini berjumlah antara 17–24 orang (4 orang laki-laki, dan sisanya adalah perempuan). Namun, belum ada penyandang disabilitas yang terlibat di UKM. Untuk pelatihan yang difasilitasi KOMPAK, baik perempuan maupun laki-laki pekerja UKM lokal sudah dilibatkan dalam pelatihan teknis, seperti terkait cara pengoperasian mesin pengolah sabut kelapa dan pelatihan nonteknis

seperti terkait pembuatan proposal. Selain itu, KOMPAK juga mengundang peserta perempuan penyandang disabilitas dalam pelatihannya. Pengambilan bahan baku dilakukan oleh pemilik UKM (laki-laki) dan istrinya (agar *gender-balanced*). Proses pengolahan sabut hingga penjemuran dan penganyaman dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.

Produksi menggunakan 3 mesin: 1 mesin pemisah bahan baku (lebih berisiko tinggi karena tajam), dan 2 mesin penghalus. Pengoperasian mesin pemisah dan penanganan masalah mesin biasanya ditangani laki-laki. Secara umum, jam kerja laki-laki dan perempuan sama, yakni dari pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore. Pekerja perempuan merasa sangat senang bekerja, karena selama ini selalu merasa punya waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Bahkan, pekerjaan domestik terkadang juga dikerjakan bersama-sama sebagai bentuk dukungan suami untuk istrinya.



### Peluang dan Manfaat

#### 1) Ada manfaat ekonomi/peningkatan pendapatan.

- Pekerja perempuan yang tadinya ibu rumah tangga dan tidak berpenghasilan kini berpenghasilan. Penganyam bisa mendapat Rp40.000 dengan membuat 40 sapu (sehari), (Rp1.000 per sapu), atau sekitar Rp1.200.000 sebulan.

Mereka merasa senang ‘bisa memberikan anak tambahan uang jajan’.

- Pendapatan meningkat dua kali lipat setelah ada bantuan mesin. Dengan mesin, produksi berlipat dan meningkatkan pendapatan hingga Rp70.000–80.000 per hari.

#### 2) Pendampingan dan pelatihan meningkatkan keterampilan teknis dan nonteknis.

- Teknis: pengoperasian mesin, untuk menganyam bahan baku menjadi produk olahan sabut kelapa seperti sapu dan vas bunga.
- Nonteknis: tata kelola dan pembukuan (penyusunan proposal bisnis, penghitungan HPP bisnis, dan pelaporan akuntansi sederhana).
- Pelatihan juga meningkatkan kualitas produk sehingga sesuai standar *off-taker*, tahap ini masih berjalan.

#### 3) Ada kesadaran akan kesetaraan gender dan pelibatan penyandang disabilitas.

- Banyak dari peserta, khususnya pekerja perempuan, mampu mengaktualisasikan diri dan menjadi percaya diri serta mulai berpikir “ternyata saya bisa dan saya punya kemampuan”.
- Adanya sosialisasi tentang kesetaraan gender mendorong terwujudnya kebebasan dalam menyuarakan hak dan suara perempuan.



### Hambatan

- Kelompok penyandang disabilitas hanya terlibat dalam pelatihan. Pelibatan kelompok ini perlu didorong agar usaha pengolahan sabut kelapa bisa terlaksana secara inklusif sesuai dengan rencana.
- Produksi terbatas sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan pembeli.

Secara spesifik, proses bisnis yang didesain ialah kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BUMDesma. Rantai nilai yang direncanakan untuk proses bisnis ini ialah sebagai berikut:

- 1) **Petani kelapa – menjual limbah sabut kelapa;**
- 2) **BUMDesma – mengolah limbah sabut kelapa; dan**
- 3) **Off-taker – memberikan pendampingan dan melaksanakan penjualan.**

Terkait pelatihan, *off-taker* memberikan pelatihan teknis terkait pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan seperti sapu, vas bunga, dan lainnya, serta pelatihan nonteknis seperti terkait tata kelola BUMDes. Pengolahan limbah kelapa diharapkan dapat memberikan manfaat seperti: (1) Limbah sabut kelapa dimanfaatkan menjadi coco bristle, coco fiber, dan coco peat; (2) Limbah sabut kelapa yang dimanfaatkan sejumlah 16.878 ton/tahun; dan (3) Produksi menyasar pasar ekspor<sup>17</sup>.



### Pola Kelembagaan

Pengolahan limbah sabut kelapa sudah dilakukan dengan kolaborasi dengan UKM lokal. Meskipun fokus KOMPAK dalam program ini ialah pengembangan kapasitas BUMDesma, pemilik UKM juga dilibatkan sebagai pembina BUMDesma dan kerja sama bisnis akan dilakukan dengan UKM miliknya – nantinya, mekanismenya diharapkan dapat menjadi satu kesatuan.

Terkait pemodalan, Desa Banjar (di tahun 2019) dan Desa Panggul (di tahun 2021) telah menerima bantuan berupa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari Pemkab untuk membuat mesin pengolahan sabut kelapa, mendirikan pabrik sabut kelapa, dan mengadakan sarpras pendukung. Pemkab dan pemdes juga memberikan 6 mesin penunjang, gudang, listrik, dan akses jalan menuju pabrik.

**Tabel 14. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan di BUMDesma Desa Banjar dan Panggul, Kabupaten Trenggalek**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	Off-taker	Peningkatan kapasitas bagi BUMDesma: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis untuk terkait pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan seperti sapu, vas bunga, dan lainnya.</li> <li>• Pelatihan nonteknis seperti terkait tata kelola BUMDes.</li> </ul>
2	Pemkab Trenggalek	Pengalokasian BKK Desa untuk modal, diberikan di Desa Banjar (tahun 2019) dan Desa Panggul (tahun 2021), untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat mesin pengolahan sabut kelapa (mesin dibuat masyarakat lokal dengan mencontoh mesin UKM lokal, dan</li> <li>• Mendirikan pabrik sabut kelapa.</li> </ul> Pengadaan sarpras berikut bersama pemdes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesin penunjang;</li> <li>• Gudang;</li> <li>• Listrik; dan</li> <li>• Akses jalan menuju pabrik.</li> </ul>
3	UKM Lokal dan BUMDes	Pengolahan limbah sabut kelapa
4	Petani kelapa	Penjualan limbah sabut kelapa

17 Flyer Pengembangan Sentra Pengolahan Sabut Kelapa Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, KOMPAK, 2019

## Pembelajaran Penting



Di samping pelibatan kelompok rentan (di BUMDesma dan UKM lokal), **kualitas produk yang memenuhi standar *off-taker* dan pembeli masih perlu diprioritaskan.**

**Memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi kelompok rentan penting.** Apabila sudah ada inisiatif dan keinginan dari kelompok rentan, pelaksana program dan pemangku kepentingan wajib memberi wadah dan fasilitas. Praktik terbaik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek adalah suara kelompok sudah ditampung dan difasilitasi, serta kelompok rentan dilibatkan dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal.

Pemda dan OPD Trenggalek mengakui belum ada indikator spesifik dan pengukuran teknis di lapangan. Namun, hasil dari program ini biasanya dilihat dari indikator yang meliputi: (a) Persentase pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam program, (b) Peningkatan penghasilan masyarakat miskin dan kelompok rentan, (c) Terbukanya akses bagi kelompok rentan untuk berkegiatan secara produktif dan bersosialisasi di masyarakat, (d) Indikator dalam RPJMD (seperti peningkatan IPG, program-program yang diinisiasi bupati, dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif), serta (e) Terlaksananya Musrena Keren dan Sepeda Keren yang menjadi wadah musyawarah dan penyampaian aspirasi kelompok rentan.



## 2.7. KELOMPOK PENGOLAH MOCAF BOGA LESTARI KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR DENGAN KOMODITAS TEPUNG SINGKONG/MODIFIED CASSAVA FLOUR (MOCAF)



### Konteks Ekonomi Lokal

Selain beras dan jagung, singkong atau ketela pohon merupakan satu tanaman pangan utama di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Potensi tanaman pangan di wilayah ini cukup besar, tetapi belum dimanfaatkan optimal karena kurangnya daya serap serta masih minimnya teknologi pengolahan pascapanen dan diversifikasi pangan. KOMPAK mengidentifikasi potensi singkong di Kabupaten Pacitan sebagai salah satu fokus intervensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Pelatihan terkait pengolahan produk singkong bernilai tambah diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi warga di Desa Ketro, Kecamatan Kebon Agung. Harga jual singkong adalah Rp1.250/kg sedangkan harga jual tepung mocaf Rp7.000/500gram. Sasaran pasar tepung *mocaf* ini adalah produsen olahan makanan seperti mie, keripik tempe, *bakery*, dsb., dengan perluasan potensi pasar ke sejumlah kabupaten sekitar seperti Yogyakarta dan Solo. Terkait aspek GESI, pengolahan singkong menjadi tepung mocaf menysasar pekerja rumahan seperti ibu-ibu rumah tangga.

## Tahap Riset Komoditas dan Perencanaan Intervensi

### 1. Seleksi dan Analisis Komoditas dan Rekognisi Pendapat Kelompok Rentan

Tahapan seleksi dan analisis komoditas dilaksanakan dengan diskusi bersama atau urun ide antara KOMPAK dan seluruh pemangku kepentingan (Pemkab Pacitan, Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, serta Pemerintah Kecamatan dan Pemdes). Singkong dipilih karena merupakan satu dari tiga tanaman pangan yang paling banyak ditanam di Pacitan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Laporan tahap perencanaan program oleh Tulodo menyebutkan bahwa sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan tidak menyebutkan secara langsung kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

### 2. Tahap Perencanaan Intervensi

KOMPAK menekankan penerapan prinsip GESI dalam perencanaan intervensi yakni (1) Pelibatan Perempuan (sejak awal, kegiatan intervensi menargetkan ibu rumah tangga), dan (2) Pelibatan penyandang disabilitas (belum ada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses produksi).

## Tahap Implementasi



### Keterlibatan Kelompok Rentan dan Pembagian Peran

Kelompok Mocaf Bogati beroperasi sejak 2018 dan beranggotakan 10 orang (ibu-ibu rumah tangga dan siswa SMK magang). Pembagian peran dilakukan *by nature*: laki-laki mengambil bahan baku (memanen, mencuci, dan memotong singkong) dan perempuan mengolahnya menjadi tepung *mocaf* atau kue, es krim *mocaf*, dll. Terkait pembagian jam kerja, produksi dilakukan ibu-ibu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.



### Peluang dan Manfaat

- Pengerjaan keping kering bahan tepung *mocaf* yang bisa dilakukan di rumah memberikan peluang bagi ibu rumah tangga untuk turut serta dalam rantai produksi dan menambah penghasilan.
- Tepung *mocaf* bersifat gluten-free sehingga ada pasar potensial yakni masyarakat yang ingin lebih sehat.
- Tepung *mocaf* dapat diolah menjadi es krim, kue, dll., ini perlu disosialisasikan dengan lebih baik.
- Kesadaran masyarakat untuk mengolah singkong menjadi bahan pangan alternatif bernilai jual sudah terbentuk.



### Hambatan

- Pasar/pembeli belum terbentuk.
- Kelompok penyandang disabilitas belum teridentifikasi dan terlibat.
- Karena faktor lingkungan dan cuaca, singkong telo paerah/manihot utilissima menjadi langka di Desa Ketjo, sehingga singkong harus dibeli dari Kabupaten Karanganyar.
- Kelembagaan Kelompok Bogasari belum kuat sehingga masih bertumpu pada ketuanya.



### Kebutuhan dan Tantangan (Dampak Pandemi COVID-19)

Beberapa hal yang perlu diupayakan di antaranya: (1) Pembentukan pasar, (2) Optimalisasi pelibatan kelompok rentan lain (penyandang disabilitas), dan (3) Pelatihan produksi bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Tantangan di antaranya meliputi: (1) Penjualan menurun,

sehingga produksi terhenti hingga saat ini, dan (2) Ada anggota yang beralih ke profesi lain yang lebih menguntungkan.

Program ini berangkat dari keberadaan usaha bakery dari salah seorang warga desa yang mengganti tepungnya dengan tepung *mocaf*. Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pangan dan Dinas Perikanan memberikan pendampingan pelatihan terkait pengolahan bahan baku dan produksi. Hasil produksi sebelum pendampingan dari KOMPAK kurang dari 30 kilogram per bulan dengan pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp200,000–300,000. Setelah pendampingan dari KOMPAK (berupa perbaikan kemasan dan pelatihan pemasaran online), hasil produksi meningkat menjadi 70 kilogram/bulan dan penghasilan meningkat menjadi Rp900.000.



### Pola Kelembagaan

Para pihak yang terlibat dalam program: Pemkab Pacitan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, BUMDes Kebon Agung, Pemerintah Kecamatan Kebon Agung, dan Pemdes Ketjo. Selama pendampingan dan pengembangan, beberapa upaya kolaborasi di antara pemangku kepentingan tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, terkait pelaksanaan rencana dan upaya kerja sama antara kelompok produksi *mocaf* dengan pemdes dan BUMDes Kebon Agung. Pemdes hanya menyediakan lahan untuk menanam tanpa mengalokasikan dana untuk modal awal, tetapi meminta pembagian hasil dan pengelolaan bisnis. Ini mengakibatkan berhentinya produksi *mocaf*.

Upaya penjualan melalui Indoguna dan Abimart juga tidak berjalan lancar karena pembayaran yang tidak lancar dan berhentinya pemesanan. Selain itu, ada relasi yang kurang kuat dan isu kepercayaan di antara anggota dan ketua.

**Tabel 15. Pola dan Peran Pemangku Kepentingan Kelompok Pengolahan Mocaf di Kabupaten Pacitan**

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Dukungan
1	Pemkab Pacitan: Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pangan dan Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan; dan</li><li>• Pelatihan pengolahan bahan baku dan produksi.</li></ul>
2	BUMDes Kebon Agung, Pemerintah Kecamatan Kebon Agung, dan Pemdes Ketoro.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan kemasan</li><li>• Pelatihan pemasaran online.</li></ul>

### Pembelajaran Penting



Pembelajaran yang dapat diambil di antaranya: (1) Pemilihan komoditas singkong yang merupakan potensi sumber daya alam lokal sudah tepat, (2) Ide pengolahan singkong menjadi tepung mocaf dengan harapan perempuan di sekitar pabrik dapat dilibatkan juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang tepat sasaran. Namun, aspek keberlanjutan program dari sisi ketersediaan bahan baku

serta keberlanjutan pasar masih perlu diperhitungkan. Selain itu, penciptaan pasar/identifikasi pembeli perlu dilakukan untuk membentuk permintaan atas komoditas ini. Pemilihan komoditas unggulan dan proses produksi yang dekat dengan warga memudahkan perempuan (ibu rumah tangga) berpartisipasi dalam kegiatan produksi.

### Tahap Pengukuran Hasil

OPD menyatakan pengukuran hasil program didasarkan pada indikator berikut:

- Adanya pelibatan perempuan dan disabilitas dalam program.
- Adanya peningkatan penghasilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- Terbukanya akses bagi kelompok rentan untuk berkegiatan secara produktif dan bersosialisasi di masyarakat.
- Adanya peningkatan rasa percaya diri pada kelompok rentan untuk berkegiatan secara produktif.



# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*